28 TH REPUBLIKA
MELANGKAH BERSAMA MENGUATKAN BANGSA

REPUBLIKA

MAHAKA GROUP
NOMOR 60/TAHUN KE-29
Rp. 5.500
16 HLM/20 HLM E-PAPER
Luar P Jawa Rp 6.000 (ditambah ongkos kirim)

JUMAT, 5 MARET 2021 | 21 RAJAB 1442 H
www.republika.co.id
@republikaonline @republikaonline RepublikaOnline

AP PHOTO/STR

BENTROKAN Pengunjuk rasa antikudeta militer mendirikan barikade saat berhadapan dengan aparat keamanan di Yangon, Myanmar, Kamis (4/3). Tindakan aparat terhadap pengunjuk rasa di Myanmar sejauh ini telah menewaskan sedikitnya 50 orang.

Jokowi: Gaungkan Benci Produk Asing

Ajakan mencintai produk dalam negeri diharapkan lebih diplomatis.

■ DESSY SUCIATI SAPUTRI, DEDY DARMAWAN NASUTION

JAKARTA — Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Kementerian Perdagangan menyiapkan kebijakan dan strategi untuk mengembangkan pasar produk nasional, khususnya UMKM. Ia pun meminta agar jajarannya mendorong masyarakat untuk mencintai dan mendukung produk-produk dalam negeri.

"Gaungkan juga benci produk-produk luar negeri. Bukan hanya cinta, tapi benci. Cinta barang kita, benci produk luar negeri," kata Jokowi saat meresmikan pembukaan Rapat Kerja Nasional Kementerian Perdagangan di Istana Negara, Kamis (4/3).

Selain itu, ia juga meminta agar pusat perbelanjaan seperti mal di berbagai daerah memberikan ruang bagi produk-produk buatan Indonesia, khususnya produk UMKM. Lokasi-lokasi strategis di pusat perbelanjaan pun harus diisi oleh merek produk-produk lokal.

"Jangan sampai ruang depan, lokasi-lokasi strategis justru diisi dari *brand-brand* dari luar negeri. Ini harus mulai digeser. Mereka digeser ke tempat yang tidak strategis. Tempat yang strategis, lokasi yang baik, berikan ruang untuk *brand-brand* lokal," ujar dia.

Jumlah penduduk Indonesia yang mencapai lebih dari 270 juta jiwa merupakan pasar yang sangat besar. Karena itu, ia meminta agar *branding* untuk mencintai produk lokal harus lebih ditingkatkan.

Sementara itu, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi menekankan agar Kementerian Perdagangan dapat meningkatkan posisi *emerging market* dengan mendorong konsumsi dan meningkatkan peran ekspor-impor dalam menopang pertumbuhan ekonomi.

Ia menyampaikan, pada era kolaborasi, penting untuk membuka pasar karena dapat mendatangkan investasi. Hal itu diharapkan menciptakan pusat produksi dan menjadikan ekspor nonmigas sebagai primadona.

"Kita sedang beralih dari mengekspor barang mentah dan barang setengah jadi menjadi barang industri dan barang industri berteknologi tinggi. Untuk itu, perlu diciptakan pelaku UMKM yang tangguh untuk mewujudkan perdagangan yang adil dan baik demi Indonesia yang sejahtera," katanya.

Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (Ikappi) merespons baik pernyataan Presiden.

"Ini yang kami tunggu, setelah 10 tahun kami menggelorakan gerakan ayo kembali belanja ke pasar tradisional dan ayo belanja ke warung rumahan untuk cintai produk dalam negeri dan produk-produk UMKM sendiri," kata Ketua Bidang Organisasi DPP Ikappi, Muhammad Ainun Najib, dalam keterangan resmi diterima *Republika*, Kamis (4/3).

Ia mengatakan, ajakan dari Presiden Joko Widodo itu patut dipandang positif dan diharapkan mendapat respons positif juga dari masyarakat untuk kembali berdiri di kaki sendiri.

"Kita semua tahu bahwa pandemi ini menggerus seluruh sektor ekonomi. Jika tidak membangkitkan kembali sektor ekonomi, kita tidak mungkin bertahan," ujarnya.

Ainun mencontohkan, seperti diketahui bersama, 95 persen bawang putih yang dikonsumsi masyarakat Indonesia masih impor dari Cina. Selain itu, beberapa komoditas lain, seperti kedelai dan jagung, akan terus mengalir impor-impor di dalam negeri.

"Ini adalah momentum petani kita untuk kembali bangkit dan pulih. Masyarakat juga harus kembali sadar bahwa produk dalam negeri jauh lebih berkualitas dibanding produk luar negeri. Ini momentum," ujarnya.

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Ahmad Heri Firdaus mengatakan, semestinya ajakan dari seorang presiden bisa lebih diplomatis. "Khawatirnya kalau kita gaungkan benci produk luar negeri, lalu dibalas benci produk Indonesia bagaimana? Kita jadi tidak bisa ekspor," kata Heri kepada *Republika*, Kamis (4/3).

Ia mengatakan, di banyak negara saat ini memang sudah mulai intens untuk mengajak masyarakatnya mengutamakan produk dalam negeri. Namun, itu dilakukan dengan slogan-slogan yang fokus pada negeri sendiri tanpa menyinggung negara lain.

Heri melanjutkan, yang terpenting adalah bagaimana agar pemerintah bisa memperkuat posisi industri dalam negeri untuk melakukan substitusi produk impor. "Itu *kan* perlu *roadmap*. Apa yang mau dikurangi impornya harus diimbangi dengan kemampuan industri. Kalau kita langsung kurangi impor, nanti kekurangan barang repot juga," ujar dia.

Selain itu, yang tak kalah penting adalah soal harga barang substitusi impor. Ia menekankan, harga juga harus bisa bersaing agar masyarakat benar-benar mengutamakan produk dalam negeri. "Slogan yang harus dibangun itu aku cinta produk Indonesia, produk lokal, atau *made in* Indonesia 2022. Banyak sebenarnya di berbagai negara. Namun, kalau *statement* benci itu menyerang, ya kita nanti balas. Jadi, fokus ke industri kita saja," katanya.

Lebih lanjut, ia menilai, pemerintah melalui Kementerian Perindustrian sudah memiliki semangat untuk substitusi impor. Salah satunya dalam target penurunan impor produk manufaktur sebanyak 35 persen. Arah itu sudah baik, tapi harus diiringi dengan tindakan agar utilisasi dan produktivitas industri dalam negeri ikut membaik. ■ **ed:** fitriyan_zamzami

BERITA TERKAIT
Matinya UMKM Hijab dan Seruan Benci Produk Asing
Hlm–6

Jamaah Haji RI Prioritas Divaksin

■ ZAHROTUL OKTAVIANI, ALI YUSUF

JAKARTA — Kerajaan Arab Saudi mengisyaratkan bahwa jamaah haji tahun ini harus menjalani vaksinasi Covid-19 terlebih dulu. Terkait hal itu, vaksinasi terhadap jamaah dari Indonesia harus disiapkan.

Kepala Pusat Kesehatan (Kapuskes) Haji Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dr Eka Jusup Singka menyebut, hingga saat ini 173 ribu calon jamaah haji telah masuk daftar prioritas vaksinasi Covid-19. "(Sebanyak) 158.871 jamaah haji reguler, 14.289 jamaah haji khusus. Penyelenggara ibadah haji khusus (PIHK) yang ada NIK juga sudah masuk datanya ke kami," ujarnya saat dihubungi *Republika*, Kamis (4/3).

Dia lantas menyebut ratusan ribu calon jamaah itu nantinya divaksinasi sesuai dengan skema nasional. Untuk saat ini, pemerintah tengah memprioritaskan kelompok lanjut usia (lansia). Jika vaksinasi terhadap kelompok lansia ini selesai, selanjutnya akan beralih ke kelompok rentan. Jamaah haji dari Indonesia sebagian besar masuk dalam kelompok lansia dan rentan.

Menurut dr Eka, hal ini seturut keputusan Kementerian Kesehatan yang telah menetapkan protokol pencegahan Covid-19 bagi para jamaah haji. "Protokol kesehatan harus dipatuhi sebagai upaya pencegahan. Begitu pula vaksinasi juga merupakan upaya pencegahan terhadap Covid-19," ujar dr Eka.

Awamnya, sebagian besar jamaah haji Indonesia merupakan kelompok lanjut usia. Selain itu, jamaah di bawah 60 tahun juga ada yang masuk dari kelompok rentan. Selain itu, para petugas haji juga bisa dikategorikan petugas publik atau petugas kesehatan. "Jadi, dengan skema nasional, tidak ada yang mesti dikhawatirkan.

Bersambung Ke hlm 9 Kol 5-6

Perketat Pengawasan Peredaran Miras

■ INAS WIDYANURATIKAH, SAPTO ANDIKA CANDRA

JAKARTA — Pemerintah diharapkan tak hanya mencabut aturan mengenai investasi industri minuman keras (keras). Peningkatan pengawasan terhadap peredaran miras juga tak kalah penting dilakukan guna menyelamatkan generasi bangsa.

Berbagai pihak sebelumnya mengapresiasi langkah Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang memutuskan mencabut lampiran mengenai investasi industri miras dalam Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal. Namun, muncul juga desakan agar pemerintah turut mencabut lampiran yang mengatur perdagangan eceran minuman keras. Terkait dengan hal itu, kementerian dan lembaga terkait belum bisa dimintai komentar.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyebut, pemerintah perlu memperketat regulasi mengenai peredaran miras. Menurut KPAI, pengawasan terhadap peredaran miras masih lemah sehingga anak yang belum cukup umur bisa menjangkau minuman tersebut.

Komisioner KPAI Jasra Putra mengatakan, regulasi haru diperketat agar anak-anak tidak bisa mendapatkan akses terhadap miras.

"Regulasi pengawasannya yang bisa dianggap masih lemah. Karena lebih pada melengkapi persyaratan tulisan bahwa produk ini tidak boleh dikonsumsi dan dijangkau anak," kata Jasra, Kamis (4/3).

Jasra mengatakan, ada banyak laporan dari masyarakat mengenai tempat-tempat tertentu yang dijadikan lokasi mengonsumsi miras oleh anak-anak. Padahal, mestinya kebijakan larangan itu mengikat semua pihak, baik yang membuat, menjual, maupun mengedarkan.

Menurut dia, saat ini sudah banyak laporan pencegahan anak-anak untuk tidak mengonsumsi minuman keras. Namun, pada tingkat masyarakat hal ini sangat sulit dicegah. "Sehingga lebih me-

Bersambung Ke hlm 9 Kol 1-3

REHAT

Golkar: Safari politik Airlanggga tak terkait 2024
Cuma iseng *gitu*?

Menkumham: Tiga pasal UU ITE multitafsir
Pantas banyak korbannya

Djoko Dituntut 4 Tahun

Majelis hakim diharapkan memvonis Djoko Tjandra lebih berat dari tuntutan jaksa.

» NASIONAL HLM 3

Versi Lengkap Baca E-paper

ICC Selidiki Kejahatan Perang di Palestina

Selain Israel, kelompok perjuangan Palestina bakal turut diinvestigasi.

» INTERNASIONAL HLM 4

Antisipasi Lonjakan Harga Pangan

Kementan menjamin pasokan daging tersedia untuk menjelang Ramadhan.

» SYARIAH HLM 6

6 Mendiang FPI Tersangka, Kasus Disetop

■ ALI MANSUR, RONGGO ASTUNGKORO

JAKARTA — Mabes Polri mengumumkan penetapan tersangka terhadap sejumlah laskar Front Pembela Islam (FPI) yang ditembak mati oknum kepolisian di Kilometer (Km) 50 Tol Jakarta-Cikampek, Karawang, Desember 2020. Langkah ini dikhawatirkan jadi jurus berkelit kepolisian dari pelaksanaan rekomendasi Komnas HAM terkait peristiwa tersebut.

Penetapan tersangka itu mula-mula disampaikan Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Andi Rian pada Selasa (2/3) dalam gelar perkara. Dia menyatakan, pihaknya telah menetapkan enam almarhum anggota laskar FPI sebagai tersangka dalam kasus bentrokan dengan pihak kepolisian.

M IBNU CHAZAR/ANTARA

● Penyidik Bareskrim Polri merekonstruksi penembakan enam anggota FPI di Karawang, Senin (14/12).

Bareskrim Polri kemudian melimpahkan berkas perkara tersebut kepada Kejaksaan RI. Nantinya, Andi Rian menyebut, jaksa peneliti ikut menimbang perihal penghentian atau tidaknya kasus tersebut.

"Sudah ditetapkan tersangka. *Kan* itu juga tentu harus diuji. Makanya kami ada kirim ke jaksa *biar* jaksa teliti," kata Andi Rian, saat dikonfirmasi awak media, Rabu (3/3) kemarin.

Aparat membuntuti rombongan pemimpin FPI Habib Rizieq Shihab (HRS) pada 6 Desember 2020 dari Sentul, Bogor. Pembuntutan disebut terkait penelusuran kasus terjadinya kerumunan yang melibatkan HRS.

Pembuntutan itu berujung saling senggol kendaraan kepolisian dengan kendaraan pengawal HRS di jalan tol. Dengan klaim adanya penyerangan terhadap petugas, kepolisian melepaskan tembakan yang menewaskan dua laskar dalam pengejaran.

Kepolisian kemudian meringkus empat lainnya di *rest area* Km 50 Tol Jakarta-Cikampek pada dini hari 7 Desember 2020. Keempatnya lalu tewas ditembak saat hendak dibawa ke kantor polisi.

Bersambung Ke hlm 9 Kol 1-3

Vaksinasi per Kamis (4/3)

Dosis 1	2.286.123
Dosis 2	1.100.228
Kamis (4/3)	204.975

Kamis (4/3) [kasus]

Positif	7.264
Sembuh	6.440
Meninggal	176

JUMLAH NASIONAL

Per Kamis (4/3)

Positif	1.361.098
Sembuh	1.176.356
Meninggal	36.897

SEBARAN POSITIF COVID-19 (KASUS)

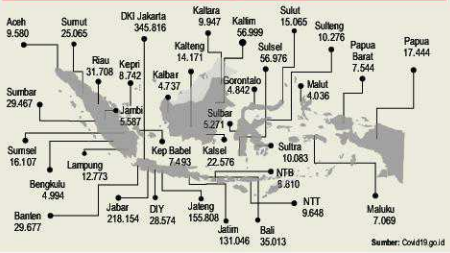

Sumber: Covid19.go.id

WIHDAN HIDAYAT/REPUBLIKA

VAKSINASI PEDAGANG

Pedagang mengikuti vaksinasi Covid-19 massal di Pasar Beringharjo, Yogyakarta, Kamis (4/3). Program vaksinasi tahap kedua di Yogyakarta masih belum memenuhi target dengan persentase keikutsertaan vaksinasi masih sekitar 71 persen dari sasaran.

Masyarakat Diimbau tak Perlu Khawatir

Ketersediaan vaksin saat ini masih kurang banyak untuk mencapai target *herd immunity*.

■ DESSY SUCIATI SAPUTRI, DADANG KURNIA

JAKARTA — Pemerintah mengimbau masyarakat tidak terlalu khawatir dengan adanya varian baru virus korona bersandi B117 yang ditemukan di Indonesia. Pada prinsipnya, mutasi virus merupakan hal lumrah dan bisa terus bertambah seiring berjalannya waktu karena pandemi masih berlangsung dan penularan terjadi di seluruh dunia.

Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengatakan, munculnya varian baru Covid-19 merupakan hal yang lazim ditemui, utamanya di masa pandemi saat ini. Mutasi adalah proses terjadinya kesalahan saat virus memperbanyak diri sehingga bentuk virus anakan tidak sama dengan virus aslinya atau *parental strain*.

"Maka dari itu, saya minta agar masyarakat jangan khawatir berlebihan," kata Wiku dalam konferensi pers virtual, Kamis (4/3). Kendati demikian, Satgas meminta masyarakat agar tetap patuh terhadap protokol kesehatan sebagai langkah pencegahan penularan Covid-19.

Virus bermutasi untuk beradaptasi dengan lingkungan. Ia mengatakan, para peneliti di berbagai dunia pun terus melakukan penelitian lebih lanjut mengenai mutasi virus yang muncul. Sehingga, bisa diketahui implikasi yang ditimbulkan dari varian baru Covid-19 serta menemukan solusinya.

Wiku mengatakan, sejauh ini, vaksin Covid-19 masih efektif melawan mutasi atau varian baru Covid-19 asal Inggris bersandi B117 tersebut. "Pemerintah memastikan vaksin Covid-19 yang saat ini digunakan di Indonesia masih efektif dalam melawan mutasi Covid-19 asal Inggris, yaitu B117," kata Wiku.

Adanya virus varian baru yang diketahui ada di Karawang, Jawa Barat, ini membuat sejumlah kepala daerah melakukan berbagai langkah antisipasi. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa meminta masyarakat meningkatkan kewaspadaan. Namun, ia juga meminta masyarakat tidak khawatir dan tetap tenang.

"Masyarakat tidak perlu khawatir. Virus ini tetap bisa dideteksi dengan alat PCR yang saat ini sudah ada, juga tidak mengurangi efektivitas vaksin. Yang sudah terjadwal untuk vaksin bisa dilanjutkan proses vaksinnya," kata Khofifah.

Percepat vaksinasi

Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menyatakan, akan menggandeng TNI dan Polri untuk percepatan vaksinasi Covid-19. Menurut dia, TNI dan Polri punya banyak tenaga kesehatan yang dapat diberdayakan untuk melakukan penyuntikan vaksin. Menurut dia, saat ini yang diperlukan adalah lokasi pelaksanaan vaksinasi. "TNI kita ajak semua supaya bisa menyuntik karena yang dibutuhkan saat ini orang yang bisa menyuntik vaksin," ujar dia.

Budi sebelumnya menyatakan, tantangan utama dalam upaya vaksinasi adalah jumlah vaksin yang terbatas karena menjadi rebutan di seluruh dunia. Target enam bulan pertama, kata Menkes, hanya ada 90 juta dosis vaksin untuk 45 juta rakyat Indonesia. Selanjutnya, pada enam bulan berikutnya, sekitar 140 juta orang harus divaksin.

Namun, saat ini, vaksin yang sudah ada di Indonesia baru 38 juta dosis. Semuanya vaksin Sinovac. Jumlah itu datang di awal sebanyak tiga juta dosis yang diperuntukkan bagi kurang lebih 1,5 juta orang tenaga kesehatan. Sementara, 35 juta dosis lainnya adalah *bulk* atau bahan bakunya saja yang kemudian diolah oleh Bio Farma.

Jika target semester pertama tahun ini sebanyak 45 juta orang akan divaksin, artinya butuh 90 juta dosis vaksin. Sampai saat ini, belum ada kepastian tentang 52 juta dosis kekurangan vaksin ini akan dipenuhi untuk mencakup target vaksinasi di semester pertama. Pemerintah beberapa kali menyatakan bahwa ada total 140 juta dosis dari Sinovac dalam bentuk *bulk*. Namun, kedatangan semua dosis itu belum bisa dipastikan.

> **Virus (mutasi) ini tetap bisa dideteksi PCR, juga tidak mengurangi efektivitas vaksin.**

Di sisi lain, kedatangan vaksin Astrazeneca dan Novavac masing-masing 50 juta dosis dalam komitmen yang telah ditandatangani juga belum ada kepastian. Juru bicara vaksinasi Kemenkes Siti Nadia Tarmizi, beberapa hari lalu, menyebut, Astrazeneca kemungkinan datang pada Juni.

Di sisi lain, vaksin Pfizer yang ditargetkan dapat 50 juta dosis juga kini masih dalam proses lobi. Diketahui, pemerintah menetapkan empat merek vaksin, yakni Sinovac, Astrazeneca, Novavac, dan Pfizer untuk program vaksinasi gratis. Sementara, vaksinasi mandiri atau gotong royong harus selain empat vaksin itu. Artinya, kondisi ketersediaan vaksin di Indonesia saat ini memang masih kurang banyak untuk memenuhi target *herd immunity* yang harus memvaksin kurang lebih 180 juta penduduk. ■ ed: mas alamil huda

KILAS

Lansia Bisa Divaksin di Faskes Dekat Rumah

JAKARTA — Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menyiapkan surat edaran (SE) yang mempermudah akses vaksinasi bagi warga lanjut usia (lansia). Melalui aturan baru nanti, lansia bisa divaksinasi di fasilitas kesehatan (faskes) dekat tempat tinggalnya.

Hal ini berbeda dengan aturan Kemenkes sebelumnya yang memprioritaskan vaksinasi lansia di ibu kota provinsi dan ibu kota negara. Hal ini praktis menimbulkan antrean lansia di sejumlah faskes yang melayani vaksinasi. Merespons hal ini, maka mekanismenya dipermudah.

SETPRES

● Wiku Adisasmito

"Sehingga lansia dapat memperoleh vaksin Covid-19 di lokasi terdekat dari tempat tinggal mereka. Dengan demikian, lansia tidak harus mengantre dan bepergian jauh sampai ke faskes di ibu kota provinsi untuk peroleh vaksin," kata Juru Bicara Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito di Jakarta, Kamis (4/3).

Selain itu, lanjut Wiku, warga lansia yang ber-KTP DKI Jakarta dapat mengakses suntikan vaksin Covid-19 secara *drive thru* di lapangan parkir Hall C Jiexpo Kemayoran, Jakarta Pusat. Layanan vaksinasi *drive thru* ini sudah dimulai Rabu (3/3) dan berlanjut sampai akhir tahun 2021.

Pemerintah berharap, makin banyak layanan vaksinasi *drive thru* dapat mengurangi antrean warga lansia di faskes.

■ sapto andika candra ed: mas alamil huda

Menristek: Pemilik Pabrik Mengantre Beli Genose

JAKARTA — Menteri Riset dan Teknologi (Menristek) Bambang Brodjonegoro menyebut, para pemilik pabrik di Indonesia mengantre untuk membeli alat deteksi cepat Covid-19 karya Universitas Gadjah Mada (UGM), Genose. Alat tes tersebut dirasa bisa memberi kepastian bahwa karyawan yang bekerja benar-benar tidak terpapar Covid-19.

"Banyak yang menghubungi saya, bahkan dari level-level pabrik yang membutuhkan Genose untuk memastikan karyawannya bisa bekerja dengan tenang," kata dia dalam diskusi virtual di Jakarta, Kamis (4/3).

ANTARA

● Bambang Brodjonegoro

Menurut Bambang, hal ini harus disikapi serius. Sebab, pemenuhan Genose untuk kebutuhan pabrik ini berkaitan dengan bagian dari upaya pemulihan ekonomi. Dia meminta alat tersebut bisa segera diproduksi secara massal untuk memenuhi kebutuhan industri di Tanah Air.

"Kami sangat mengapresiasi UGM yang tidak berhenti melakukan riset dan inovasi terkait Covid-19. Selain produksi massal Genose, ICU ventilatornya juga kami nantikan karena jika berhasil direalisasikan maka merupakan capaian maju dan juga luar biasa," ujar dia.

Rektor UGM Panut Mulyono mengaku, saat ini masih mendiskusikan perihal pendanaan produk kepada Majelis Wali Amanat (MWA) untuk program percepatan produksi massal Genose maupun ventilator ICU. ■ antara ed: mas alamil huda

'Jangan Unggah Sertifikat Vaksinasi'

JAKARTA — Setiap orang akan diberikan sertifikat vaksinasi setelah menerima dosis pertama atau telah lengkap dua dosis vaksin Covid-19. Masyarakat diingatkan untuk tidak mengunggah sertifikat tersebut di media sosial atau membagikannya secara sembarangan karena memuat data pribadi.

"Terkait privasi data, masyarakat agar tidak sembarangan membagikan sertifikat vaksin Covid-19 atau tiket vaksinasi yang mengandung kode QR ke media sosial," kata Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny G Plate, dalam pesan singkatnya, dikutip Kamis (4/3).

Setelah tenaga kerja, kini giliran pekerja di pelayanan sektor publik yang sehari-hari berinteraksi dengan masyarakat dan warga lanjut usia yang mendapat suntikan vaksin Covid-19. Prosedurnya pun sama, masyarakat bisa melihat jadwal vaksinasi melalui situs atau aplikasi PeduliLindungi.

Warga yang sudah mendapatkan jadwal vaksinasi akan diberikan tiket secara elektronik yang mengandung kode QR serta waktu dan tempat vaksinasi. Setiap orang yang sudah divaksin Covid-19 akan mendapatkan sertifikat tanda bahwa dia sudah disuntikkan vaksin pada tanggal tertentu.

Sertifikat diberikan dua kali, ketika vaksinasi pertama dan kedua. Sertifikat ini akan diberikan dalam bentuk fisik, di tempat vaksinasi, ataupun digital melalui aplikasi PeduliLindungi.

Vaksin Covid-19 yang sudah dinanti setahun belakangan sejak pandemi memberikan harapan baru agar pandemi bisa diatasi. Vaksin tidak menjamin 100 persen seseorang bebas dari kemungkinan paparan virus korona, tetapi jika terinfeksi, gejala yang timbul diharapkan tidak berat.

Sukacita sudah mengikuti program vaksinasi nasional sering ditemui di media sosial maupun aplikasi pesan instan. Masyarakat selama beberapa pekan ini tentu tidak asing melihat unggahan foto maupun video disertai tulisan 'saya sudah divaksin hari ini'. Jika tidak sempat berfoto di lokasi vaksin, beberapa mengunggah sertifikat vaksin Covid-19 dengan harapan memberi inspirasi bagi teman-temannya untuk mengikuti vaksinasi ini.

Mereka yang paham akan mengaburkan atau memberi stiker pada sejumlah data pribadi di sertifikat vaksin Covid-19. Namun, mereka yang tidak paham dan mengunggah sertifikatnya begitu saja berpotensi menjadi korban akibat terpaparnya data pribadi mereka di dunia maya.

Pasal 58 dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan, setidaknya ada 26 hal yang termasuk data perseorangan. Dalam hal sertifikat vaksin Covid-19, ada tiga hal yang termasuk data pribadi, yakni nama lengkap, nomor induk kependudukan (NIK), dan tanggal lahir.

Sekilas terlihat data-data tersebut berdiri sendiri. Namun, sebenarnya ketika dirangkai data tersebut bisa digunakan untuk mengidentifikasi individu.

Misalnya, dengan menggabungkan nama lengkap, NIK, dan tanggal lahir, seseorang yang memiliki keahlian dalam melacak data bisa mendapatkan nomor ponsel orang yang dimaksud. Salah satu yang krusial adalah nomor induk kependudukan atau NIK.

■ antara ed: mas alamil huda

FAKTA VAKSIN

Turki merevisi efikasi atau kemanjuran vaksin Covid-19 Sinovac. Para peneliti Turki yang melakukan uji klinis fase ketiga terhadap vaksin tersebut mengungkapkan, efikasi vaksin yang dikembangkan Sinovac Biotech itu memiliki kemanjuran 83,5 persen atau turun dari temuan awal sebesar 91,25 persen.

Tingkat kemanjuran akhir didasarkan pada 41 infeksi. Sebanyak 32 di antaranya telah menerima plasebo. Angka ini didasarkan pada peserta yang menunjukkan setidaknya satu gejala Covid-19 bersama dengan tes PCR positif setidaknya 14 hari setelah dosis kedua vaksin.

Namun, vaksin tetap mencegah rawat inap dan penyakit parah dalam 100 persen kasus. Di antara enam orang yang dirawat di rumah sakit, semuanya berada dalam kelompok plasebo.

Terkait efek samping vaksin, gejala seperti kelelahan, sakit kepala, demam, menggigil, dan diare terlihat. Rasa sakit di area suntikan plasebo sedikit lebih banyak pada mereka yang menerima vaksin yang sebenarnya. Dengan data dan fakta yang muncul selama uji klinis ini, peneliti menyatakan, vaksin Sinovac aman.

Turki sebelumnya menetapkan kemanjuran vaksin Sinovac sebesar 91,25 persen. Hasil itu diperoleh setelah vaksin diuji coba ke 10.216 peserta. Sebanyak 6.648 di antaranya menerima vaksin sebagai bagian dari studi fase ketiga yang dimulai pertengahan September tahun lalu.

Sebesar 58 persen peserta adalah laki-laki berusia antara 18-59 tahun. Dua dosis diberikan dengan selang waktu 14 hari. Segera setelah rilis hasil awal, vaksin Sinovac menerima persetujuan darurat dari otoritas Turki.

Turki sudah mulai melakukan vaksinasi besar-besaran mulai 14 Januari lalu. Lebih dari 9,4 juta dosis vaksin Sinovac telah diberikan kepada publik, sebagian besar pekerja perawatan kesehatan dan orang tua. Hingga saat ini, lebih dari 7,1 juta warga Turki telah menerima dosis pertama vaksin. Sementara, hampir dua juta orang sudah mendapatkan kedua dosis tersebut. ■ pusat data republika

Djoko Dituntut 4 Tahun

THOUDY BADAI/REPUBLIKA

TUNTUTAN Djoko Tjandra bersiap menjalani sidang tuntutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (4/3).

Majelis hakim diharapkan memvonis Djoko Tjandra lebih berat dari tuntutan jaksa.

■ DIAN FATH RISALAH

JAKARTA — Terpidana kasus *cessie* Bank Bali, Djoko Sugiarto Tjandra, kembali dituntut empat tahun penjara dalam kasus suap dan permufakatan jahat. Sebelumnya, dia sudah divonis 2,5 tahun dalam kasus surat jalan palsu.

Dalam tuntutan kali ini, Djoko dinilai terbukti menyuap aparat penegak hukum di Kejaksaan Agung dan Polri serta melakukan permufakatan jahat pembebasan dirinya dari jerat hukum. Selain pidana, dia juga dituntut membayar denda Rp 100 juta.

"Menuntut supaya majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi untuk menyatakan terdakwa Djoko Tjandra bersalah melakukan tindak pidana korupsi, menghukum terdakwa dengan pidana selama empat tahun dengan perintah tetap ditahan di rumah tahanan," kata jaksa penuntut umum (JPU) Junaedi di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (4/3).

Dalam dakwaan pertama, Djoko Tjandra dinilai terbukti menyuap jaksa Pinangki Sirna Malasari sebesar 500 ribu dolar AS untuk mengurus fatwa dari Mahkamah Agung (MA) dari Kejaksaan Agung. Permintaan fatwa MA itu bertujuan agar Djoko Tjandra dapat kembali ke Indonesia tanpa harus dieksekusi pidana dua tahun berdasarkan putusan hakim pada Juni 2009.

Pinangki kemudian menyusun *action plan* berisi 10 tahap pelaksanaan untuk meminta fatwa MA atas putusan PK dengan mencantumkan inisial "BR" sebagai pejabat di Kejaksaan Agung dan "HA" selaku pejabat di MA. Djoko Tjandra bersedia memberikan uang muka sebesar 500 ribu dolar AS dari total 1 juta dolar AS.

Jumlah tersebut termasuk biaya legal *fee* untuk Anita Kolopaking sebesar 200 ribu dolar AS. Sedangkan, sisanya digunakan Andi Irfan Jaya untuk *consultant fee*. Kedua nama itu juga telah divonis penjara dalam skandal Djoko Tjandra tersebut.

Djoko Tjandra juga dinilai terbukti memberikan uang kepada mantan kepala Divisi Hubungan Internasional Polri Inspektur Jenderal Napoleon Bonaparte sejumlah 200 ribu dolar Singapura dan 370 dolar AS. Kemudian, kepada mantan kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan (Kakorwas) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bareskrim Polri Brigjen Prasetijo Utomo senilai 100 ribu dolar AS.

"Tujuan pemberian uang tersebut adalah agar Napoleon Bonaparte dan Prasetijo Utomo membantu proses penghapusan nama Djoko Tjandra dari daftar pencarian orang (DPO) yang dicatatkan pada sistem informasi keimigrasian (SIMKIM) Direktorat Jenderal Imigrasi," kata jaksa.

Dalam dakwaan kedua, Djoko Tjandra dinilai terbukti melakukan permufakatan jahat bersama Pinangki dan Andi Irfan untuk memberi atau menjanjikan uang sebesar 10 juta dolar AS kepada pejabat di Kejakgung dan MA. Pemberian itu agar kedua penegak hukum mengeluarkan fatwa menggagalkan eksekusi terpidana Djoko dalam kasus *cessie* Bank Bali 2009.

"Sehingga dapat disimpulkan Djoko Tjandra, Andi Irfan Jaya, dan Pinangki Sirna Malasari menyadari pejabat Kejakgung atau MA punya kewenangan terkait permintaan fatwa MA dan bersepakat untuk memberikan uang sebesar 10 juta dolar AS dalam proses pengurusannya," kata jaksa pula.

Tuntutan jaksa tersebut tidak sesuai dengan harapan Djoko. Sebelum sidang dimulai, dia mengungkapkan harapannya agar dituntut bebas. "Saya berharap dituntut bebas karena saya ini *kan* ditipu sama mereka, ditipu sama Pinangki, Andi Irfan Jaya. Jadi, seharusnya jaksa penuntut bebaskan saya," kata Djoko Tjandra.

Kuasa hukum Djoko Tjandra, Soesilo Ariwibowo, menilai tuntutan terhadap kliennya keliru. Menurut dia, penuntut umum hanya menyalin dakwaan milik Pinangki Sirna Malasari. "Ya, salah lihat tuntutan itu, JPU *copy paste* dengan dakwaan dan kasus Pinangki. Mereka keliru meletakkan posisi Djoko Tjandra sebagai pelaku utama. Dia sebenarnya *kan* korban, " kata Soesilo kepada *Republika*, Kamis (4/3).

Soesilo menegaskan, pihaknya akan menolak semua argumentasi penuntut umum di dalam nota pembelaan yang akan disampaikan pekan depan. "Prinsipnya akan menolak semua argumentasi jaksa penuntut umum," ujarnya menegaskan.

Tuntutan ringan lagi

Peneliti dari Pusat Kajian Antikorupsi Universitas Gadjah Mada (Pukat UGM) Zaenur Rohman menilai tuntutan terhadap Djoko Tjandra menunjukkan kurang seriusnya Kejaksaan Agung dalam menangani perkara tersebut. Padahal, perkara ini sangat merusak wibawa dan kepercayaan publik terhadap penegakan hukum serta sistem hukum yang terbukti karut-marut.

"Menurut saya, seharusnya kejaksaan menuntut maksimal sesuai yang diatur dalam Pasal 5 Ayat 1 UU Tipikor, yakni hukuman maksimal lima tahun penjara karena daya rusak perbuatan pelaku ini sangat besar terhadap institusi hukum juga terhadap sistem hukum," kata Zaenur kepada Republika, Kamis (4/3).

Zaenur pun berharap majelis hakim dapat memberikan vonis maksimal kepada Djoko Tjandra sesuai dengan aturan UU Tipikor. "Saya harap nanti hakim dapat menjatuhkan putusan secara maksimal. Misalnya, juga memutus jauh lebih tinggi pada tuntutan, " katanya.

Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni menilai putusan terhadap kasus jaksa Pinangki harusnya menjadi barometer bagi jaksa menuntut Djoko Tjandra. Pinangki sebelumnya dituntut empat tahun, tapi divonis 10 tahun. "Kejaksaan perlu berkaca pada kasusnya Pinangki, dituntut jaksa empat tahun, tapi diputus hakim jadi 10 tahun," kata Sahroni, kemarin.

■ antara ed: ilham tirta

VONIS VS TUNTUTAN

Kasus surat jalan palsu:
- Djoko Tjandra 2,5 tahun dari dua tahun
- Anita Kolopaking 2,5 tahun dari dua tahun
- Prasetijo Utomo tiga tahun dari dua tahun

Kasus suap Pinangki:
- Pinangki Sirna Malasari 10 tahun dari empat tahun
- Andi Irfan Jaya enam tahun dari 2,5 tahun
- Djoko Tjandra dituntut empat tahun (belum vonis)

Kasus *red notice*:
- Tommy Sumardi dua tahun dari 1,5 tahun
- Prasetijo Utomo tiga tahun dari 2,5 tahun
- Napoleon Bonaparte dituntut tiga tahun (belum vonis)

KILAS

Imigrasi Cekal Pegawai Ditjen Pajak Terkait Korupsi

JAKARTA — Direktorat Jenderal Imigrasi melakukan pencegahan untuk bepergian ke luar negeri terhadap dua orang aparatur sipil negara (ASN) Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu). Mereka dicekal karena diduga terlibat tindak pidana korupsi.

"Pencegahan ini berlaku selama enam bulan mulai 8 Februari 2021 sampai dengan 5 Agustus 2021," kata Kepala bagian Humas dan Umum Imigrasi Arya Pradhana Anggakara dalam keterangan, Kamis (4/3).

Arya mengungkapkan, dua orang ASN tersebut berinisial APA dan DR. Selain itu, Imigrasi juga mencekal empat orang lainnya, yakni RAR, AIM, VL, dan AS.

Arya mengatakan, pencegahan bepergian ke luar negeri dilakukan atas permintaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pencegahan ini tertuang dalam surat yang ditandatangani oleh Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian, Pria Wibawa, pada 8 Februari 2021.

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata membenarkan pihaknya sedang melakukan penyidikan kasus dugaan suap pajak di Ditjen Pajak Kemenkeu. Namun, dia mengatakan, KPK belum mau mengumumkan tersangka. "Kami sedang penyidikan betul, tetapi tersangkanya nanti dalam penyidikan itu *kan* mencari alat bukti untuk menetapkan tersangka. Ini yang sedang kami lakukan," kata Alexander, kemarin.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada Rabu (3/3) menjelaskan, dugaan suap yang melibatkan pegawai Ditjen Pajak Kemenkeu terjadi pada awal 2020. Aksi korupsi ini kemudian ditindaklanjuti Unit Kepatuhan Internal Kementerian Keuangan dan KPK. ■ rizkyan adiyudha ed: ilham tirta

KPK Sita Rp 1,4 Miliar Terkait Suap Nurdin

JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan uang sekitar Rp 1,4 miliar, 10 ribu dolar AS, dan 190 ribu dolar Singapura terkait kasus dugaan suap dan gratifikasi yang menjerat Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Nurdin Abdullah. Uang miliaran rupiah itu ditemukan dalam penggeledahan KPK di empat lokasi berbeda.

"Setelah dilakukan perhitungan, dari penggeledahan dimaksud ditemukan uang rupiah sekitar Rp 1,4 miliar," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri, Kamis (4/3).

Ali mengatakan, uang tersebut kemudian akan diverifikasi dan dianalisis mengenai keterkaitannya dengan perkara suap Nurdin. Penyidik KPK menggeledah rumah dinas jabatan gubernur Sulsel dan rumah dinas jabatan sekretaris Dinas PUPR Sulsel pada Senin (1/3) lalu. Dalam kesempatan itu, KPK mengamankan dokumen yang terkait dengan perkara dan sejumlah uang tunai.

KPK kembali melakukan penggeledahan di kediaman pribadi Nurdin Abdullah dan Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUPR) Provinsi Sulsel satu hari berselang. Penyidik juga menemukan berbagai dokumen dan sejumlah uang tunai.

Nurdin Abdullah ditetapkan sebagai tersangka suap terkait pengerjaan sejumlah proyek di wilayah pimpinannya. Ia diduga menerima suap sebesar Rp 2 miliar dari tersangka Agung Sucipto melalui Sekretaris Dinas PUPR Edy Rahmat. Tak hanya suap, Nurdin juga diduga menerima gratifikasi Rp 3,4 miliar. ■ rizkyan adiyudha ed: ilham tirta

'Perubahan Jadwal Pilkada Bisa Lewat Perppu'

■ MIMI KARTIKA

JAKARTA — Anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Guspardi Gaus, menyarankan agar jadwal Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 direvisi melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu). Hal itu mengingat Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang keberatan atas jadwal Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pilkada 2024 yang berimpitan.

"Kalau seandainya itu sesuatu yang krusial *kan* bisa lewat perppu hanya tentang masalah jadwal. Misalnya, jadwalnya digeser menjadi bulan Desember atau bulan Maret atau di bulan April 2025, itu *enggak* perlu pembahasan undang-undang," ujar Guspardi saat dihubungi *Republika*, Kamis (4/3).

Guspardi memastikan, pelaksanaan pemilu maupun pilkada pada 2024 masih menggunakan Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 dan UU Nomor 10 Tahun 2016. Dalam UU yang sedianya akan direvisi tersebut, pemungutan suara pilkada dijadwalkan pada November 2024. Selama belum ada revisi UU pemilu, kata dia, KPU tetap berpedoman pada UU tersebut.

Menurut dia, perubahan jadwal melalui perppu itu seperti halnya penundaan waktu pencoblosan Pilkada 2020 dari September menjadi Desember akibat pandemi Covid-19. Dengan demikian, tak perlu ada pembahasan revisi Undang-Undang Pemilu dan Pilkada.

Guspardi menilai, waktu pelaksanaan pemungutan suara menjadi cukup krusial karena KPU perlu mengantisipasi putaran kedua pada pilpres nanti. Hal itu akan menambah beban KPU yang juga harus melaksanakan tahapan pilkada serentak. "Bagaimana antisipasinya, biar sajalah lewat perppu dalam menyelesaikan itu, hanya sekadar melakukan penundaan terhadap pelaksanaan pilkada," kata dia.

Komisi II DPR juga akan mengundang KPU untuk membicarakan persoalan ini setelah ada keputusan tidak masuknya RUU Pemilu dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2021.

Dalam UU Pemilu, penetapan pasangan calon terpilih paling lambat 14 hari sebelum berakhirnya masa jabatan presiden dan wakil presiden. Sedangkan, masa jabatan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin akan berakhir pada 20 Oktober 2024. Dengan demikian, pasangan calon terpilih harus sudah tersedia pada 6 Oktober 2024.

Anggota KPU, Viryan Azis, pada Selasa (2/3), mengusulkan, tahapan Pemilu 2024 dimulai sejak 30 bulan sebelum pemungutan suara, yaitu sekitar November 2021. Biasanya tahapan pemilu dimulai 20 bulan sebelum pencoblosan.

"Opsi ini menjadi penting mengingat 2024 dilakukan pemilu serentak lima kotak (pilpres, pileg DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/-kota) awal tahun dan dua kotak (pemilihan gubernur dan pemilihan bupati/-wali kota) akhir tahun," kata Viryan, Selasa (2/3).

Sementara, Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia Tandjung memberikan sinyal terkait tidak jadi direvisinya UU Pemilu maupun UU Pilkada. "Kalau tidak tahun ini mudah-mudahan bisa tahun depan. Kalau tidak tahun depan mungkin bisa tiga tahun, dua tahun yang akan datang," ujar Doli dalam seminar daring Quo Vadis RUU Pemilu, Kamis (4/3).

Sebelum mengatakan itu, dia menyebutkan terkait banyak hal teknis yang perlu dipersiapkan menjelang pelaksanaan pemilu dan pilkada 2024. "Di mana semua agenda pemilu lima tahunan itu ditumpuk di dalam satu tahun pada 2024," kata dia. ■ ed: ilham tirta

NOVA WAHYUDI/ANTARA

VAKSINASI Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo (kanan) didampingi Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto (kiri), menjawab pertanyaan wartawan usai meninjau vaksinasi Covid-19 secara nasional bagi personel TNI dan Polri di Palembang, Sumatera Selatan, Kamis (4/3). Vaksinasi diberikan kepada 2.000 orang personel TNI dan 1.000 anggota Polri di lingkungan Kodam II/Sriwijaya dan Polda Sumsel.

Gobel Apresiasi Presiden Cabut Investasi Miras

JAKARTA — Wakil Ketua DPR Rachmat Gobel mengapresiasi Presiden Joko Widodo yang responsif terhadap masukan dari masyarakat yang menolak ketentuan soal investasi dan distribusi minuman keras. Seperti diketahui, Presiden Jokowi menyatakan akan mencabut lampiran ketentuan dalam Perpres No 10 Tahun 2021 yang menyangkut investasi dan perdagangan miras.

"Itu bukti Presiden sangat mendengar kritik dan pendapat masyarakat," kata wakil ketua DPR yang membidangi industri dan pembangunan tersebut, Kamis (4/3).

Rahmat Gobel waktu jadi Menteri Perdagangan diketahui sukses menjegal miras keluar dari toko ritel kecil di seluruh Indonesia. Lewat Peraturan menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 06/M-DAG/PER/1/2015 , semua minuman beralkohol golongan A dilarang dijual di minimarket. Namun setelah itu, ia di-*reshuffle*.

Perpres 10/2021 berisi tentang ketentuan investasi, yang merupakan penjabaran lebih lanjut Undang-Undang Cipta Kerja. Presiden Jokowi pada Selasa (2/3) mengatakan, pencabutan ketentuan soal minuman keras karena mendapat reaksi penolakan keras dari berbagai pihak. "Saya putuskan, lampiran perpres terkait pembukaan investasi baru dalam industri minuman keras yang mengandung alkohol saya nyatakan dicabut," ujar Jokowi.

Rachmat Gobel mengingatkan agar para pembantu Presiden lebih bertanggung jawab sehingga tidak membuat kesulitan Presiden. "Para pembantu Presiden harus paham hakikat berbangsa dan bernegara serta dalam menjalankan roda pemerintahan," kata Gobel.

Terjadinya penolakan terhadap ketentuan soal miras ini, Gobel menyebut, menunjukkan ada sejumlah hal yang harus dievaluasi. Pertama, pejabat yang bertanggung jawab terhadap bidang ini tak memiliki desain dan konsep tentang investasi, perdagangan, dan industri secara benar.

"Ada kesan panik sehingga tanpa berpikir panjang dan mendalam," katanya.

Kedua, menurut Gobel, pejabat yang bertanggung jawab soal ini tak memahami dan menjiwai nilai-nilai moral bangsa secara utuh. "Jangan hanya mengejar target investasi, tapi harus membaca nilai-nilai dan budaya masyarakat. Ingat pesan Bung Karno, kita harus memahami dan menyelami jiwa bangsa," katanya.

Ketiga, kata Gobel, pejabat yang menyusun ketentuan ini harus berjiwa kesatria dan bertanggung jawab. "Jangan terus bersembunyi di belakang Presiden," katanya.

Seiring keputusan Jokowi, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) memastikan telah menutup sistem perizinan investasi terkait miras. Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal BKPM Yuliot mengatakan, dengan dicabutnya peraturan tersebut, setiap pengajuan perizinan tidak akan bisa diproses.

■ febrianto adi saputro ed: ilham tirta

ALBERTO ESTEVEZ/EPA

LOLOS KE FINAL *Defender* Barcelona Gerard Pique (tengah) melakukan perayaan setelah mencetak gol kedua ke gawang Sevilla pada laga semifinal Copa Del Rey di Stadion Camp Nou. Dalam laga tersebut Barca menang 3-0 dan berhak melaju ke final setelah mengantungi kemenangan agregat 3-2.

Drama 30 Detik *Remontada* Barca

Momen *remontada* Barcelona sukses menyingkirkan Sevilla dari semifinal Copa Del Rey.

■ REJA IRFA WIDODO

BARCELONA — *Remontada* menjadi istilah populer di pentas sepak bola Eropa, setidaknya dalam empat tahun terakhir. *Remontada* secara harfiah dapat berarti "pemulihan" atau "kembali". Dalam konteks olahraga, *remontada* dapat diartikan keberhasilan sebuah tim membalikkan keadaan atau mengembalikan defisit, baik dari segi poin ataupun agregat gol.

Momen *remontada* itulah yang dilakoni Barcelona saat menyingkirkan Sevilla dari semifinal Copa Del Rey, Kamis (4/3). Sempat defisit dua gol dari pertemuan pertama, pasukan El Katalan akhirnya mampu membalasnya dengan kemenangan 3-0 pada laga kedua di Stadion Camp Nou.

Media asal Barcelona, *Mundo Deportivo*, menggambarkan perjuangan tim besutan Ronald Koeman di *leg* kedua semifinal Copa del Rey itu dengan menuliskan satu kata di halaman mukanya pada edisi Kamis waktu setempat, yaitu "Epik".

Cerita kepahlawanan dan drama menjadi salah satu bumbu utama dari *remontada*. Upaya tim yang tengah berada di posisi tertinggal hingga akhirnya bisa membalikkan keadaan selalu menyuguhkan kisah-kisah haru, heroik, dan dramatis.

Membuka keunggulan pada menit ke-12 lewat sepakan terarah kaki kanan Ousmane Dembele di tepi kotak penalti Sevilla, Barcelona masih membutuhkan dua gol tambahan untuk bisa lolos ke babak final Copa del Rey. Petaka nyaris menimpa Barcelona pada menit ke-73. Wasit memberikan tim tamu hadiah tendangan penalti setelah Oscar Mingueza menjatuhkan Lucas Ocampos.

Namun, Marc Andre Ter-Stegen tampil sebagai pahlawan Barcelona pada momen itu. Kiper asal Jerman itu dengan sempurna menangkap bola tendangan penalti Sevilla yang dieksekusi sendiri oleh Ocampos.

Lolos dari lubang jarum, Barcelona kian percaya diri. Namun, Barcelona baru benar-benar bisa mencintakan momen kebangkitan berselang 20 menit pascakegagalan Sevilla itu.

Momen kunci kebangkitan Barcelona tercipta saat laga tinggal tersisa 30 detik lagi, atau tepatnya pada *injury time* babak kedua. Tiga puluh detik menjadi batas antara kegagalan dan keberhasilan Barca tampil di partai puncak Copa de Rey. Sundulan Gerard Pique, setelah memanfaatkan umpan lambung Antoine Griezmann, menjadi pengubah skor agregat menjadi 2-2.

Alhasil, laga harus dilanjutkan ke babak tambahan waktu. Keberhasilan menyamakan agregat pada menit akhir babak kedua membuat Barcelona makin percaya diri menatap babak tambahan waktu, sekaligus menyelesaikan misi *remontada* di laga ini.

Babak tambahan baru berjalan satu menit, Barcelona kembali merobek gawang tim tamu dengan skema yang tidak jauh berbeda dengan gol kedua. Kali ini, umpan dari Jordi Alba dituntaskan sempurna oleh Martin Braithwaite. Tanpa menyertakan masa jeda menuju babak tambahan waktu, Barcelona bisa dibilang membalikkan keadaan hanya dalam hitungan kurang dari dua menit.

Sevilla sempat melakukan protes dan meminta penalti saat Clement Lenglet dinilai melakukan *handball* di kotak penalti pada menit ke-100. Wasit bergeming dan melanjutkan laga tanpa memberikan sanksi bagi Barcelona. Keputusan wasit itu diperkuat dengan hasil *review* VAR. Skor 3-0 dari laga tersebut sekaligus mengubah skor agregat menjadi 3-2 menjadi modal bagi Barcelona untuk menuju ke final.

"Kami tidak pernah ragu dan kehilangan keyakinan soal peluang lolos ke partai final. Ini adalah soal kekuatan mental. Ini menjadi malam terbaik saya sebagai pelatih Barcelona," kata pelatih Barcelona Ronald Koeman seusai laga, seperti dilansir *Mundo Deportivo*.

Pelatih Sevilla Julien Lopetegui tidak mau menambah polemik dengan mengkritik keputusan wasit di laga itu, termasuk soal kartu kuning kedua yang harusnya diterima Mingueza dan dugaan *handball* Lenglet. "Silakan menilai sendiri insiden itu. Anda punya hak menilai, seperti halnya saya. Saya tidak bisa berkomentar lebih banyak karena, Anda tahu, mereka bisa menjatuhkan sanksi kepada kami," kata Lopetegui seusai laga, seperti dilansir *Mundo Deportivo*.

Kegagalan ini diakui Lopetegui terasa menyakitkan. "Malam ini, kami menjadi korban dalam kekejaman itu. Ini adalah malam yang begitu buruk dan kejam," katanya. ■ ed: m akbar

Gary Neville Kritik Penampilan Setan Merah

■ RAHMAT FAJAR

LONDON — Manchester United (MU) semakin sulit mengejar puncak klasemen Manchester City seusai meraih hasil imbang tanpa gol melawan Crystal Palace dalam pertandingan Liga Inggris di Stadion Selhurst Park, London, Kamis (4/3) dini hari WIB.

Raihan hasil imbang itu pun langsung dikritik keras oleh legenda MU, Gary Neville. Mantan pemain bertahan Setan Merah itu menyebut aksi para pemain di lapangan layaknya orang yang tidur sambil berjalan.

"Mereka itu seperti tidur sambil berjalan dalam pertandingan. Mereka akan berakhir di balapan empat besar jika mereka tidak berhati-hati," kata Neville menilai hasil imbang yang didapatkan di kandang Palace.

Dengan hasil imbang tersebut, MU tertinggal 14 poin dari rival sekotanya, City. Sehari sebelumnya, City menang 4-1 atas Wolverhampton Wanderers.

Namun, MU masih sedikit beruntung karena posisinya di urutan kedua tak lepas dari genggaman. Penyebabnya, tim urutan ketiga, Leicester City, juga meraih hasil seri 1-1 di kandang Burnley.

Andai Leicester menang, MU sudah pasti tergusur ke urutan ketiga dengan selisih dua poin. Kendati demikian, hasil imbang tersebut membuat posisi MU saat ini semakin tidak aman. Pasalnya, potensi melorot ke luar empat besar terbuka lebar.

Leicester merupakan rival yang paling potensial menggusur MU karena hanya berselisih satu poin. Kemudian, ada West Ham United di posisi keempat yang terpaut enam poin. Chelsea, Liverpool, dan Everton tak bisa dilupakan oleh MU. Mereka masih berpeluang besar masuk ke posisi empat besar.

Pelatih MU Ole Gunnar Solskjaer mengakui, performa timnya akhir-akhir ini mengkhawatirkan. Ini semakin menipiskan mereka merebut gelar Liga Inggris. Oleh karena itu, Solskjaer mengatakan, pasukannya perlu menemukan semangat baru setelah laga melawan Palace.

"Ketika Anda memiliki tiga *clean sheet* berturut-turut, itu akan membantu Anda memenangkan pertandingan—tetapi kami belum menghasilkan kualitas. Kami hanya harus menemukan percikan lagi, kualitas lagi, dan mencoba memenangkan pertandingan," kata Solskjaer seusai pertandingan dilansir dari *BBC*.

Solskjaer jelas tak senang jika timnya tak menciptakan peluang yang cukup untuk memenangkan pertandingan. Meski demikian, pelatih asal Norwegia itu tetap memuji sikap pemainnya yang memberikan segalanya.

Solskjaer mengeklaim, tempo permainan MU melawan Palace hilang dan itu bukan permainan terbaik Setan Merah. Menurut dia, Roy Hodgson selalu membuat tim yang sulit ditaklukkan. Setelah laga tersebut, Solskjaer akan mencoba mencari solusi untuk kembali ke jalur kemenangan.

Mantan bek MU Gary Neville turut berkomentar tentang performa MU seusai bermain imbang melawan Palace. Ia menyebut MU seperti "berjalan sambil tertidur". Itu artinya MU bermain tanpa arah yang jelas. Sekarang performa yang mereka tunjukkan telah memberikan dorongan bagi rival di empat besar untuk menggusur mereka.

"Apa yang ditunjukkan MU di kandang Palace bukanlah permainan yang bagus. Penampilan mereka sungguh membosankan," kata Neville.

■ ed: m akbar

Timnas Gagal Tanding, Pengamat: Memalukan!

■ AFRIZAL ROSIKHUL ILMI

JAKARTA — Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) menuai kritik setelah laga uji coba antara tim nasional U-22 Indonesia melawan Tira Persikabo gagal digelar. Laga tersebut dijadwalkan bergulir di Stadion Madya, Jakarta, Rabu (3/3) malam WIB. Namun, laga dipastikan batal beberapa saat sebelum *kick-off* karena PSSI belum mengantongi izin dari kepolisian.

Pengamat sepak bola nasional Akmal Marhali mengatakan, itu adalah hal yang sangat memalukan bagi federasi sepak bola Indonesia. Ia menyebut itu terjadi karena kebodohan dan kelalaian PSSI. Menurut dia, kejadian tersebut akan membuat kepercayaan publik kepada PSSI semakin berkurang.

"Kasus ini harus menjadi pelajaran bagi PSSI dan juga PT LIB agar tidak menganggap remeh perizinan meskipun secara umum pihak kepolisian sudah merestui sepak bola bisa kembali digelar," kata Akmal saat dihubungi, Kamis (4/3).

"Ini sangat memalukan. Akibat menganggap sepele, *trust* ke PSSI jadi semakin rendah, dan ini tidak boleh terulang lagi, apalagi dalam kondisi yang *extraordinary* seperti saat ini," tambahnya.

Timnas U-23 juga dijadwalkan untuk uji coba kedua melawan Bali United, Jumat (5/3), di tempat yang sama. Namun, dengan batalnya laga uji coba melawan Tira Persikabo, laga melawan Bali United juga menghadapi ketidakjelasan. Akmal mengatakan, PSSI seharusnya bisa bertindak lebih profesional.

"PSSI harus menjadi contoh (teladan) anggotanya. Komunikasi kepada pihak terkait harus dijalankan dengan baik. Jangan anggap sepele, semua aturan harus dijalankan dengan benar. Agar kasus batalnya laga timnas tak berulang, PSSI harus segera melakukan langkah-langkah perizinan mulai hari ini untuk Piala Menpora," katanya.

PSSI pun telah mengakui kelalaian mereka yang baru mengurus izin pada siang harinya. Permintaan maaf disampaikan oleh Pelaksana Tugas Sekretaris Jenderal PSSI Yunus Nusi. PSSI menyadari kesalahan mereka sehingga Mabes Polri belum mengizinkan pertandingan. "Mungkin karena izin kami terlalu mendadak sehingga Mabes Polri perlu melakukan kajian lebih mendalam sebelum mengeluarkan izin," kata Yunus. "Dengan ini, PSSI meminta maaf kepada Mabes Polri yang sudah direpotkan."

Hingga saat ini belum ada kepastian mengenai penjadwalan ulang laga uji coba tersebut. Yunus mengatakan kepada *Republika*, hal itu akan disampaikan langsung oleh Ketua Umum PSSI Mochamad Iriawan.

Namun, Direktur Teknik PSSI Indra Sjafri kedapatan mengunggah foto melalui status di *Instagram* pribadinya pada Kamis (4/3) siang dengan tulisan, "Alhamdulillah uji coba melawan Tira Persikabo tanggal 5 Maret dan Bali United 7 Maret."

Namun, tak lama kemudian unggahan itu sudah dihapus. "Belum. Tunggu saja," kata Indra ketika dikonfirmasi mengenai kepastian penjadwalan ulang laga uji coba timnas U-22. ■ ed: m akbar

BINTANG MUSLIM

Brahim Diaz, Talenta Muslim dari Rossoneri

■ OLEH **ANGGORO PRAMUDYA**

Muncul sebagai pemain muda yang memiliki segudang bakat mumpuni, nama Brahim Diaz sempat mengguncang jagat sepak bola Benua Biru pada era *kiwari*. Bahkan, transfer Diaz dari Manchester City ke klub raksasa Spanyol Real Madrid pada musim panas 2018/2019 lalu menunjukkan Los Merengues sedang membangun proyek jangka panjang.

Namun, ketatnya persaingan di *skuad* utama, pelatih Madrid Zinedine Zidane memutuskan untuk melepas Diaz ke AC Milan dengan status pemain pinjaman. Pesepak bola berusia 21 tahun tersebut menjalani masa sekolah bersama I Rossoneri sampai akhir musim 2020/2021 nanti.

Bergabung dengan Franck Kessie dan kawan-kawan, Diaz sejauh ini mampu menunjukkan permainan impresif. Pemain yang bermain pada posisi *playmaker* ini telah berkontribusi dalam 25 pertandingan dengan total mengemas empat gol dan dua *assist* di semua pertandingan kompetitif Rossoneri.

Teranyar, Diaz membantu timnya ketika menjamu Udinese dalam lanjutan pekan ke-25 Seri A Italia pada tengah pekan. Meski gagal mengantongi poin sempurna, penampilan Diaz yang menggantikan peran Hakan Calhanoglu terbilang cukup apik.

Diaz turun dengan rentang waktu 63 menit dan melepas satu tembakan tepat sasaran, dengan umpan akurat menyentuh 93,9 persen. Itu tertinggi kedua setelah Franck Kessie pada laga saat itu.

Menyaksikan Diaz bermain, jelas membutuhkan kesabaran untuk melihatnya berproses. Melihat pemain berdarah Muslim ini berada dalam level tertinggi, ia selayaknya Cristiano Ronaldo, pun Andres Iniesta.

Sementara itu, dilansir dari berbagai sumber, Brahim lahir dari ayah yang berasal dari Melilla, sedangkan ibunya berasal dari Malaga. Darah Muslim berasal dari neneknya yang merupakan warga Maroko.

Dirinya memulai karier sepak bola pada 2010 di akademi Malaga—salah satu wilayah Spanyol yang kental dengan penduduk Muslim. Tiga tahun berselang, dia memutuskan hijrah ke Manchester City.

Maka tak mengherankan darah Muslim begitu kental dalam diri pemain bernama lengkap Brahim Abdelkader Diaz itu. Bermigrasi dari Maroko ke Melilla, sebuah kota otonom Spanyol, Abdelkader sang ayah menjatuhkan pilihan untuk membesarkan Brahim Diaz dan saudaranya di sana.

Tumbuh di lingkungan keluarga yang sederhana membuat Diaz menjadi pribadi yang tenang dan hal itu terlihat dari aktivitas sehari-harinya yang tidak melulu memamerkan barang mewah, seperti mobil *sports*, pakaian dengan balutan kalung bermerek, pun acara pesta bersama teman di suatu klub malam.

Pesepak bola berzodiak Leo itu menyerap apa yang telah diajarkan Abdelkader untuk bisa tumbuh menjadi diri sendiri, dan bertanggung jawab dengan apa yang ia lakukan.

Kini menyeruak berbagai rumor bahwa Milan ingin mencari cara untuk bisa merekrut Diaz secara permanen dari Madrid pada musim panas nanti.

Memang perannya tidak terlalu vital seperti Zlatan Ibrahimovic atau Hakan Calhanoglu, tetapi Brahim tergolong sosok yang tepat untuk dimiliki Rossoneri. ■ ed: m akbar

FABRIZIO CARABELLI

● Brahim Diaz

BURSA

		KAMIS (4/3)
FTSE 100	6.627,20	48.27 ▼
Dax	14.050,86	29.17 ▼
Cac 40	5.829,20	0.86 ▼
Dow Jones	31.270,09	121.43 ▼
Nasdaq	12.997,75	361.04 ▼
Shanghai	3.503,49	73.41 ▼
Hang Seng	29.236,79	643.63 ▼
Nikkei	28.930,11	628.99 ▼
Straits Time	3.007,60	7.23 ▲
IHSG	6.290,80	85.96 ▼

Sumber: Marketwatch dan BEI 17.00 WIB

KURS

		KAMIS (4/3)
MATA UANG	JUAL	BELI
AUD	11.188	11.076
EUR	17.322	17.148
GBP	20.032	19.831
HKD	1.852	1.834
JPY	134	132
SGD	10.780	10.672
USD	14.370	14.227

Sumber: BI sampai 17.00 WIB

KURS TENGAH DOLAR AS

Sumber: BI

INDIKATOR

Laba TPIA

PT Chandra Asri Petrochemical Tbk (TPIA) mencatatkan laba tahun berjalan sebesar 51,54 juta dolar AS pada 2020, melesat 117 persen dibandingkan laba tahun 2019 yang hanya 23,65 juta dolar AS. ■

Sumber: TPIA

APRILLIO AKBAR/ANTARA

SIRKUIT MANDALIKA Foto udara pembangunan lintasan sirkuit proyek Mandalika International Street Circuit di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika, Pujut, Praya, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB), Kamis (4/3). Berdasarkan data Mandalika Grand Prix Association (MGPA), Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) dan PT PP (Persero) Tbk telah membangun lintasan sirkuit MotoGP itu hingga 53,27 persen per Februari 2021.

Pertamina Butuh *Capex* Rp 1.288 Triliun

Pertamina mendapat penugasan 14 proyek strategis nasional dari hulu sampai hilir.

■ INTAN PRATIWI

JAKARTA — PT Pertamina (Persero) memproyeksikan kebutuhan *capital expenditure* (capex) atau belanja modal sebesar 92,36 miliar dolar AS atau setara dengan Rp 1.288 triliun (kisaran kurs Rp 14 ribu per dolar AS) hingga 2024. Belanja modal triliunan rupiah tersebut untuk mendanai sejumlah proyek dari hulu sampai hilir.

Direktur Keuangan Pertamina Emma Sri Martini menjelaskan, setidaknya ada 300 proyek yang digarap Pertamina, 14 di antaranya merupakan proyek strategis nasional (PSN). Proyek-proyek tersebut terdiri atas hulu atau *upstream*, *midstream*, hingga *downstream* atau hilir.

Emma mengatakan, Pertamina hanya mampu meng-*cover* 38 persen dari total Rp 1.288 triliun kebutuhan belanja modal. Sisanya, Pertamina membutuhkan suntikan dana dari kerja sama ataupun skema investasi dan pinjaman.

"Jadi, kami mengharapkan dari sisi *capital financing* apakah itu dari *financial bank* atau dari multilateral," kata Emma dalam webinar di Jakarta, Kamis (4/3).

Emma menyebutkan, sebagian besar proyek PSN yang dikerjakan Pertamina bertujuan menekan defisit neraca perdagangan yang disebabkan impor komoditas energi, seperti bahan bakar minyak (BBM), *liquefied petroleum gas* (LPG), dan petrokimia.

Dari total prediksi belanja modal Rp 1.288 triliun, Emma mengatakan, 69,5 persen dialokasikan ke sektor hulu minyak dan gas bumi (migas) hingga 2024 mendatang. Ia menyebutkan, investasi di hulu migas hingga 2024 sebesar 64 miliar dolar AS atau sekitar Rp 896 triliun (kisaran kurs Rp 14 ribu per dolar AS).

Emma menyampaikan, sektor *midstream* dan hilir migas menelan biaya investasi 20 miliar dolar AS atau Rp 280 triliun hingga 2024. Sebesar 18 miliar dolar AS untuk membangun kilang baru dan peningkatan kilang yang sudah ada, sedangkan sisa 2 miliar dolar AS digunakan untuk kegiatan distribusi dan pemasaran infrastruktur.

Lebih lanjut, terkait belanja modal Pertamina, Wakil Komisaris Utama Pertamina Pahala Nugraha Mansury menyebutkan, kebutuhan belanja modal tahun ini sebesar 10,7 miliar dolar AS atau sekitar Rp 150 triliun. Ia mengatakan, anggaran sebesar itu untuk investasi di sektor hulu, pembangunan kilang BBM dan petrokimia, serta proyek strategis lainnya.

"Pertamina diharapkan tahun ini akan melakukan investasi dengan total 10 miliar dolar AS. Kita berharap kegiatan ini bisa mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia sehingga dengan adanya investasi besar tersebut sehingga diharapkan ekonomi akan segera bergerak," ujar Pahala.

Pahala yang juga menjabat sebagai wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) I itu menilai, besarnya dana investasi yang disiapkan Pertamina tidak hanya untuk mendukung pemulihan ekonomi, tapi juga untuk mengembangkan bisnis BUMN migas tersebut dalam jangka menengah dan panjang.

Sepanjang tahun 2020 lalu Pertamina meraup laba sebesar satu miliar dolar AS atau sekitar Rp 14 triliun. Pertamina mampu membalikkan posisi kerugian sebesar 767,92 juta dolar AS atau sekitar Rp 11,3 triliun pada semester I 2020.

"Laba bersih pada 2020 sebesar satu miliar dolar AS atau setara Rp 14 triliun. Ini bisa tercapai karena beberapa upaya yang perusahaan lakukan dan langkah efisiensi dan prioritas anggaran," kata Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati.

Nicke mengatakan, laba bersih Pertamina sepanjang 2020 lebih rendah dibandingkan tahun 2019 yang

> **Pertamina diharapkan tahun ini akan melakukan investasi dengan total 10 miliar dolar AS.**

mencapai 2,53 miliar dolar AS. Bukan tanpa alasan perusahaan migas pelat merah itu mengalami penurunan laba bersih pada 2020.

Pertamina mengalami *triple shock*, yakni penurunan harga minyak mentah dunia, pergerakan nilai tukar rupiah serta penurunan konsumsi bahan bakar minyak (BBM). Tercatat pada tahun lalu, permintaan BBM anjlok 25 persen. Penurunan tersebut merupakan yang terdalam dibandingkan beberapa tahun terakhir.

Nicke mengatakan, Pertamina menargetkan laba bersih sebesar 2 miliar dolar AS atau sekitar Rp 28 triliun pada 2021. Target ini dipasang sejalan dengan harapan adanya pemulihan ekonomi secara nasional.

■ ed: citra listya rini

Holding Baterai Ditargetkan Terbentuk Juni 2021

■ INTAN PRATIWI, MUHAMMAD NURSYAMSI

JAKARTA — *Holding* Indonesia Battery Corporation (IBC) ditargetkan terbentuk pada Juni tahun ini. Secara keseluruhan investasi yang dibutuhkan untuk membuat industri baterai listrik dari hulu ke hilir antara 13 miliar dolar AS sampai 17 miliar dolar AS (sekitar Rp 182 triliun hingga Rp 238 triliun).

"Paling tidak Juni ini paling tidak sudah lahir (*holding*). Itu paling telat, tapi kalau lihat dari progres mungkin bisa lebih cepat karena sudah dilakukan," kata Ketua Tim Kerja Percepatan Pengembangan IBC dan Komisaris Utama Mining Industry Indonesia (MIND ID) Agus Tjahajana Wirakusumah di Jakarta, Kamis (4/3).

Konsorsium Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang terlibat dalam proyek pengembangan industri sel baterai untuk kendaraan listrik, yaitu MIND ID, PT Aneka Tambang (Persero) Tbk, PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), dan PT Pertamina (Persero).

Agus mengatakan, untuk bisa merealisasikan IBC tersebut pemerintah membutuhkan dana 13 miliar dolar AS sampai 17 miliar dolar AS. Ia memerinci, ada dua rencana kapasitas pembangunan pabrik baterai.

Pertama, pemerintah akan membuat pabrik tahap pertama dengan kapasitas sebesar 30 gigawatthour (GWh). Agus mengatakan, proyek tahap pertama ini butuh investasi sebesar 13 miliar dolar AS.

Agus menyampaikan, pada tahap pertama ini rencananya akan berjalan dari 2026 sampai 2030 nanti. Ia melanjutkan, selain pembangunan pabrik baterai tersebut, di bagian hulu Antam akan lebih dulu membangun pabrik pengolahan nikel menjadi bahan baku baterai.

"Kapasitasnya 195 GWh yang menyerap 150 ribu ton nikel pertahun. Investasi di hulu ini investasinya butuh sekitar 17 miliar dolar AS," ujar Agus.

Wakil Menteri BUMN I Pahala Nugraha Mansury mengatakan, melalui investasi dari hulu sampai ke hilir, industri baterai kendaraan listrik ini akan menjadi industri masa depan, khususnya untuk energi baru terbarukan (EBT). "Kita harapkan industri baterai tersebut betul-betul menjadi masa depan, khususnya di sektor energi baru dan terbarukan," kata Pahala.

Pahala menyebutkan, Indonesia tidak hanya bisa menjadi pasar, tapi memiliki modal utama berupa sumber daya yang bisa digunakan untuk memproduksi baterai. Menurut Pahala, ini menjadi momentum yang positif untuk ikut berinvestasi.

Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga menambahkan, pembentukan *holding* baterai sangat penting agar bisa segera implementasi strategi yang telah disusun, termasuk tindak lanjut pengembangan industri baterai dengan CATL dari Cina, dan LG Chem dari Korea Selatan.

Pertamina akan berperan di empat sektor *value chain* dari pabrik baterai ini. SVP Strategy & Investment Pertamina Daniel S Purba mengatakan, pihaknya sudah aktif mengikuti perkembangan teknologi baterai, pemanfaatannya dan juga para pemainnya sekitar empat sampai lima tahun terakhir.

Dalam proses *value chain* di dalam ekosistem EV battery, Daniel mengungkapkan, ada tujuh tahapan yang akan dikerjakan, mulai dari pertambangan nikel, pengolahan nikel atau *refining*, pembangunan *precursor plant, cathode plant, battery cell, battery pack*, hingga *recycling*. ■ ed: city listya ini

BRI Terus Dorong Kemajuan UMKM

■ NOVITA INTAN

JAKARTA — PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk terus mendorong kemajuan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam negeri dapat naik kelas. Termasuk juga, berdaya saing global untuk menjaga roda perekonomian di Indonesia.

"Tantangannya sekarang adalah mencari sumber pertumbuhan baru. Strateginya, yakni BRI akan fokus di dua area, pertama yang *eksisting* kita naik kelaskan. Kedua, cari sumber pertumbuhan baru, yaitu mencari yang lebih kecil daripada mikro," kata Direktur Utama BRI Sunarso di Jakarta, Kamis (4/3).

Sunarso memastikan, BRI akan terus melakukan edukasi kepada pelaku usaha untuk mendorong UMKM naik kelas, dari ultramikro menjadi mikro, mikro menjadi kecil, kecil menjadi menengah, dan seterusnya.

Selain itu, untuk pengembangan UMKM, Sunarso mengatakan, BRI telah menyiapkan program inklusi keuangan yang berbasis teknologi dan digital dengan membangun ekosistem, struktur, sistem, ataupun basis data sendiri.

"Itu adalah syarat dan prasyarat untuk kita mentransformasi UMKM ini. Baik dari sisi UMKM-nya sendiri, maupun dari sisi banknya, lembaga yang men-*support* UMKM. Supaya nanti kita bisa sama-sama berjalan berdasarkan cara kerja yang baru yang berbasis teknologi dan digital. Dan, itu semua butuh integrasi data," ujar Sunarso.

Hingga akhir Desember 2020, BRI secara konsolidasi telah menyalurkan kredit senilai Rp 938,37 triliun dengan 82,13 persen di antaranya tersalurkan kepada pelaku UMKM di Indonesia.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan, perdagangan digital di Tanah Air harus diarahkan untuk selalu memberdayakan dan mendorong kinerja UMKM, sekaligus mendatangkan manfaat bagi masyarakat luas.

"Perdagangan digital harus dorong UMKM kita. Manfaatnya sudah kita lihat. Kekuatan digital harus dimanfaatkan untuk merangkai antara suplai UMKM di Indonesia dengan pasar nasional dan global," kata Presiden Jokowi.

Presiden Jokowi menambahkan, perdagangan digital pada akhirnya harus mampu memberdayakan UMKM di seluruh Indonesia. Kepala Negara mengatakan, pelaku-pelaku usaha kecil itu kalau diangkat dan diberikan peluang akan bisa terkelola dengan baik bahkan bisa mengekspor produk.

Presiden Jokowi melihat UMKM hanya perlu mendapatkan pendampingan dari sisi kemasan yang perlu diperbaiki, merek yang perlu dikuatkan, didorong untuk ekspor, dan dipastikan kapasitas usahanya.

Sebelumnya, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi berpesan kepada pelaku UMKM agar memanfaatkan teknologi, seperti platform jualan dalam jaringan, untuk membantu bisnis mereka terutama di tengah pandemi virus korona.

Kementerian melihat kolaborasi lintas sektor, termasuk dengan perusahaan yang bergerak di sektor teknologi digital merupakan salah satu faktor penting dalam menguatkan kapasitas dan pemberdayaan UMKM di Indonesia.

Pemerintah sejak tahun lalu juga memiliki kampanye Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia, mendorong masyarakat untuk mengonsumsi produk-produk dalam negeri dan mendukung UMKM.

■ antara ed: citra listya rini

FENY SELLYANTARA

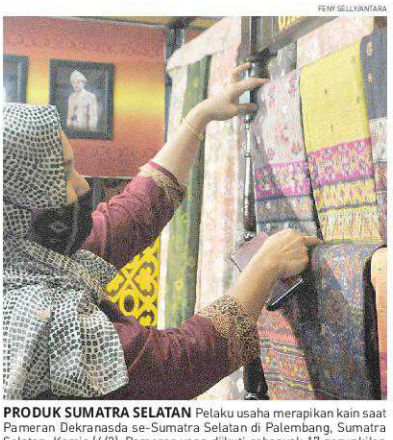

PRODUK SUMATRA SELATAN Pelaku usaha merapikan kain saat Pameran Dekranasda se-Sumatra Selatan di Palembang, Sumatra Selatan, Kamis (4/3). Pameran yang diikuti sebanyak 17 perwakilan Dekranasda Kabupaten Kota tersebut menampilkan aneka produk unggulan Sumatra Selatan.

PRAYOGI/REPUBLIKA

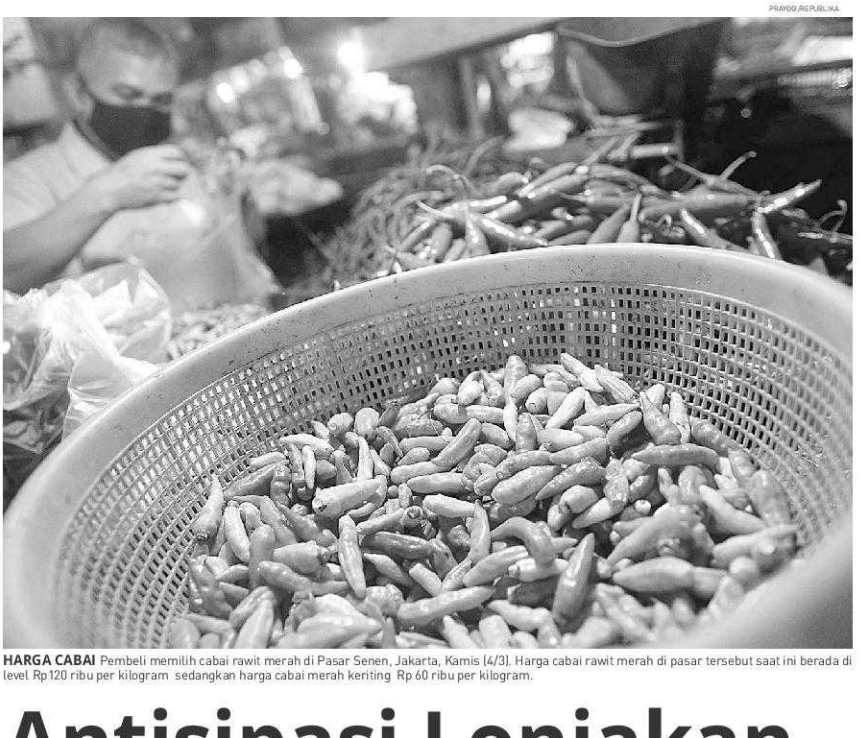

HARGA CABAI Pembeli memilih cabai rawit merah di Pasar Senen, Jakarta, Kamis (4/3). Harga cabai rawit merah di pasar tersebut saat ini berada di level Rp120 ribu per kilogram sedangkan harga cabai merah keriting Rp 60 ribu per kilogram.

Antisipasi Lonjakan Harga Pangan

Kementan menjamin pasokan daging tersedia menjelang Ramadhan.

■ SAPTO ANDIKA CANDRA, DEDY DARMAWAN NASUTION

JAKARTA — Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta jajaran Kementerian Perdagangan mengantisipasi lonjakan harga bahan pokok menjelang Ramadhan dan Lebaran. Jokowi mengingatkan, ketersediaan bahan pokok di daerah perlu dijaga agar harga stabil dan terjangkau oleh masyarakat. Hal itu, menurut Jokowi, perlu mendapatkan perhatian karena masyarakat masih dihadapkan pada pandemi Covid-19.

"Perlu saya ingatkan, Ramadhan tinggal 40 hari lagi. Sebulan kemudian Idul Fitri. Siapkan dari sekarang, antisipasi dari sekarang," kata Jokowi dalam pembukaan Rapat Kerja Nasional Kemendag di Istana Negara, Kamis (4/3).

Jokowi mengatakan, dalam situasi pandemi Covid-19, perayaan Idul Fitri diperkirakan akan dilaksanakan secara sederhana. Artinya, lonjakan permintaan pada periode Ramadhan dan Idul Fitri diperkirakan tidak terjadi seperti waktu normal. Meski begitu, Jokowi tetap meminta ketersediaan stok dan harga harus tetap stabil di pasar.

Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi menyampaikan, upaya menjaga pasokan dan stabilitas harga kebutuhan pokok masuk dalam strategi utama kementerian tahun ini.

Sebagai imbas dari pandemi, ujarnya, masyarakat perlu stabilitas harga pangan yang bisa dijangkau dan tidak memberatkan ekonomi rumah tangga.

"Kemendag akan pastikan ketersediaan stok pangan, stabilitas harga komoditas pokok, dan penting tetap terjaga terutama memasuki Ramadhan dan Idul Fitri 2021, serta menjaga stabilitas inflasi perdagangan," kata Lutfi.

Khusus untuk komoditas sapi potong dan daging beku, Kementerian Pertanian menjamin pasokan tersedia untuk masa Ramadhan dan Idul Fitri. Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo menyampaikan, terdapat tiga agenda Kementan untuk menjamin ketersediaan daging sapi pada hari besar keagamaan dan secara berkelanjutan.

Pertama, agenda darurat, yakni mempersiapkan ketersediaan sapi potong menjelang Ramadhan dan Idul Fitri. "Sesuai arahan Presiden, kita harus melakukan upaya maksimal dalam mengamankan ketersediaan daging ini," kata Syahrul.

Kedua, lanjut Syahrul, yakni menjaga ketersediaan daging sapi setelah periode Idul Fitri. Sapi yang sudah dipotong harus segera digantikan agar ketersediaan sapi tetap terjaga secara berkelanjutan.

"Karena kita tidak bisa hanya Ramadhan. Kita juga harus bicara sesudah Ramadhan bagaimana keluar-masuknya sapi yang harus dilakukan sehingga ketersediaannya dapat kita amankan sekaligus kestabilan harga juga ada," tuturnya.

Untuk strategi yang lebih permanen, Kementan menyiapkan ketersediaan sapi dalam negeri untuk meningkatkan ketahanan pangan. Langkah itu juga dilakukan agar ketersedian daging tidak perlu bergantung kepada negara lain. "Oleh karena itu, Kementan dan Kemendag harus memiliki kerja sama yang kuat. Tentu saja dengan Kementerian BUMN juga agar kita didukung sektor swasta," ungkapnya.

Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan, Nasrullah, mengatakan, permintaan dan kebutuhan daging sapi untuk konsumsi masyarakat mulai melonjak. Kementan pun mulai melakukan pengecekan ketersediaan sapi potong sejak dini.

Nasrullah mencontohkan, stok sapi bakalan di PT Tanjung Unggul Mandiri (TUM) sebagai perusahaan penggemukan sapi (*feedloter*) pada 28 Februari sebanyak 8.094 ekor. Jumlah sapi siap potong sebanyak 5.091 ekor yang bila dikonversikan menjadi daging sapi sebanyak 1.140,94 ton.

PT TUM memasok sapi siap potong hasil penggemukan untuk memenuhi kebutuhan 30 rumah potong hewan (RPH) di wilayah Banten sebanyak 47,1 persen, Jawa Barat sebanyak 33,1 persen, DKI Jakarta sebanyak 17,4 persen, dan Jawa Tengah sebanyak 2,4 persen.

Pada kondisi normal, *feedloter* ini memiliki rata-rata pasokan total per bulan 3.500 hingga 4.700 ekor. Sementara itu, pasokan pada Ramadhan dan Idul Fitri akan meningkat berkisar 150 hingga 200 persen dibandingkan dengan pasokan pada kondisi normal.

"Kami juga sudah mengecek ketersediaan di lapangan dan relatif cukup aman sampai kebutuhan Lebaran 2021," ujar Nasrullah.

■ **ed:** ahmad fikri noor

Matinya UMKM Hijab dan Seruan Benci Produk Asing

■ DESSY SUCIATI SAPUTRI, DEDY DARMAWAN NASUTION

Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Kementerian Perdagangan 2021 menjadi sorotan karena Presiden Joko Widodo (Jokowi) melontarkan seruan proteksionisme terhadap produk lokal. Kepala Negara meminta Kementerian Perdagangan menyiapkan kebijakan dan strategi untuk mengembangkan pasar produk nasional, khususnya usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Jokowi meminta agar jajarannya mendorong masyarakat untuk mencintai dan mendukung produk-produk dalam negeri serta menggangkan untuk membenci produk-produk luar negeri. "Cinta barang kita, benci produk luar negeri," kata Jokowi saat meresmikan pembukaan Rakernas Kemendag di Istana Negara, Jakarta, Kamis (4/3).

Ia pun meminta pusat perbelanjaan, baik di Ibu Kota maupun di daerah, dapat memberikan ruang prioritas untuk produk UMKM. Lokasi-lokasi strategis tersebut, menurut dia, harus diisi oleh merek produk-produk lokal.

"Jangan sampai ruang depan, lokasi-lokasi strategis justru diisi dari *brand-brand* dari luar negeri, ini harus mulai digeser. Mereka digeser ke tempat yang tidak strategis. Tempat yang strategis, lokasi yang baik, berikan ruang untuk *brand-brand* lokal," ujar dia.

Dalam konferensi pers, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi menjelaskan, latar belakang pernyataan Jokowi bermula dari laporan mengenai praktik *predatory pricing* yang dilakukan platform niaga daring global. Praktik ilegal dalam perdagangan itu dilakukan dengan membuat harga yang sangat rendah untuk membunuh kompetisi. Aksi itu kemudian menyebabkan hilangnya persaingan yang seimbang dan membunuh UMKM.

Laporan itu, kata Lutfi, disampaikannya kepada Jokowi ketika memohon Kepala Negara membuka rakernas. "Beliau membenci praktik tersebut sebagai bagian dari ketidakpuasan karena kita menjadi kehilangan prospek UMKM," ujar Lutfi.

> **Jadi kita tidak bisa bersaing.**

Laporan yang disampaikan Lutfi merupakan hasil penelitian lembaga internasional tentang kehancuran kegiatan UMKM di sektor *fashion* Islam di Indonesia. Lutfi menyampaikan, pada 2016-2018 terdapat sebuah industri rumah tangga yang mengalami kemajuan luar biasa dengan menjual hijab. Produsen hijab tersebut berhasil mempekerjakan lebih dari 3.400 orang pegawai.

Namun, pada 2018, perusahaan itu tersadap oleh *artificial intelligence* (AI) yang digunakan perusahaan digital asing. Informasi produk UMKM tersebut kemudian disedot, dibuat produksinya di Cina, dan kemudian diekspor ke Indonesia.

"Mereka membayar 44 ribu dolar AS sebagai bea masuk, tetapi menghancurkan industri UMKM tersebut. Padahal, biaya gaji pegawai UMKM itu dalam setahun lebih dari 650 ribu dolar AS," ungkap Lutfi.

Lutfi menyampaikan, hal itu kemudian menjadi tren yang mematikan UMKM Indonesia. Dia mengatakan, harga jual hijab di platform niaga daring yang dimaksud Lutfi hanya dibanderol Rp 1.900 per buah. "Inilah *predatory pricing*, jadi kita tidak bisa bersaing," ujarnya.

Lutfi pun menekankan, seruan Jokowi bukanlah seruan untuk melakukan proteksionisme. Upaya proteksionisme bukanlah karakter Indonesia dan tidak akan memberikan nilai tambah pada kesejahteraan rakyat. Bahkan, Lutfi mengatakan, pada era kepemimpinan Presiden Jokowi, Indonesia sudah mengantongi lebih dari 25 perjanjian dagang. "Ini yang menyebabkan Indonesia menjadi semakin kompetitif," ujar Lutfi. ■ **ed:** ahmad fikri noor

BCA Syariah Fasilitasi Pembiayaan Kendaraan di *Garasi.id*

■ LIDA PUSPANINGTYAS

JAKARTA — PT Bank BCA Syariah (BCA Syariah) menggandeng platform niaga daring *Garasi.id* dalam sosialisasi pembiayaan syariah untuk pembelian mobil bekas atau *pre-owned car*. BCA Syariah menghadirkan alternatif pembiayaan kepemilikan kendaraan bermotor syariah atau pembiayaan KKB iB (Islamic Bank) bagi pengunjung situs *Garasi.id*.

KKB iB BCA Syariah merupakan pembiayaan yang diberikan perusahaan kepada nasabah berdasarkan prinsip syariah dengan menggunakan akad murabahah atau jual beli dengan tujuan pembelian mobil baru maupun bekas. Pembiayaan itu tersedia dengan jangka waktu sampai enam tahun untuk *pre-owned car* dan delapan tahun untuk mobil baru.

"Bekerja sama dengan *marketplace* tepercaya adalah salah satu upaya untuk semakin mendekatkan solusi pembiayaan konsumtif BCA Syariah kepada masyarakat luas," ujar Direktur BCA Syariah, Pranata, pada Kamis (4/3).

Kerja sama BCA Syariah dan *Garasi.id* memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk melakukan pembelian mobil dengan pembiayaan syariah melalui satu platform.

Berdasarkan data *Garasi.id*, mulai Mei 2019 hingga Januari 2021 pembelian *pre-owned car* dengan pembiayaan KKB iB BCA Syariah tercatat sebanyak 321 kali. Rata-rata tahunan pengajuan yaitu 16,7 unit pada 2019 dan 15,1 unit pada 2020.

Pembiayaan KKB iB memberikan keuntungan, antara lain, kepastian angsuran dengan jangka waktu pembiayaan yang lebih lama. Pranata juga mengajak masyarakat yang ingin mengenal lebih banyak mengenai pembiayaan dan layanan BCA Syariah untuk mengunjungi BCA Exposersary Online 2021 mulai 27 Februari 2021 hingga 27 Maret 2021.

CEO Garasi.id Ardy Alam mengatakan, penjualan *pre-owned car* di platform tersebut semakin marak, ditandai dengan peningkatan sampai 89 persen pada 2020. "Hal ini menunjukkan pasar *pre-owned car* selama masa pandemi masih diminati masyarakat," kata Ardy.

Garasi.id menawarkan *one stop shop online platform* untuk memenuhi kebutuhan otomotif masyarakat Indonesia. Platform jual beli mobil itu memiliki sejumlah fitur seperti penyedia jasa servis tepercaya dan alternatif solusi pembiayaan. Dalam fitur Mobil Pilihan, *Garasi.id* pun memastikan pengecekan mobil dilakukan oleh montir andal dari mitra dengan 170 poin pengecekan untuk segala tipe mobil.

"Calon pembeli tidak perlu khawatir karena *Garasi.id* akan memastikan Sahabat Garasi mendapatkan *pre-owned car* dengan kondisi yang optimal," ujarnya. ■ **ed:** ahmad fikri noor

KONSULTASI SYARIAH

DIASUH OLEH **DR ONI SAHRONI**
Anggota Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia

Upah Berbentuk Persentase dari Penjualan

Assalamualaikum wr wb.

Saya memiliki beberapa karyawan di toko tempat saya berjualan. Bolehkah upah mereka dalam bentuk persentase dari hasil penjualannya?

Bustomi, Bogor

Waalaikumussalam wr wb.

Para ahli fikih berbeda pendapat tentang model penentuan upah dari hasil pekerjaan. Sebagian membolehkan dan sebagian lagi melarangnya. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam *al-Maushu'ah al-Fikhiyah al-Kuwaitiyah* juz 1/264.

Mazhab Hanabilah berpendapat, upah berbentuk persentase dari hasil kerja karyawan atau pihak yang diberikan upah itu diperbolehkan. Ini menyerupai transaksi mudharabah dan *musaqah* (bagi hasil). Seperti halnya seorang pemilik lahan menyerahkan lahannya kepada petani dengan upah sebagian dari hasil panen yang dikelolanya. Upah tersebut jelas, diketahui, dan disaksikan oleh para pihak.

Sedangkan, mazhab Hanafiyah, Syafi'iyah, dan Malikiyah, yang tidak membolehkan upah dari sebagian hasil kerja karyawan, berpendapat bahwa upah tersebut itu tidak pasti. Itu karena pekerjaan tersebut tidak diketahui dapat menghasilkan keuntungan atau tidak, dan itu akan merugikan salah satu atau dua pihak. Abu Said al-Khudri meriwayatkan, "Sesungguhnya Nabi SAW melarang dari *qafiz* pembuat tepung." (HR ad-Daruquthni).

Sedangkan, dalam mazhab Hanbali, mereka membolehkan karena berpendapat bahwa saat upah berbentuk persentase tertentu dari yang dikerjakan oleh karyawan maka itu serupa karena (a) serupa dengan mudharabah dan (b) karena upah tersebut diketahui dan disaksikan kedua belah pihak (tidak ada unsur *gharar*). Sebab, menurut mereka, hadis tentang *qafizu thahan* itu tidak sahih.

Nadwah Baraka yang ke-13 mengambil pilihan ini saat menjelaskan tentang *'uqudu al-imtiyaz*. Nadwah tersebut menjelaskan, apabila *'aqdu al-imtiyaz* itu mengambil bahan-bahan dari perut bumi maka *takyif* yang tepat adalah akadnya menyewa lahan dengan upah sebagian dari hasil perut bumi yang dikeluarkan sebagaimana analogi dengan akad *muzara'ah* dengan upah sebagian dari hasil panen (Nadwah Barakah yang ke-13/2).

Mazhab Malikiyah juga sependapat dengan Hanabilah dalam beberapa kondisi, antara lain upah bisa diketahui walaupun dengan asumsi. Dari kedua pendapat tersebut, fatwa yang diadopsi dalam fatwa DSN MUI adalah fatwa yang memperbolehkan *ujrah* atau *fee* berbentuk persentase dari hasil kerja pemanfaat jasa. Sebagaimana fatwa DSN MUI bahwa kuantitas dan/atau kualitas *ujrah* harus jelas, baik berupa angka nominal, persentase tertentu, atau rumus yang disepakati dan diketahui oleh para pihak yang melakukan akad (fatwa DSN MUI Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Ijarah).

Sebagaimana Standar Syariah Internasional AAOIFI, "Upah boleh berbentuk persentase seperti 10 persen dari hasil produksi atau dari pihak yang bertugas untuk memproduksinya." (Standar Syariah Internasional AAOIFI Nomor 34 tentang Ijarah al-Asykhash).

Wallahu a'lam. ■

TAJUK

Cinta Produk Indonesia

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta seluruh pemangku kepentingan untuk mengagungkan cinta produk Indonesia. Presiden juga meminta agar didorong kampanye untuk benci produk asing.

Pernyataan Presiden yang disampaikan saat membuka Rapat Kerja Kementerian Perdagangan 2021, Kamis (4/3), tak ayal langsung direspons berbagai kalangan. Bukan hanya masyarakat biasa yang menanggapi pernyataan Presiden, melainkan pelaku usaha pusat perbelanjaan, pangamat ekonomi, juga anggota dewan.

Bila kita coba mencermati permintaan Presiden Jokowi, sesungguhnya itu sesuatu yang wajar. Beberapa presiden Indonesia sebelumnya juga sudah menggaungkan agar masyarakat cinta terhadap produk Indonesia. Namun, kata-kata kita harus membenci produk asing memiliki kesan yang berbeda. Seakan Indonesia tengah berperang dengan produk asing, sebagaimana yang digaungkan oleh Presiden Donald Trump saat memimpin Amerika Serikat beberapa waktu lalu.

Selain itu, 'perang' terhadap produk asing dalam kondisi global saat ini, yang tanpa batas serasa kurang tepat bagi Indonesia. Apalagi, sejumlah produk yang beredar di Indonesia merupakan merek global. Ketika pemerintah menawarkan berbagai kemudahaan bagi para investor asing berinvestasi di Indonesia, mereka tentu saja mengembangkan produk dari negara mereka. Bukan produk lokal buatan Indonesia.

Walaupun demikian, cita-cita untuk mencintai produk Indonesia dan membenci produk asing bukan berarti sekadar mimpi. Suatu saat nanti, mungkin puluhan tahun lagi keinginan Presiden Jokowi akan terwujud di generasi berikutnya. Cikal-bakal para pelaku usaha kecil menengah (UKM) yang saat ini banyak didorong pemerintah, memiliki potensi Indonesia ke depan, banyak mempunyai produk sendiri. Di sektor kuliner, misalnya, saat ini banyak merek lokal yang sudah bisa menyaingi merek global, seperti di restoran kopi atau ayam goreng.

Kita sangat optimistis akan banyak produk lokal Indonesia, yang bisa bersaing dengan produk global di kemudian hari. Apalagi, Indonesia akan memasuki generasi emas pada 2045, dengan jumlah penduduk produktif yang sangat besar. Generasi kita yang kreatif untuk berkarya dan bersaing global.

Indonesia hendaknya jangan hanya menjadi tempat untuk berjualan bagi produk global. Jumlah penduduk yang mencapai 270 juta orang seharusnya menjadi modal bagi Indonesia untuk maju.

Jumlah penduduk yang besar itu semestinya menjadi daya tarik dan daya tawar bagi Indonesia dalam menggaet investor, termasuk bernegosiasi dengan calon investor. Indonesia bukan hanya melakukan impor untuk memenuhi kebutuhan di dalam negeri.

Karena itu, sebelum Indonesia mampu memenuhi kebutuhan dari merek dan produk lokal maka setidaknya, produk asing yang dikonsumsi adalah produk asing yang diproduksi di dalam negeri. Produk-produk gobal yang pabriknya ada di Indonesia. Keberadaan pabrik perusahaan multinasional di Indonesia selain mendatangkan pajak, juga dapat menyerap tenaga kerja nasional.

Semua langkah untuk mencintai produk dalam negeri itu harus berawal dari pemangku kepentingan. Komitmen tersebut harus dibangun sejak sekarang. Sebagai contoh, dalam memenuhi kebutuhan sebuah proyek, sudah saatnya ada persyaratan ketat bahwa barang-barang yang digunakan adalah produk yang diproduksi Indonesia, walaupun itu merek global. Kecuali jenis produk yang tidak diproduksi di Indonesia. Kebijakan ini dapat mengurangi impor.

Di samping itu, kebijakan ini juga akan membuat investor berpikir dua kali ketika enggan berinvestasi di Indonesia dan memilih negara tetangga. ■

SUARAPUBLIKA

Cinta Produk dalam Negeri

Apresiasi dan kata sepakat atas instruksi Presiden Joko Widodo (Jokowi), yang meminta Kementerian Dalam Negeri menyiapkan kebijakan dan strategi untuk mengembangkan pasar produk nasional, khususnya UMKM.

Ia pun meminta agar jajarannya mendorong masyarakat mencintai dan mendukung produk-produk dalam negeri serta menggaungkan untuk membenci produk-produk luar negeri. Cinta barang kita, benci produk luar negeri (4/3).

Tentu kabar ini memberi angin segar untuk rakyat yang memiliki usaha-usaha tradisional, UMKM, dan produk dalam negeri. Namun, fakta yang ada di lapangan sangat jauh berbeda, hari ini hampir semua produk lokal kalah bersaing dengan barang luar negeri.

Sebab, hampir di semua sektor produk di pasaran telah dibanjiri produk dari luar negeri. Apalagi, dengan disahkannya UU Cipta Kerja, telah membuka keran impor barang besar-besaran di Tanah Air. Yang tentu saja ini sangat merugikan usaha dan UMKM milik anak bangsa.

Pada saat pandemi tak terhitung jumlah usaha yang dimiliki rakyat harus gulung tikar. Maka itu, jika pemerintah memang serius ingin menyediakan pekerjaan bagi rakyat dan membantu rakyat dalam pengembangan usahanya, tutuplah keran impor.

Kemudian, negara memberikan modal bagi usaha rakyat dan menyediakan seluasnya lapangan kerja bagi rakyat. Tentu jika ini dilakukan, akan semakin mudah menggaungkan cinta produk dalam negeri.

Khadijah Nelly, Sidikalang, Sumut

Bineka Tunggal Zakat

ARIF RAHMADI HARYONO, Pegiat Kemanusiaan Dompet Dhuafa dan Pengurus Forum Zakat 2018-2021

Hak warga negara berinisiatif dan berorganisasi zakat tidak boleh dikekang atas alasan administratif semata.

Paradoks dunia zakat sewindu belakangan ini dipengaruhi ambivalensi dalam menginterpretasi ayat konstitusi dan hak warga negara. Ini muncul pada keinginan memperluas dakwah zakat saat bersamaan hak masyarakat mengelola zakat dibatasi, jika tidak didiskriminasi.

Keragaman pola pengelolaan zakat pun menjadi terbatas sebagai akibat restriksi dan birokratisasi perizinan organisasi pengelola zakat (OPZ). Koreksi menyeluruh atas praktik zakat urgen sebelum rentang kesalahan semakin besar.

Konstruksi regulasi memosisikan zakat sebagai norma bias wajib bagi warga negara. UU No 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (UUPZ) sedianya tidak mewajibkan pembayaran zakat bagi individu ataupun perusahaan.

Namun, mekanisme pembayarannya diarahkan kepada institusi yang telah disahkan negara. Ada ketentuan yang mengatur pemberian sanksi pidana badan dan/-atau denda uang yang tak ringan bagi masyarakat yang mengelola zakat tanpa izin pemerintah.

Maka postulatnya sederhana: kelolalah zakat secara resmi jika tak ingin tersangkut hukum pidana. Sayangnya, tafsir khilaf atas ayat konstitusi membuat hak berorganisasi di bawah rezim UUPZ membuat postulat tersebut menjadi tidak sederhana.

Hak berorganisasi zakat

Dunia zakat tidak hanya mendapatkan tantangan atas lemahnya regulasi, tetapi juga interpretasi institusi negara terhadap hak warga dalam berorganisasi zakat. Pada tujuh tahun terakhir, misalnya, jumlah LAZ yang mendapatkan rekomendasi Baznas hanya 96 lembaga.

Sementara itu, tak kurang dari 193 ajuan yang ditolak rekomendasinya.

Rerata setiap tahunnya, Baznas mengeluarkan 13 rekomendasi, relatif kecil dibandingkan kebutuhan dakwah zakat dengan tantangan dan cakupan wilayah seluas Indonesia.

Hak warga negara berinisiatif dan berorganisasi zakat tidak boleh dikekang atas alasan administratif semata. Ini bermuara pada dua persoalan. Pertama, banyak komunitas masyarakat tak dapat memenuhi persyaratan dalam UUPZ.

Observasi penulis atas lembaga yang mendapatkan rekomendasi Baznas adalah minimnya LAZ berlatar belakang masjid raya, pesantren, komunitas perkantoran, profesional, BUMN, dan swasta.

Bagi beberapa komunitas dengan manajemen pengelolaan zakat yang masih terbatas, seperti pesantren, madrasah, masjid dengan skala mikro, memenuhi persyaratan UUPZ yang ketat memang bukan persoalan mudah.

Persoalan kedua dalam hak berorganisasi zakat adalah interpretasi pasal perizinan LAZ. Ini menimpa komunitas karyawan profesional di BUMN atau kantor swasta. Hak berorganisasi zakat mereka diarahkan sebatas unit pengumpul zakat (UPZ) berdasarkan Pasal 16 UUPZ.

Setelah diundangkan, UUPZ diujimaterikan di MK. Persyaratan hak berorganisasi LAZ dalam UUPZ menjadi materi ajuan, juga birokratisasi hak berorganisasi zakat. UU mensyaratkan jenjang legalitas LAZ, yakni mendapatkan rekomendasi Baznas dan pengesahan Kemenag.

Dalam amar putusannya, MK menyatakan, persyaratan ketat dalam UUPZ tak bertentangan dengan hak konstitusional warga negara sepanjang tak dimaknai sebagai restriksi inisiatif warga negara dalam berorganisasi zakat.

Soal birokratisasi perizinan LAZ, MK memberikan interpretasi atas Pasal 18 ayat (2) huruf c terkait syarat rekomendasi dari Baznas atas pendirian LAZ. MK menyatakan, yang berwenang memberi izin pembentukan LAZ adalah menteri atau pejabat yang ditunjuk menteri, mengacu Pasal 18 ayat (1).

Pasal 18 ayat (2) huruf c terkait syarat rekomendasi Baznas bukan dimaknai Baznas turut andil dalam proses penyeleksian atau pemutusan sebuah komunitas masyarakat berhak atau tidak dalam mengelola zakat.

Dalam praktiknya, selama ini Baznas bertindak selaku lembaga penilai atas ajuan pendirian LAZ. Jika konsisten dengan keputusan MK, perizinan LAZ terpusat di Kementerian Agama yang berwenang memberikan izin.

Fungsi Baznas dalam aspek pendirian LAZ, memberikan pertimbangan kepada Kemenag sekaligus fungsi konsultatif bagi masyarakat, yang akan mendaftarkan diri sebagai LAZ. Ini dapat dirujuk pada putusan MK No. 86/PUU-X/2012 (hal 101-102).

Berbeda-beda, tapi berzakat

Penegasian hak berorganisasi zakat jadi sorotan dalam *rapid assessment* Ombudsman Republik Indonesia (ORI). Di antaranya, soal inisiatif karyawan perusahaan swasta dan BUMN yang diminta jadi UPZ, padahal di komunitas itu telah berdiri LAZ berdasarkan UU 38/1999.

Proses penyesuaian dengan UUPZ melalui pendirian badan hukum terpisah dari badan/korporasi induknya pun tidak dindahkan Baznas dan Kemenag. Dari kasus ini bisa disimpulkan, hak warga negara beribadah dan berorganisasi zakat diabaikan pranata negara.

Sebagai penutup, penulis menukil salah satu ayat konstitusi: Negara menjamin kemerdekaan bagi warga negaranya dalam memeluk dan beribadah menurut agama yang dianutnya.

Fungsi institusi zakat negara terkait pasal tersebut, yaitu mengakui, menghormati, dan memberikan perlindungan hukum atas beragamnya praktik pengelolaan zakat. Berbeda-beda pola pengelolaannya, tetapi tetap berzakat juga; bukankah ini sejalan dengan Pancasila? ■

Menepis Riba dengan Dana ZIS

ADRIN GUNTURA, ASN pada Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta,
Alumnus Pascasarjana Kajian Timur Tengah dan Islam UI

Saat ini, pinjaman dengan bunga sangat tinggi terjadi di pasar pasar tradisional melalui bank keliling. Bunga pinjaman bervariasi dari 60 hingga 420 persen atau 7,5 hingga 35 persen per bulan. Kondisi ini banyak terjadi di Jakarta dan mungkin wilayah lain di Indonesia.

Menurut personel LPEM Baznas, Noor Azis, besarnya bunga bank keliling, tidak jauh berbeda dengan hasil yang penulis peroleh dari wawancara dengan pedagang di pasar tradisional Paseban bagian belakang, Salemba, Kramat Lontar, Jakarta Pusat, 16 Januari 2021.

Selain itu, wawancara dengan beberapa pedagang kuliner di lokasi perumahan seberang pasar, Kramat sawah. Pada umumnya, bank keliling atau biasa disebut rentenir adalah jasa pembiayaan informal dari pihak tertentu kepada masyarakat menengah ke bawah.

Disebut sebagai bank keliling karena orang yang memberikan pinjaman atau menagih angsuran pinjaman, biasanya berkeliling dari satu rumah ke rumah, dari satu kios ke kios di pasar untuk menemui "nasabahnya", orang yang telah diberi pinjaman.

Uang yang disalurkan bank keliling kepada masyarakat, biasanya digunakan untuk modal usaha mikro atau ultramikro, seperti toko kelontong, toko sayuran, atau berjualan makanan atau jasa lain, seperti usaha jahit baju atau reparasi elektronik bahkan untuk konsumsi.

Bila kita bandingkan bunga bank resmi yang saat ini berlaku, misalkan 18 persen per tahun atau 1,5 persen per bulan atau 0,05 persen per hari, beban bunga yang dibayar pedagang sangat besar dan memberatkan.

Jika saja pedagang atau masyarakat miskin tersebut memiliki akses terhadap pinjaman, yang menawarkan suku bunga jauh lebih rendah dan disepakati tanpa paksaan, tentu mereka dapat mengalokasikan pendapatan untuk keperluan lain bagi kesejahteraan rumah tangga.Termasuk pendidikan dan tempat tinggal.

Kebanyakan dari pedagang mengontrak rumah secara bulanan ataupun tahunan. Namun, mereka memilih meminjam ke bank keliling dengan sejumlah alasan. Di antaranya, saat meminjam mereka tak perlu ke bank.

Saat meminjam, mereka cukup mengisi dan menandatangani perjanjian pinjaman di tempat mereka berdagang, dengan waktu siang atau sore hari setelah pasar sepi. Untuk membayar pinjaman, berupa angsuran harian atau mingguan sesuai kesepakatan.

Kedua, tidak ada jaminan. Mereka cukup menandatangani perjanjian pinjam meminjam dan menerima uang sesuai yang diminta setelah dipotong biaya administrasi. Ketiga, keringanan saat membayar angsuran jika tidak mempunyai uang. Pembayaran bisa ditunda.

Keempat, waktu pelayanan pemberian pinjaman cepat. Sedangkan hal yang memberatkan tentu bunga yang sangat tinggi dan mencekik sehingga bukan tidak mungkin, usaha mereka bisa bangkrut dan jatuh miskin.

Persoalan ini dapat diselesaikan dengan skema bagi hasil yang disepakati dengan pedagang, yang angkanya lebih rendah dari beban bunga bank keliling. Selisih bunga bank keliling dan bagi hasil adalah sedekah yang diterima pedagang.

Sumber dana untuk pedagang, bisa saja dari lembaga zakat, infak, dan sedekah, seperti Baznas, LAZ, lembaga keuangan syariah, atau pribadi yang mempunyai rezeki berlimpah.

Jika kita bisa menurunkan beban bunga bank keliling dari 100 persen per tahun menjadi bagi hasil 24 persen per tahun, 100 persen adalah riba. Selisih 100 persen dikurangi 24 persen atau 76 persen adalah sedekah yang diterima pedagang. Sedangkan 24 persen, bagi hasil yang dibayar pedagang.

Untuk mengatasi riba, menurut penulis adalah menyediakan skema pinjman seperti yang mereka sukai. Pertama, tidak perlu ke bank. Saat meminjam cukup menandatangani perjanjian pinjaman di tempat mereka berdagang saat siang atau sore hari setelah pasar sepi.

Kedua, tidak ada jaminan peminjaman. Jaminan dapat saja diminta, misalnya dalam bentuk BPKB dengan jumlah pinjaman tertentu, misalnya di atas Rp 15 juta. Ketiga, keringanan saat membayar angsuran.

Pelunasan harian dilakukan setiap hari atau sekurang-kurangnya dua hari sekali. Namun, bila pembayaran harian tak mampu dibayar karena dagangan tidak laku atau hari libur yang mengakibatkan pasar sepi, ada keringanan tanpa mengenakan denda keterlambatan.

Keempat, menurunkan bagi hasil pinjaman sesuai kesepakatan, yang tidak memberatkan pedagang.

Kelima, mengurangi sikap mempermalukan jika peminjam tidak mampu bayar sesuai kesepakatan. Keenam, ada akad pinjaman tanpa bunga.

Dengan bagi hasil jauh di bawah bunga pinjaman rentenir atau bank keliling, para pedagang bisa makin sejahtera serta berpotensi menjadi muzaki. Selisih bunga pinjaman dan bagi hasil merupakan sedekah, yang menjadi tambahan penghasilan bagi mereka.

Beban bunga yang tinggi adalah masalah umat. Lembaga filantropis, baik Baznas, LAZ seperti Dompet Dhuafa, maupun lembaga dalam bentuk dan nama apa pun, bisa memberikan bantuan dana kepada para pedagang untuk menghindarkan mereka dari bank keliling. ■

REPUBLIKA

Terbit sejak 4 Januari 1993, Republika hadir sebagai pelopor pembaruan media massa Indonesia. Harian ini memberi warna baru pada desain, gaya pengutaraan, dan sudut pandang surat kabar negeri ini. Sebagai koran, kemudian portal berita pertama di Tanah Air, media ini melahirkan keseim bangan baru dalam tata informasi. Republika terbit demi kemaslahatan bangsa, penebar manfaat untuk semesta.

Semua naskah yang dikirim ke Redaksi dan diterbitkan menjadi milik Harian Republika. Semua wartawan Harian Republika dibekali tanda pengenal dan tidak menerima maupun meminta imbalan dari siapa pun. Semua isi artikel/tulisan yang berasal dari luar, sepenuhnya tanggung jawab penulis yang bersangkutan. Semua isi artikel/tulisan yang terdapat di suplemen daerah, menjadi tanggung jawab Kepala Perwakilan Daerah bersangkutan.

MAHAKA GROUP

Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Irfan Junaidi
Wakil Pemimpin Redaksi: Nur Hasan Murtiaji
Redaktur Pelaksana: Suiroto, Elba Damhuri
Redaktur Senior: Agung P Vazza
Wakil Redaktur Pelaksana: Firkah Fansuri, Heri Ruslan, Kamara Dewatasari, Joko Sadewo
Asisten Redaktur Pelaksana: Priyantono Oemar, Stevy Maradona, Ferry Kisihandi, Manisyar Faqih, Didi Purwadi, Muhammad Subarkah, Budi Raharjo, Edwin Dwi Putranto
Sekretaris Redaksi: Hamidah Sagaf
Perwakilan Jawa Barat: Rachmat Santosa Basarah (Kepala Perwakilan), Irfan Firzat Pribadi (Kepala Redaksi)
Perwakilan DIY -Jateng & Jatim: Hanyadi B Susianto (Kepala Perwakilan), Yusuf Assidiq (Kepala Redaksi)

Wartawan Senior: Hanan Hussein, Nurul S Hamami, Sibamat Ginting, Siwi Tri Puji Budiwiyati, Rakhmat Hadi Sudjito.
Kepala Desain: Sapjono. **Kepala Infografis:** Muhamad Ali Imron. **Kepala Penyunting Bahasa:** Rifki Ledhiana. **Kepala Digital:** Desi Purwo Wijianto.

Staf Redaksi: Syahruddin El-Fikri, Andi Nur Aminah, Andi Saubani, Agus Yulianto, Dewi Mardiani, Endro Yuwanto, Fitriyan Zamzami, Indira Rezkisari, Iwan Kelana, Isfar, Khoirul Anwar, Maman Sudiaman, Nashih Nashrullah, Nastalia Endah Hapsari, Nidia Zuraya, Ratna Puspita, Reiny Dwinanda, R Hilu Muhammad, Teguh Firmansyah, Wachidah Handasah, Yeyen Rostiyani, Yogi Ardhi Cahyadi, Abdullah Sammy, Agus Raharjo, Amri Amrullah, Ani Nursalikah, A Syalaby Ichsan, Bilal Ramadhan, Bowo Pribadi, Citra Listya Rini, Damawan, Desy Suciyawati, Djoko Suceno, Dwi Murdaningsih, Eko Widiyatno, Erdy Nasrul, Erik Purnama Putra, Esthi Maharani, Fernan Rahadi, Priska Yolandha, Chaun Ernold Alamsyah, Ulfa Sri Handayani, Arie Lukihardianti, Mohammad Akbar, Muhammad Fakhruddin, M Hafi, Nur Aini, Qommarria Rostami, Rusdy Nurdiansyah, Satya Restiani, Setyanavidita Livkacansera, Tahta Aidilla, Wildan Hidayat, Prayogi, Bambang Noroyono, Gita Amanda Jatmikawati, Satria Kartika Yudha, Rizky Jaramaya, Gilang Akbar Prambadi, Ri Laeny Sulistyawati, Nora Azizah, Lida Puspaningtyas, Desty Suciati Saputri, Ratna Ajeng Tejomoyo, Rejanta Widodo, Fuji Pratiwi, Mas Alamil Huda, Sadly Rahman, Agung Sasongko, Yudha Manggala Prana Putra, M Amin Madani, Rian Putra Pratama, Kartu Rukiyah Ulu, Puti Almas, Rahmat Fajar, Fauziah Marsid, Ali Mansur, Melisa Riska Putri, Umi Nur Fadhilah, M Rauf, Ridwan, Ahmad Fikri Noor, Eric Iskandarsyah, Kiki Sakinah, Lintar Satria Zulfikar, Eko Supriyadi, M Nur Ayami, Sapto Andika Candra, Binti Sholikah, Christyaningsih, R Sepsyaningsih, Dadang Kurnia, Adysha Citra R, Andrian Saputra, Dian Ratih Ritasari, Febrian, Fuji Eka Permana, Hasanul Rizqa, Intan Pratiwi, Reno Wulandhari, Rosi Handayani, Umar Mukhtar, Wida Rahyani, Anggoro Pramudya, Santi Sopia, Wisnu Aji Prasetyo, Frederikus Dominggus Bata, Wahyu Sunyoto, Rizkyan Adiyudha, Kamran Dikarma, Dwina Agustin, Matnuroh, Noer Qomariah Kusumawardhani, Rahayu Subekti, Ruly Suryandika, Sheila Ariani, Idealisa Masyafina, Muhyiddin, Ilham Tirta, Riga Nurul Iman, Edi Yusuf, Febrianto Adi Saputro, Ronggo Astungkoro, Dea Alvi Soraya, Gamaliel Kwadilyah, Rahma Sulistya, Novita Intan, Ferianto, Fakhtar Khoirun Kudes, Adinda Pryanka, Sarah Nabila Noersasha, Fergi Nadira, Hartifiany Praissa, Nasi Widyaningsih, Silvy Dian Setiawan, Zahrotul Oktavian, Muhammad Ikhwanuddin, Afrizal Rosikhul Ilmi, Mimi Kartika, Dedy Darmawan Nasution, Rori Anastasia Sidebang, Muslim Abdul Rahmad, Imas Damayanti, Bayu Adji Prihammanda, Haura Hafizhah, Muhammad Ruki Triyana Sata, Alkhaled Kurnialam, Febryan A, Nawir Arsyad Akbar, Zahwi Mahsir Ramadhan.

Alamat Redaksi: Jl. Warung Buncit Raya No. 37, Jakarta 12510
T. 021.780.3747 (Hunting), 021.791 84744 (Iklan)
F. 021.780.0643, 798 3625 (Redaksi), 021.798 1169 (Iklan), 021.791 98442 (Sirkulasi dan Berlangganan)
Email Redaksi Republika: sekretariat@republika.co.id.

Percetakan: PT Republika Media Mandiri Jl. Rawa Bali 2 No. 1 Kawasan Industri Pulogadung, Jakarta
Alamat Perwakilan:
Republika Jawa Barat: Jl. Mangga No. 47 Bandung 40114 T. 022.87243363-87243364, F. 022.87243365
Republika DIYogyakarta & Jatim: Jl. Pesisir No. 4, Kota Baru, Yogyakarta T. 0274.544 972, 566028, F. 0274.541.582 Surat Izin Usaha Penerbitan Pers: SK Menpen No. 283/SK/MENPEN/SIUP/PA.7/1992.
Anggota Serikat Penerbit Surat Kabar: Anggota SPS No. 163/1993/11/A/2012.

Komisaris Utama: R Harry Zulnardy
Komisaris: Adrian Syarkawi, Tjuk Agus Minahasa
Direktur Utama: Mira Rahardjo Djarot
Direktur Operasional: Aryo Hilman Nugraha
Direktur Konten: Irfan Junaidi

Manajer Senior Keuangan, SDM, dan Umum: Ruwito Birotowidjojo
Manajer Marketing Maman Sudiaman
Manajer Pengembangan Pasar Indra Wisnu Wardhana
Manajer Produksi: Nurrochim
Manajer Promosi dan Event: Hifi Kurniawan
Manajer TI: Mohamad Afif

Harga Berlangganan: Rp 120.000 per bulan.
Harga Eceran Pulau Jawa: Rp 5.500 per eksemplar.
Harga Eceran Luar Jawa: Rp 6.000 per eksemplar (tambah ongkos kirim).

Rekening Bank: a.n PT Republika Media Mandiri:
Bank BSM, Cab. Warung Buncit, No. Rek. 003.011.3448
Bank Mandiri, Cab. Warung Buncit, No. Rek. 127.00.0.424.0642
Bank Lippo, Cab. Warung Buncit, No. Rek. 727.30.028.988
Bank BCA, Cab. Graha Inti Fauzi, No. Rek. 375.305.6668
Bank BNI Syariah, Cab. Fatmawati, No. Rek. 021.139.3240

ALBERTO ESTEVEZ/EPA

LOLOS KE FINAL *Defender* Barcelona Gerard Pique (tengah) melakukan perayaan setelah mencetak gol kedua ke gawang Sevilla pada laga semifinal Copa Del Rey di Stadion Camp Nou. Dalam laga tersebut Barca menang 3-0 dan berhak melaju ke final setelah mengantungi kemenangan agregat 3-2.

Drama 30 Detik *Remontada* Barca

Momen *remontada* Barcelona sukses menyingkirkan Sevilla dari semifinal Copa Del Rey.

■ REJA IRFA WIDODO

BARCELONA — *Remontada* menjadi istilah populer di pentas sepak bola Eropa, setidaknya dalam empat tahun terakhir. *Remontada* secara harfiah dapat berarti "pemulihan" atau "kembali". Dalam konteks olahraga, *remontada* dapat diartikan keberhasilan sebuah tim membalikkan keadaan atau mengembalikan defisit, baik dari segi poin ataupun agregat gol.

Momen *remontada* itulah yang dilakoni Barcelona saat menyingkirkan Sevilla dari semifinal Copa Del Rey, Kamis (4/3). Sempat defisit dua gol dari pertemuan pertama, pasukan El Katalan akhirnya mampu membalasnya dengan kemenangan 3-0 pada laga kedua di Stadion Camp Nou.

Media asal Barcelona, *Mundo Deportivo*, menggambarkan perjuangan tim besutan Ronald Koeman di *leg* kedua semifinal Copa del Rey itu dengan menuliskan satu kata di halaman mukanya pada edisi Kamis waktu setempat, yaitu "Epik".

Cerita kepahlawanan dan drama menjadi salah satu bumbu utama dari *remontada*. Upaya tim yang tengah berada di posisi tertinggal hingga akhirnya bisa membalikkan keadaan selalu menyuguhkan kisah-kisah haru, heroik, dan dramatis.

Membuka keunggulan pada menit ke-12 lewat sepakan terarah kaki kanan Ousmane Dembele di tepi kotak penalti Sevilla, Barcelona masih membutuhkan dua gol tambahan untuk bisa lolos ke babak final Copa del Rey. Petaka nyaris menimpa Barcelona pada menit ke-73. Wasit memberikan tim tamu hadiah tendangan penalti setelah Oscar Mingueza menjatuhkan Lucas Ocampos.

Namun, Marc Andre Ter-Stegen tampil sebagai pahlawan Barcelona pada momen itu. Kiper asal Jerman itu dengan sempurna menangkap bola tendangan penalti Sevilla yang dieksekusi sendiri oleh Ocampos.

Lolos dari lubang jarum, Barcelona kian percaya diri. Namun, Barcelona baru benar-benar bisa mencintakan momen kebangkitan berselang 20 menit pascakegagalan Sevilla itu.

Momen kunci kebangkitan Barcelona tercipta saat laga tinggal tersisa 30 detik lagi, atau tepatnya pada *injury time* babak kedua. Tiga puluh detik menjadi batas antara kegagalan dan keberhasilan Barca tampil di partai puncak Copa de Rey. Sundulan Gerard Pique, setelah memanfaatkan umpan lambung Antoine Griezmann, menjadi pengubah skor agregat menjadi 2-2.

Alhasil, laga harus dilanjutkan ke babak tambahan waktu. Keberhasilan menyamakan agregat pada menit akhir babak kedua membuat Barcelona makin percaya diri menatap babak tambahan waktu, sekaligus menyelesaikan misi *remontada* di laga ini.

Babak tambahan baru berjalan satu menit, Barcelona kembali merobek gawang tim tamu dengan skema yang tidak jauh berbeda dengan gol kedua. Kali ini, umpan dari Jordi Alba dituntaskan sempurna oleh Martin Braithwaite. Tanpa menyertakan masa jeda menuju babak tambahan waktu, Barcelona bisa dibilang membalikkan keadaan hanya dalam hitungan kurang dari dua menit.

Sevilla sempat melakukan protes dan meminta penalti saat Clement Lenglet dinilai melakukan *handball* di kotak penalti pada menit ke-100. Wasit bergeming dan melanjutkan laga tanpa memberikan sanksi bagi Barcelona. Keputusan wasit itu diperkuat dengan hasil *review* VAR. Skor 3-0 dari laga tersebut sekaligus mengubah skor agregat menjadi 3-2 menjadi modal bagi Barcelona untuk menuju ke final.

"Kami tidak pernah ragu dan kehilangan keyakinan soal peluang lolos ke partai final. Ini adalah soal kekuatan mental. Ini menjadi malam terbaik saya sebagai pelatih Barcelona," kata pelatih Barcelona Ronald Koeman seusai laga, seperti dilansir *Mundo Deportivo*.

Pelatih Sevilla Julien Lopetegui tidak mau menambah polemik dengan mengkritik keputusan wasit di laga itu, termasuk soal kartu kuning kedua yang harusnya diterima Mingueza dan dugaan *handball* Lenglet. "Silakan menilai sendiri insiden itu. Anda punya hak menilai, seperti halnya saya. Saya tidak bisa berkomentar lebih banyak karena, Anda tahu, mereka bisa menjatuhkan sanksi kepada kami," kata Lopetegui seusai laga, seperti dilansir *Mundo Deportivo*.

Kegagalan ini diakui Lopetegui terasa menyakitkan. "Malam ini, kami menjadi korban dalam kekejaman itu. Ini adalah malam yang begitu buruk dan kejam," katanya. ■ ed: m akbar

Gary Neville Kritik Penampilan Setan Merah

■ RAHMAT FAJAR

LONDON — Manchester United (MU) semakin sulit mengejar pemuncak klasemen Manchester City seusai meraih hasil imbang tanpa gol melawan Crystal Palace dalam pertandingan Liga Inggris di Stadion Selhurst Park, London, Kamis (4/3) dini hari WIB.

Raihan hasil imbang itu pun langsung dikritik keras oleh legenda MU, Gary Neville. Mantan pemain bertahan Setan Merah itu menyebut aksi para pemain di lapangan layaknya orang yang tidur sambil berjalan.

"Mereka itu seperti tidur sambil berjalan dalam pertandingan. Mereka akan berakhir di balapan empat besar jika mereka tidak berhati-hati," kata Neville menilai hasil imbang yang didapatkan di kandang Palace.

Dengan hasil imbang tersebut, MU tertinggal 14 poin dari rival sekotanya, City. Sehari sebelumnya, City menang 4-1 atas Wolverhampton Wanderers.

Namun, MU masih sedikit beruntung karena posisinya di urutan kedua tak lepas dari genggaman. Penyebabnya, tim urutan ketiga, Leicester City, juga meraih hasil seri 1-1 di kandang Burnley.

Andai Leicester menang, MU sudah pasti tergusur ke urutan ketiga dengan selisih dua poin. Kendati demikian, hasil imbang tersebut membuat posisi MU saat ini semakin tidak aman. Pasalnya, potensi melorot ke luar empat besar terbuka lebar.

Leicester merupakan rival yang paling potensial menggusur MU karena hanya berselisih satu poin. Kemudian, ada West Ham United di posisi keempat yang terpaut enam poin. Chelsea, Liverpool, dan Everton tak bisa dilupakan oleh MU. Mereka masih berpeluang besar masuk ke posisi empat besar.

Pelatih MU Ole Gunnar Solskjaer mengakui, performa timnya akhir-akhir ini mengkhawatirkan. Ini semakin menipiskan mereka merebut gelar Liga Inggris. Oleh karena itu, Solskjaer mengatakan, pasukannya perlu menemukan semangat baru setelah laga melawan Palace.

"Ketika Anda memiliki tiga *clean sheet* berturut-turut, itu akan membantu Anda memenangkan pertandingan—tetapi kami belum menghasilkan kualitas. Kami hanya harus menemukan percikan lagi, kualitas lagi, dan mencoba memenangkan pertandingan," kata Solskjaer seusai pertandingan dilansir dari *BBC*.

Solskjaer jelas tak senang jika timnya tak menciptakan peluang yang cukup untuk memenangkan pertandingan. Meski demikian, pelatih asal Norwegia itu tetap memuji sikap pemainnya yang memberikan segalanya.

Solskjaer mengeklaim, tempo permainan MU melawan Palace hilang dan itu bukan permainan terbaik Setan Merah. Menurut dia, Roy Hodgson selalu membuat tim yang sulit ditaklukkan. Setelah laga tersebut, Solskjaer akan mencoba mencari solusi untuk kembali ke jalur kemenangan.

Mantan bek MU Gary Neville turut berkomentar tentang performa MU seusai bermain imbang melawan Palace. Ia menyebut MU seperti "berjalan sambil tertidur". Itu artinya MU bermain tanpa arah yang jelas. Sekarang performa yang mereka tunjukkan telah memberikan dorongan bagi rival di empat besar untuk menggusur mereka.

"Apa yang ditunjukkan MU di kandang Palace bukanlah permainan yang bagus. Penampilan mereka sungguh membosankan," kata Neville.

■ ed: m akbar

Timnas Gagal Tanding, Pengamat: Memalukan!

■ AFRIZAL ROSIKHUL ILMI

JAKARTA — Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) menuai kritik setelah laga uji coba antara tim nasional U-22 Indonesia melawan Tira Persikabo gagal digelar. Laga tersebut dijadwalkan bergulir di Stadion Madya, Jakarta, Rabu (3/3) malam WIB. Namun, laga dipastikan batal beberapa saat sebelum *kick-off* karena PSSI belum mengantongi izin dari kepolisian.

Pengamat sepak bola nasional Akmal Marhali mengatakan, itu adalah hal yang sangat memalukan bagi federasi sepak bola Indonesia. Ia menyebut itu terjadi karena kebodohan dan kelalaian PSSI. Menurut dia, kejadian tersebut akan membuat kepercayaan publik kepada PSSI semakin berkurang.

"Kasus ini harus menjadi pelajaran bagi PSSI dan juga PT LIB agar tidak menganggap remeh perizinan meskipun secara umum pihak kepolisian sudah merestui sepak bola bisa kembali digelar," kata Akmal saat dihubungi, Kamis (4/3).

"Ini sangat memalukan. Akibat menganggap sepele, *trust* ke PSSI jadi semakin rendah, dan ini tidak boleh terulang lagi, apalagi dalam kondisi yang *extraordinary* seperti saat ini," tambahnya.

Timnas U-23 juga dijadwalkan untuk uji coba kedua melawan Bali United, Jumat (5/3), di tempat yang sama. Namun, dengan batalnya laga uji coba melawan Tira Persikabo, laga melawan Bali United juga menghadapi ketidakjelasan. Akmal mengatakan, PSSI seharusnya bisa bertindak lebih profesional.

"PSSI harus menjadi contoh (teladan) anggotanya. Komunikasi kepada pihak terkait harus dijalankan dengan baik. Jangan anggap sepele, semua aturan harus dijalankan dengan benar. Agar kasus batalnya laga timnas tak berulang, PSSI harus segera melakukan langkah-langkah perizinan mulai hari ini untuk Piala Menpora," katanya.

PSSI pun telah mengakui kelalaian mereka yang baru mengurus izin pada siang harinya. Permintaan maaf disampaikan oleh Pelaksana Tugas Sekretaris Jenderal PSSI Yunus Nusi. PSSI menyadari kesalahan mereka sehingga Mabes Polri belum mengizinkan pertandingan. "Mungkin karena izin kami terlalu mendadak sehingga Mabes Polri perlu melakukan kajian lebih mendalam sebelum mengeluarkan izin," kata Yunus. "Dengan ini, PSSI meminta maaf kepada Mabes Polri yang sudah direpotkan."

Hingga saat ini belum ada kepastian mengenai penjadwalan ulang laga uji coba tersebut. Yunus mengatakan kepada *Republika*, hal itu akan disampaikan langsung oleh Ketua Umum PSSI Mochamad Iriawan.

Namun, Direktur Teknik PSSI Indra Sjafri kedapatan mengunggah foto melalui status di *Instagram* pribadinya pada Kamis (4/3) siang dengan tulisan, "Alhamdulillah uji coba melawan Tira Persikabo tanggal 5 Maret dan Bali United 7 Maret."

Namun, tak lama kemudian unggahan itu sudah dihapus. "Belum. Tunggu saja," kata Indra ketika dikonfirmasi mengenai kepastian penjadwalan ulang laga uji coba timnas U-22. ■ ed: m akbar

BINTANG MUSLIM

Brahim Diaz, Talenta Muslim dari Rossoneri

■ OLEH **ANGGORO PRAMUDYA**

Muncul sebagai pemain muda yang memiliki segudang bakat mumpuni, nama Brahim Diaz sempat menggguncang jagat sepak bola Benua Biru pada era *kiwari*. Bahkan, transfer Diaz dari Manchester City ke klub raksasa Spanyol Real Madrid pada musim panas 2018/2019 lalu menunjukkan Los Merengues sedang membangun proyek jangka panjang.

Namun, ketatnya persaingan di *skuad* utama, pelatih Madrid Zinedine Zidane memutuskan untuk melepas Diaz ke AC Milan dengan status pemain pinjaman. Pesepak bola berusia 21 tahun tersebut menjalani masa sekolah bersama I Rossoneri sampai akhir musim 2020/2021 nanti.

Bergabung dengan Franck Kessie dan kawan-kawan, Diaz sejauh ini mampu menunjukkan permainan impresif. Pemain yang bermain pada posisi *playmaker* ini telah berkontribusi dalam 25 pertandingan dengan total mengemas empat gol dan dua *assist* di semua pertandingan kompetitif Rossoneri.

Teranyar, Diaz membantu timnya ketika menjamu Udinese dalam lanjutan pekan ke-25 Seri A Italia pada tengah pekan. Meski gagal mengantongi poin sempurna, penampilan Diaz yang menggantikan peran Hakan Calhanoglu terbilang cukup apik.

Diaz turun dengan rentang waktu 63 menit dan melepas satu tembakan tepat sasaran, dengan umpan akurat menyentuh 93,9 persen. Itu tertinggi kedua setelah Franck Kessie pada laga saat itu.

Menyaksikan Diaz bermain, jelas membutuhkan kesabaran untuk melihatnya berproses. Melihat pemain berdarah Muslim ini berada dalam level tertinggi, ia selayaknya Cristiano Ronaldo, pun Andres Iniesta.

Sementara itu, dilansir dari berbagai sumber, Brahim lahir dari ayah yang berasal dari Melilla, sedangkan ibunya berasal dari Malaga. Darah Muslim berasal dari neneknya yang merupakan warga Maroko.

Dirinya memulai karier sepak bola pada 2010 di akademi Malaga—salah satu wilayah Spanyol yang kental dengan penduduk Muslim. Tiga tahun berselang, dia memutuskan hijrah ke Manchester City.

Maka tak mengherankan darah Muslim begitu kental dalam diri pemain bernama lengkap Brahim Abdelkader Diaz itu. Bermigrasi dari Maroko ke Melilla, sebuah kota otonom Spanyol, Abdelkader sang ayah menjatuhkan pilihan untuk membesarkan Brahim Diaz dan saudaranya di sana.

Tumbuh di lingkungan keluarga yang sederhana membuat Diaz menjadi pribadi yang tenang dan hal itu terlihat dari aktivitas sehari-harinya yang tidak melulu memamerkan barang mewah, seperti mobil *sports*, pakaian dengan balutan kalung bermerek, pun acara pesta bersama teman di suatu klub malam.

Pesepak bola berzodiak Leo itu menyerap apa yang telah diajarkan Abdelkader untuk bisa tumbuh menjadi diri sendiri, dan bertanggung jawab dengan apa yang ia lakukan.

Kini menyeruak berbagai rumor bahwa Milan ingin mencari cara untuk bisa merekrut Diaz secara permanen dari Madrid pada musim panas nanti.

Memang perannya tidak terlalu vital seperti Zlatan Ibrahimovic atau Hakan Calhanoglu, tetapi Brahim tergolong sosok yang tepat untuk dimiliki Rossoneri. ■ ed: m akbar

FABRIZIO CARABELLI

● Brahim Diaz

Kejakgung: SP3 Wewenang Polisi

Sejauh ini pelimpahan berkas dari kepolisian tak ada kelanjutan.

■ BAMBANG NOROYONO, NAWIR ARSYAD AKBAR

JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejakgung) menyerahkan sepenuhnya kepada Polri untuk melanjutkan, ataupun menghentikan penyidikan dugaan penyerangan anggota kepolisian yang dilakukan Laskar Front Pembela Islam (FPI). Kepala Pusat Penerangan dan Hukum (Kapuspenkum) Kejakgung, Leonard Ebenezer mengatakan, tim penuntutan pada Jaksa Agung Muda Pidana Umum (Jampidum) hanya menunggu kepastian dari hasil penyidikan atas insiden, yang berujung pada penembakan mati enam anggota pengawal Habib Rizieq Shihab tersebut.

"Kewenangan (melanjutkan atau penghentian) ada pada pihak penyidik di kepolisian," kata Ebenezer kepada wartawan di Kejaksaan Agung (Kejakgung), Jakarta, Kamis (4/3).

Ebenezer mengatakan, sampai hari ini belum ada pernyataan resmi dari Polri kepada Jampidum di Kejakgung, menyangkut kelanjutan atau penghentian kasus yang terjadi di Tol Jakarta-Cikampek (Japek) KM 50, Desember 2020 tersebut. Namun, Ebenezer menerangkan, sebetulnya terkait kasus itu, Bareskrim Polri sudah pernah menyampaikan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada Jampidum pada 20 Desember 2020.

SPDP tersebut terkait dengan penetapan status hukum enam anggota laskar FPI yang ditembak mati oleh anggota kepolisian. Mengacu proses penyidikan, SPDP tersebut semestinya berlanjut dengan pelimpahan berkas ke penuntutan di Jampidum. Akan tetapi, 30 hari setelah penerbitan SPDP tersebut, Mabes Polri tak memberikan kabar lanjutan penyidikan kasusnya.

Atas alasan itu, Jampidum-Kejakgung pada 19 Januari 2021 menerbitkan P-17 atau Permintaan Perkembangan Kasus ke Bareskrim Polri. "P-17 itu untuk menanyakan kepada penyidik (Polri) tentang perkembangan kasus tersebut," kata Ebenezer.

Meskipun begitu, sampai saat ini, P-17 Jampidum ke Bareskrim Polri itu tak ada kelanjutan. "Oleh sebab itu, selanjutnya kewenangan itu, ada di kepolisian," katanya.

> **Ini karena jika penyidikan terus dilakukan pun, penuntutan tidak dapat dilakukan karena ada ketentuan Pasal 77 KUHP.**

Bareskrim Mabes Polri pada Kamis (4/3), resmi menghentikan penyidikan dugaan penyerangan terhadap anggota kepolisian, yang dilakukan oleh enam anggota laskar FPI. Penghentian penyidikan tersebut setelah Bareskrim Polri pada Rabu (3/3), menerangkan status tersangka terhadap enam anggota laskar tersebut.

Meskipun dihentikan, Mabes Polri mengatakan, tetap akan melanjutkan irisan lain kasus tersebut, yang terkait dengan pelanggaran hak asasi manusia (HAM). Juru Bicara Mabes Polri, Irjen Argo Yuwono mengatakan, penyidikan pelanggaran HAM yang dilakukan anggota kepolisian tetap berjalan.

Saat ini, menurut dia, sudah ada laporan kepolisian (LP) atas dugaan pelanggaran HAM *unlawful killing* terkait kasus enam laskar FPI tersebut. Sudah tiga anggota kepolisian yang berstatus terlapor terkait pelanggaran HAM tersebut. Desakan untuk mengungkap pelanggaran HAM dalam tewasnya enam anggota laskar FPI tersebut, sesuai dengan rekomendasi dari hasil penyelidikan Komnas HAM. "Rekomendasi dan temuan Komnas HAM kami sudah jalankan. Saat ini, masih terus berproses," kata Argo, Kamis (4/3).

Anggota Komisi III DPR Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani juga mengkritik penetapan tersangkat terhadap korban penembakan. Menurutnya, hal tersebut tidak tepat menurut hukum.

"Memang dalam Pasal 77 KUHP digunakan kata penuntutan, bukan penyidikan. Akan tetapi, karena proses perkara pidana dimulai dari penyelidikan dan penyidikan dan kemudian berlanjut dengan penuntutan sebagai proses yang tidak terpisah satu sama lain," ujar Arsul saat dihubungi, Kamis (4/3).

Apabila tersangka meninggal dunia pada saat proses penyidikan, kata Arsul, logika hukumnya kelanjutan proses pidana tidak perlu dilanjutkan atau gugur. Jika penyidikan terus dilakukan pun, penuntutan tidak dapat dilakukan karena ada ketentuan Pasal 77 KUHP. "Ini karena jika penyidikan terus dilakukan pun, penuntutan tidak dapat dilakukan karena ada ketentuan Pasal 77 KUHP," ujar Arsul.

Ia mengingatkan Bareskrim Polri atas Putusan MK-RI Nomor 21/PUU-XII/2014 pada 28 April 2015, yang meletakkan dua kerangka konstitusional dalam soal penetapan tersangka.

Pertama ialah keharusan dua alat bukti, sedangkan kedua yakni adanya pemeriksaan terlebih dahulu terhadap calon tersangka. "Kalau yang jadi calon tersangka sudah meninggal maka tidak mungkin diperiksa," ujar Wakil Ketua Umum PPP itu.

■ **ed:** satria kartika yudha

Jamaah Haji RI Prioritas Divaksin.....dari hlm 1

Terlepas jamaah jadi berangkat atau tidak," ujarnya, kemarin.

"Vaksin adalah salah satu upaya preventif terhadap penyakit infeksi menular. Saat ini, Indonesia sedang berupaya keras melindungi rakyatnya dari proses transmisi penyakit Covid-19 melalui vaksinasi," kata dr Eka melanjutkan.

Ia juga menyebut, saat ini hampir semua negara menganjurkan rakyatnya untuk melakukan vaksinasi. Adalah hal yang wajar jika Saudi meminta seluruh negara yang akan mengirimkan jamaahnya berhaji untuk divaksinasi.

Kewajiban vaksinasi Covid-19 ini disebut sama dengan vaksinasi meningitis. Vaksin tersebut wajib diberikan kepada jamaah yang akan berangkat ke Saudi, baik untuk menjalankan ibadah haji maupun umrah. "Kemenkes menyiapkan vaksinasi Covid-19 secara umum bagi WNI, termasuk CJH (calon jamaah haji)," kata dr Eka.

Menteri Kesehatan Arab Saudi sebelumnya dilaporkan mempertimbangkan untuk mewajibkan vaksinasi bagi semua jamaah yang akan melakukan haji pada tahun ini. "Vaksinasi akan menjadi syarat utama untuk berpartisipasi (ibadah haji)," kata Menteri Kesehatan Arab Saudi Tawfiq al-Rabiah, seperti dilaporkan surat kabar Saudi, *Okaz*, Selasa (2/3).

Dalam memo internal yang dilihat oleh *Okaz*, Tawfiq al-Rabiah mengatakan, vaksinasi perlu diterapkan kepada semua yang mengambil bagian dalam pelaksanaan haji. Ia juga mengarahkan staf untuk membentuk komite vaksinasi korona bagi jamaah haji sebelum musim haji pada Juli mendatang.

Sebelum pandemi Covid-19, Saudi mampu menerima hingga 2 juta jamaah haji. Musim haji tahun lalu, jumlah jamaah turun drastis karena Saudi hanya mengizinkan 10 ribu jamaah. Tahun ini belum ada pemberitahuan berapa banyak jamaah yang akan diizinkan berhaji. Sementara, sejak umrah kembali diizinkan pada Oktober 2020, sebanyak 5 juta jamaah telah diterima Saudi.

Konsul Haji Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Jeddah Endang Jumali menyebut, hingga saat ini masih belum ada negara yang melakukan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dengan penyedia layanan di Saudi untuk pelaksanaan haji."Sampai saat ini komunikasi tetap jalan. Namun, belum ada kepastian," katanya saat dihubungi *Republika*, Kamis (4/3).

Untuk diketahui, pada 2020 lalu Indonesia sudah sempat melakukan survei terhadap beberapa penyedia layanan di Saudi. Namun, seiring perkembangan Covid-19 di dunia dan imbauan Saudi untuk menunda penandatanganan kontrak, Indonesia belum memberikan keputusan lebih lanjut.

Terkait kewajiban vaksinasi bagi jamaah haji, Endang menyebut, masih belum menerima keterangan resmi atas hal tersebut. Saudi sebelumnya mengeluarkan pernyataan akan mempertimbangkan mewajibkan vaksinasi bagi jamaah.

"Kami belum menerima informasi terkait hal tersebut. Kementerian Kesehatan Saudi hari ini baru merilis kalau vaksin tersedia di apotek," ujarnya.

■ **ed:** fitriyan zamzami

Perketat Pengawasan Peredaran Miras.....dari hlm 1

nampakkan regulasi yang pengawasannya sangat lemah," kata dia.

Kendati demikian, Jasra mengapresiasi kebijakan Presiden Joko Widodo yang mencabut aturan investasi industri miras. Langkah tersebut dinilai tepat untuk menjaga keselamatan anak.

"Sebagaimana kita ketahui, tidak dilegalkan saja, berbagai produk minuman keras dan sejenis telah mengorbankan anak-anak," kata Jasra.

Jasra berharap, produk yang dibatasi karena merusak lingkungan, merugikan kesehatan, dan harus dijauhkan dari anak-anak harus diawasi dengan baik. Jangan sampai peraturan hanya sebatas pada pelarangan, tapi tidak ada pengawasannya. Meskipun memberikan pendapatan untuk pemerintah, ia berpesan agar pemerintah tak lengah terkait pengawasan peredaran miras, khususnya bagi anak-anak.

Ihwal peredaran miras diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol.

Dalam Pasal 3 beleid tersebut dijelaskan, minuman beralkohol yang diproduksi di dalam negeri atau diimpor dikelompokkan ke ke dalam tiga golongan. Yaitu minuman beralkohol golongan A (mengandung etil alkohol atau etanol dengan kandar sampai dengan 5 persen), minuman beralkohol B (kadar lebih dari lima persen sampai dengan 20 persen), dan minuman beralkohol golongan C (kadar lebih dari 20 persen hingga 55 persen).

Sementara, dalam Pasal 7 ditetapkan, minuman beralkohol golongan A-C hanya dapat dijual di hotel, bar, dan restoran yang memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang kepariwisataan. Selain itu, miras hanya dapat dijual di toko bebas bea serta tempat tertentu yang ditetapkan oleh bupati/wali kota dan gubernur untuk DKI Jakarta.

Penjualan atau peredaran minuman beralkohol di tempat tertentu tidak boleh berdekatan dengan tempat peribadatan, lembaga pendidikan, dan rumah sakit. Sedangkan, miras golongan A dapat dijual di toko pengecer dalam bentuk kemasan.

Perpres tersebut yang kini juga menjadi sorotan setelah Presiden Joko Widodo mencabut lampiran III butir 31-33 dalam Perpres Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal. Dalam lampiran tersebut, investasi industri miras mengandung alkohol, industri minuman anggur, dan industri minuman mengandung malt bisa dilakukan di Provinsi Bali, NTT, Sulawesi Utara, dan Papua.

Namun, belum ada kejelasan soal apakah pemerintah mencabut aturan soal peredaran miras dan peredaran eceran miras, yang juga diatur dalam perpres tersebut. PBNU sempat meminta agar pemerintah mencabut keseluruhan poin soal miras di dalam lampiran perpres tersebut karena khawatir soal efek peredaran miras eceran.

Mantan ketua Mahkamah Konstitusi Hamdan Zoelva pada Rabu (3/3) menilai, pencabutan aturan secara lisan soal investasi miras belum cukup. Tokoh yang juga menjabat pimpinan pusat/Lajnah Tanfidziyah Syarikat Islam ini juga meminta presiden memberi penegasan bahwa industri minuman keras tertutup total untuk seluruh bidang usaha investasi.

"Karena jika tidak ditegaskan akan menimbulkan penafsiran bahwa minum keras akan masuk pada bidang usaha lain yang bisa dimaknai sebagai bidang usaha yang terbuka untuk investasi," ujar Hamdan, Rabu (3/3) petang.

Tak hanya itu, Hamdan juga mengingatkan presiden agar memperhatikan distribusi miras eceran yang selama ini masih bisa ditemui. Poin soal perdagangan eceran dan kaki lima untuk miras atau minuman beralkohol memang diatur dalam Perpres 10 Tahun 2021.

Hal tersebut diatur dalam butir 44 dan 45, lampiran III Perpres 21 Tahun 2021. Menurut dia, presiden juga perlu menegaskan bahwa tidak hanya investasinya yang ditutup, tetapi juga perdagangan eceranya dilarang.

Tetap produksi

Sementara, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur memastikan para pelaku industri kecil menengah (IKM) di provinsi itu tetap beroperasi melakukan kegiatan produksi dan penjualan, tapi tetap dalam pengawasan pemerintah daerah.

"Dicabutnya perpres tentang investasi minuman beralkohol bukan berarti memutus hubungan kerja dengan IKM-IKM kita yang selama ini memproduksi alkohol. Mereka tetap beroperasi dalam pengawasan kita," kata Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT Nasir Abdullah.

Abdullah mengatakan, aktivitas penyulingan atau produksi minuman beralkohol yang dilakukan masyarakat NTT merupakan karya intelektual yang sudah ada sebelum adanya regulasi yang mengaturnya.

Sebelum adanya perpres yang akhirnya dicabut, dia melanjutkan, pemerintah provinsi sudah memiliki Peraturan Gubernur (Pergub) No 44 Tahun 2019 yang mengarah pada kontrol terhadap produksi.

"Pergub kita ini tidak untuk membangun legitimasi terhadap aktivitas investasi miras, tetapi mengarah pada bagaimana melakukan kontrol produksi yang sudah dibangun oleh masyarakat NTT," katanya.

Melalui pergub itu, kata dia, pemerintah provinsi juga melakukan pengawasan terhadap sistem distribusi miras. Abdullah menjelaskan, ketentuan terkait penjualan miras juga telah diatur, seperti tidak boleh dijual di dekat rumah ibadah, fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, perkantoran, dan sebagainya.

Dia menambahkan, produksi minuman keras di NTT seperti sopi atau moke tetap beroperasi karena merupakan sumber pendapatan untuk menghidupkan ekonomi rumah tangga sebagian masyarakat.

"Untuk meningkatkan derajat produk miras, pemerintah provinsi juga sudah meluncurkan standar minuman pada 2019 lalu melalui proses uji laboratorium bersama Universitas Nusa Cendana (Undana) dan menghasilkan produk yang dinamakan Sophia," katanya.

■ antara **ed:** satria kartika yudha

6 Mendiang FPI Tersangka, Kasus Disetop.....dari hlm 1

Aparat berdalih pembunuhan itu dipicu perlawanan pihak yang ditahan. Namun, Komnas HAM menyimpulkan bahwa penembakan itu merupakan pelanggaran HAM berat dan para petugas yang terlibat harus diseret ke pengadilan.

Selepas penetapan tersangka terhadap para korban kemarin menimbulkan polemik, Bareskrim Polri resmi menghentikan penyidikan kasus tersebut. Dengan demikian, seluruh penyidikan perkara tersebut dan status tersangka pada enam almarhum laskar FPI tersebut sudah tidak berlaku di mata hukum.

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Argo Yuwono menjelaskan, penghentian kasus ini sebagaimana tertuang dalam Pasal 109 KUHP karena tersangka sudah meninggal dunia. "Kasus penyerangan di Tol Jakarta-Cikampek dihentikan. Dengan demikian, penyidikan serta status tersangka sudah gugur," kata Argo dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Kamis (4/3).

Namun, di sisi lain, terkait dengan kasus ini, Argo menyebut, aparat kepolisian sudah menerbitkan laporan polisi (LP) soal dugaan adanya *unlawful killing* alias pembunuhan di luar proses hukum di kasus penyerangan laskar FPI tersebut. Setidaknya ada tiga polisi dari jajaran Polda Metro Jaya yang sudah berstatus terlapor.

Penerbitan laporan ini tampaknya dari instruksi Kapolri Jendral Listyo Sigit Prabowo untuk menjalankan rekomendasi dan temuan dari Komnas HAM. "Rekomendasi dan temuan Komnas HAM, kami sudah jalankan. Saat ini masih terus berproses," ujar Argo.

Hal senada juga disampaikan oleh Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Rusdi Hartono. Menurut dia, tiga anggota polisi yang sudah berstatus sebagai terlapor sebagai tindak lanjut dari rekomendasi Komnas HAM yang telah melakukan investigasi independen.

Tentunya, Rusdi menyebut, anggota yang berstatus akan melalui mekanisme, melalui sidang etik, dan saat ini proses masih berjalan. "Anggota diberhentikan itu harus melalui proses. Sementara ini masih dilakukan proses oleh Propam dan tentunya oleh Dittipidum," ujar Rusdi menegaskan.

Wakil Ketua Lembaga Pengawasan dan Penegakan Hukum Indonesia (LP3HI) Kurniawan Adi Nugroho menyoroti keputusan Bareskrim Polri menetapkan enam mendiang laskar FPI tersebut.

Penetapan tersangka tersebut dianggap hanya untuk melempar bola api ke kejaksaan. "Semua penegak hukum paham bahwa perkara otomatis akan dihentikan jika tersangkanya meninggal," kata Kurniawan saat dikonfirmasi, Kamis (4/3).

Lebih lanjut, Kurniawan menilai, penyidik sempat tidak ingin surat penghentian penyidikan perkara (SP-3) dikeluarkan oleh mereka. Permasalahannya, kata Kurniawan, apakah penetapan tersangka itu sah, jika para tersangka tidak pernah diperiksa sebagai saksi? "Dan bagaimana dengan rekomendasi Komnas HAM yang menyatakan ada indikasi *unlawfull killing* terhadap empat orang anggota FPI yang juga tersangka itu?" tanya Kurniawan.

Kurniawan menaruh curiga, pemaksaan penetapan tersangka itu untuk memberikan jalan keluar agar rekomendasi Komnas HAM tidak dilanjutkan. Yaitu dengan membangun logika polisi menembak dalam rangka menjalankan perintah jabatan.

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) juga menilai penetapan tersangka kemarin berbahaya dan harus dihentikan. "Agar tidak semakin merusak prinsip negara hukum dan tidak membuat masyarakat makin tidak percaya hukum," ujar Ketua Bidang Advokasi YLBHI, Muhammad Isnur, dalam keterangan tertulis, Kamis (4/3).

Isnur mengatakan, YLBHI memandang penetapan tersangka tersebut sangat aneh dan bertentangan dengan pengaturan dan prinsip hukum acara pidana. "Pasal 77 KUHP menyebutkan 'kewenangan menuntut pidana hapus, jika tertuduh meninggal dunia'. Jika mengikuti 'permainan' kepolisian dalam kasus enam orang FPI, seharusnya kepolisian juga meneruskan kasus Soeharto dan lain-lain," ungkap dia.

Syuhada, ayahanda almarhum Faiz Ahmad Syukur, salah satu korban penembakan, menyatakan kebingungan dengan tindakan kepolisian menetapkan almarhum anaknya sebagai tersangka.

"Bingung karena orang meninggal *kok* jadi tersangka? Pasalnya apa? Itu *kan* untuk orang yang masih hidup. Itu mah terserah mereka, atur saja sendiri, mau *gimana* pun terserah," kata Syuhada saat dikonfirmasi, Kamis (4/3).

Hal yang jelas, Syuhada menyebut, dia sudah bermubahalah alias menjalankan sumpah keberaran. Dia mengingatkan bahwa Allah adalah hakim yang Mahaadil dan tidak pernah tidur. ■ melliza laveda **ed:** fitriyan zamzami

NAHALA GOLDY

Kesemutan dan Panas Dalamnya tak Muncul Lagi dengan Madu Berhadiah Cerpen Ini

Hujan gerimis deras amat
Ada kilat yang bertabrakan
Madu hitam bersama garut
Minuman herbal tak ada lawan

Mari inda

Dalam mencari nafkah, seorang wanita yang bernama Marlinda bekerja sebagai petani. Karena pekerjaan itu mengeluarkan banyak tenaga di medan yang panas, ibu dua anak itu sering merasakan kesemutan dan panas dalam. Bahkan, bila kambuh, ia sering merasa mau muntah. Meski sudah berobat ke bidan desa, keluhannya itu tak kunjung hilang. Lalu, perempuan 45 tahun itu ditawari Nahala Goldy dari seorang anaknya. Karena penasaran, ia rutin mengonsumsi minuman kesehatan itu tiga kali sehari. Ternyata, hasilnya memuaskan. "Sekarang kesemutan dan panas dalam itu tidak kambuh lagi. Selain itu, badan saya terasa lebih sehat dan segar," ucap penduduk Desa Talang Leak II, Kecamatan Bingin Kuning, Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu, ini saat ditemui 24 November 2020.

Kesehatan merupakan hal penting yang harus kita miliki dalam hidup. Dengan memiliki tubuh yang bugar, kita akan lebih produktif dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Lalu, bagaimana cara agar tetap sehat dan bugar sepanjang hari? Tentu **banyak. Yang utama adalah menjalankan pola hidup sehat, seperti berolahraga dengan teratur, berketahat dengan cukup, tidak** mengonsumsi alkohol, tidak merokok, serta rajin mengonsumsi minuman kesehatan. Contohnya Nahala Goldy.

Nahala Goldy terbuat dari madu hitam pahit yang dikombinasikan dengan ekstrak garmat emas, propolis trigona, daun insulin, daun sambiloto, dan minyak habbatussauda. Berbeda dengan produk lain, di setiap kotak Nahala Goldy terdapat cerita pendek lucu dengan episode yang diacak. Cerita itu ditulis oleh penulis fiksi profesional yang dulu pernah menulis ratusan episode sikenario sinetron komedi dalam **kurun waktu yang lama di layar televisi Anda. Jadi, dengan membeli produk ini, Anda tak hanya mendapatkan madunya tapi juga** hiburan. Dan, orang yang sering terhibur serta ceria biasanya akan lebih sehat dan cepat sembuh daripada orang yang selalu gundah dan resah gelisah.

Selain itu, dengan membeli Nahala Goldy, Anda berpotensi mendapatkan hadiah menarik. Bila berhasil mengumpulkan cerpen itu 10 episode berurutan, Anda berhak mendapatkan hadiah mulai dari 10 botol Nahala Goldy, HP, emas, hingga sepeda motor. Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi *www.nahalagoldy.com* serta Instagram *@nahalagoldyofficial*.

Info Lebih lanjut Hubung: 0852 7454 0575

Jakarta Timur	: 0822 8407 7773	Jakarta Barat	: 0895 3563 0982	Depok	: 0812 1034 4355
Jakarta Selatan	: 0811 9069 625	Jakarta Barat	: 0895 3563 0982	Bekasi	: 0813 8948 3376
Jakarta Pusat	: 0896 1803 1776	Tangerang Banten	: 0857 7999 979	Bogor	: 0813 8807 1248

PUTRA M. AKBAR/REPUBLIKA

SUMUR RESAPAN Petugas menyelesaikan pembuatan sumur resapan di kawasan Karet, Jakarta Pusat, Kamis (4/3). Pemerintah Provinsi DKI Jakarta baru membuat 3.964 sumur resapan atau 0,2 persen dari target kebutuhan 1,8 juta sumur resapan sebagai salah satu cara menanggulangi banjir dengan pendekatan ekologis.

Pembacok Polisi Selalu Mabuk Kala Beraksi

Pimpinan *geng* motor pembacok Aiptu Dwi mengaku menyesal.

■ FEBRYAN A

JAKARTA — Tim gabungan meringkus dua pimpinan *geng* motor yang membacok Aiptu Dwi Handoko. Personel Polsek Menteng tersebut menjadi korban pembacokan di Jalan Proklamasi, Kelurahan Pegangsaan, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat (Jakpus), Ahad (28/2) sekitar pukul 04.30 WIB. Dari hasil penyelidikan dan keterangan saksi, Aiptu Dwi dibacok oleh kawanan *geng* motor ENJOY MBR 86.

Kapolsek Menteng AKBP Iver Son Manossoh, menjelaskan, dua pimpinan geng motor tersebut bersama anggotanya selalu menenggak minuman keras (miras) sebelum beraksi di jalanan. Pihaknya juga mendapat informasi, kelompok ENJOY MBR 86 kerap terlibat bentrokan dengan kelompok lain maupun warga di Jakarta. Tujuan membuat onar itu lebih menunjukkan kehebatan atau keberanian anggota *geng* motor.

Menurut Iver, sebelum bentrok, mereka biasanya berkumpul di markas yang merupakan gudang tua di Muara Baru, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara. "Di sana mereka minum minuman keras. Mereka konsumsi itu sehingga sebelum melakukan aksi mereka menjadi bertambah berani," kata Iver di Markas Polres Metro (Polrestro) Jakpus, Kamis (4/3).

Ketika melukai Aiptu Dwi, kata Iver, anggota *geng* motor tersebut juga dalam kondisi mabuk. Ketika itu, mereka berkonvoi terdiri 35 hingga 40 orang sembari membawa senjata tajam. Korban dibacok setelah berupaya menghentikan serangan *geng* motor kepada warga setempat. Aiptu Dwi mendapat luka di kelingking kanannya saat merebut celurit yang dibawa para pelaku.

Tiga hari seusai kejadian, tepatnya pada Rabu (3/3), aparat Polsek Menteng dan Polrestro Jakpus menciduk pelaku pembacokan, yaitu RD (22 tahun) dan LO (21). Keduanya beralamat di Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara. "(Dua pelaku ini) pimpinan *geng* motor tersebut. Bukan anggota. RD berperan sebagai penggerak dan posisinya paling depan sembari bawa celurit ukuran besar," ucap Iver.

Pihaknya belum mengetahui sejak kapan kelompok ENJOY MBR 86 eksis. Iver menyebut, kedua tersangka itu mengaku baru aktif sekitar sebulan di *geng* motor. Hanya saja, penyidik tidak gampang percaya dengan pengakuan tersebut.

Iver menjelaskan, penyidik sudah mengetahui metode rekrutmen anggota *geng* motor. Dia menyatakan, tidak ada persyaratan khusus bagi orang luar yang ingin bergabung ke ENJOY MRB 86. "Hanya ada satu saja syaratnya, pemberani. Siapa yang pemberani silakan datang. Itu syarat yang diminta pimpinannya kepada calon anggota *geng* ini," ungkap Iver.

Atas perbuatan keduanya, RD dan LO dijerat pasal berlapis, yaitu Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat 1951 tentang senjata tajam dengan ancaman 10 tahun penjara dan atau Pasal 170 KUHP dengan ancaman kurungan lima tahun enam bulan penjara.

Buru anggota

Penangkapan pimpinan *geng* motor tidak membuat kasus itu berhenti. Iver menambahkan, penyidik masih berusaha mengidentifikasi puluhan identitas pelaku yang ikut beraksi mengganggu warga. Pihaknya berjanji bakal mengusut semua yang terlibat dalam penyerangan kepada warga, yang membuat Aiptu Dwi menjadi korban pembacokan.

"Siapa saja dan peran satu persatu. Segera akan kami jadikan DPO (daftar pencarian orang). Lalu akan kami buru untuk mempertanggungjawabkan perbuatan mereka," ujar Iver.

Sejauh ini, polisi telah mendeteksi lokasi markas, akun *Instagram*, dan metode rekrutmen kelompok ENJOY MBR 86. Termasuk sumber dana dan tempat mereka membeli senjata tajam juga sudah diketahui.

Iver menjelaskan, polisi ingin memburu anggota *geng* motor tersebut untuk mencegah mereka beraksi kembali. Dengan begitu, mereka tidak lagi menggelar tawuran atau menyerang warga yang bisa menyebabkan korban jiwa maupun korban luka.

Pimpinan *geng* motor RD, mengaku menyesal telah membacok Aiptu Dwi. Dia pun menyampaikan permintaan maaf kepada kepala Polsek Menteng selaku atasan korban.

"Saya Rendi ingin minta maaf ke Aiptu Dwi karena saya sudah melukai tangannya atau jarinya. Saya sangat menyesal," kata RD dengan kepala tertunduk saat rilis di Markas Polrestro Jakpus.

RD mengatakan, tidak tahu jika yang diserangnya adalah aparat. Selain itu, RD mengaku baru sebulan terakhir terlibat di *geng* motor. Disinggung mengapa ketika konvoi ramai-ramai membawa celurit, RD menepis jika hal itu untuk membuat onar. "Saya ikut *geng* motor hanya untuk jalan-jalan saja," kata RD yang tampak mengenakan baju tahanan dan tangannya diborgol.

■ ed: erik purnama putra

KILAS

Kebakaran Hanguskan Empat Gudang di Tangerang

TANGERANG — Insiden kebakaran terjadi di kawasan pergudangan Pantai Indah Dadap, Kelurahan Kosambi, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Banten, Kamis (4/3) pagi WIB. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Tangerang melaporkan, api setidaknya menghanguskan empat gudang yang ada di kawasan tersebut.

Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Tangerang Kosrudin mengatakan, insiden tersebut terjadi sekitar pukul 07.00 WIB. Tiba-tiba saja, ada saksi mata melihat kebakaran dan melaporkannya ke petugas.

Menurut dia, empat gudang yang terbakar diketahui menjadi gudang alat-alat rumah tangga. "Itu milik tiga perusahaan. Kalau saya lihat tadi itu gudang alat-alat rumah tangga seperti dispenser, kompor gas, blender. Di gudang dua ada lima mobil angkut barang juga terbakar," ujar Kosrudin ketika dikonfirmasi, Kamis.

Gudang yang terbakar diketahui milik PT Wen Jaya, Jiang Men Electronik, dan PT KMA Plastik. Kosrudin menuturkan, sebanyak 12 mobil pemadam kebakaran dikerahkan menuju ke lokasi kejadian. Adapun personel yang dikerahkan sekitar 50 hingga 60 orang, karena kebakaran bangunan cukup hebat.

Nasrudin menyebut, petugas butuh waktu sekitar lima jam untuk memadamkan api. "Api sudah dikuasai, tinggal pendinginan. Kondisinya ambruk, habis total," ujarnya.

Terkait penyebab kebakaran, Kosrudin menduga sumber api berasal dari mesin bubutan di gudang satu yang menyambar bahan bakar. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam insiden itu. Hanya saja, taksiran sementara kerugian yang dialami pemilik gedung total mencapai Rp 7 miliar. "Kalau hitungan saya, bangunan teknis *sih* minimal satu bantunan Rp1 miliar, belum lagi lima mobil, harga satuannya kira-kira Rp 200 jutaan. Jadi, totalnya bisa Rp 5 miliar hingga Rp 7 miliar," ujar Kosrudin. ■ eva rianti ed: erik purnama putra

Korban Laporkan Oknum Lurah Mesum ke Polisi

BEKASI — Kasus pelecehan seksual yang diduga dilakukan oleh lurah di Kota Bekasi, Jawa Barat, mencuat ke permukaan. Hal itu bermula dari adanya laporan seorang perempuan berinisial ER (24 tahun), pedagang minuman di dekat kantor kelurahan.

Laporan yang dibuat sejak Jumat 11 Desember 2020, dengan Nomor LP/2784/K/XII/2020/SPKT/ Resort Metro Bekasi Kota, hingga kini masih dalam penyelidikan polisi. Kasus itu, sebelumnya sempat dimediasi terlebih dulu. Menurut pengakuan ER, sebenarnya kasus itu bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Tetapi, kata dia, terduga pelaku tidak mau minta maaf dan mengakui perbuatan mesumnya dalam proses mediasi.

"Saya sudah bilang sama mediator, kalau bisa kekeluargaan, tapi pas mediasi dia tidak mau mengakui. Makanya saya bikin laporan ke polres," kata ER di Kota Bekasi, belum lama ini.

ER mempertanyakan mengapa belum ada perkembangan kasusnya di Polres Metro Bekasi Kota. Dia mengaku, sudah bertanya langsung kepada penyidik, dan dijawab masih dalam tahap pemanggilan saksi. "Katanya masih *manggil-manggil* saksi. Terus saksi-saksinya belum pada hadir," ujar ER. Akibat kejadian itu, ER sudah tak lagi bekerja di warung dekat kelurahan. Dia mengaku sudah tidak nyaman lagi semenjak adanya insiden pelecehan.

Wakapolres Metro Bekasi Kota AKBP Alfian Nurrizal mengatakan, kasus itu masih dalam tahap penyelidikan. Alfian menuturkan, polisi harus mencari dua alat bukti untuk bisa memproses laporan itu. "Ini *kan* pelecehan, yang dilecehkan siapa, yang mengetahui secara saintifik harus dibuktikan," ujar Alfian.

■ uji sukma medianti ed: erik purnama putra

Anies Apresiasi Laporan Kinerja Komisi Informasi DKI

JAKARTA — Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan mengapresiasi laporan kinerja Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta terkait pelaksanaan implementasi keterbukaan informasi publik. "Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta bertanggung jawab atas kinerja dan kontribusi bergotong royong menghadapi pandemi Covid-19," kata Anies dalam siaran pers, di Jakarta, Kamis (4/3).

Anies menyatakan, 2020 merupakan tahun bersejarah karena datang wabah virus korona. Hal itu menyebabkan seluruh pihak terpanggil menghadapi masalah dan berbagai pihak berbagi memainkan peranan sesuai porsi masing-masing, termasuk Komisi Informasi DKI Jakarta. "Seluruh pihak bicaraksan secara bersama untuk masa depan," ujarnya.

Anies juga berterima kasih kepada komisioner Komisi Informasi DKI Jakarta yang berkontribusi dalam meningkatkan komitmen keterbukaan informasi publik. Hal itu sesuai dengan visi yang diembang Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

Ketua Komisi Informasi DKI Jakarta Harry Ara Hutabarat menuturkan, laporan kinerja tersebut sebagai bentuk komitmen dan disiplin lembaga yang bertanggung jawab kepada gubernur DKI Jakarta. Hal itu juga sesuai dengan amanat Pasal 28 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Selain Harry, mereka yang melapor kepada Anies adalah Wakil Ketua Harminus, Komisioner Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi Arya Sandhiyuda, Komisioner Bidang Advokasi Sosialisasi dan Edukasi Aang Muhdi Godzali, serta tenaga ahli Komisi Informasi DKI Jakarta.

Harry menjelaskan, Komisi Informasi DKI Jakarta bertanggung jawab kepada gubernur dan menyampaikan laporan tentang pelaksanaan fungsi, tugas, serta wewenang kepada DPRD DKI. Dia menyebut, laporan Komisi Informasi DKI Jakarta juga telah diterima Komisi A DPRD DKI Jakarta di gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Selasa (16/2).

Saat bertemu dewan, Harry mengaku, sempat memaparkan pencapaian kinerja lembaganya dan komitmen ke depan untuk menjadikan masyarakat informatif. Meski melalui masa pandemi Covid-19, kata dia, Komisi Informasi DKI Jakarta tetap harus melaksanakan kewajiban dan mempertanggungjawabkan kinerjanya.

"Dengan cara melaksanakan kewajiban akan menumbuhkan kepercayaan masyarakat DKI Jakarta, *checks and balances* untuk lebih bisa dipercaya, lebih akuntabel, sehingga memiliki nama yang baik," tutur Harry.

Dia berharap kebijakan ruang fiskal Pemprov DKI Jakarta pada 2021, bisa lebih baik dibandingkan tahun lalu. Pasalnya, situasi pada 2020 berbeda dengan adanya kebijakan refokusing anggaran untuk penanganan Covid-19, sehingga pembangunan tidak berjalan maksimal.

■ antara ed: erik purnama putra

Bahagia Bertemu Motor yang Hilang Dicuri

Ada pemandangan berbeda di halaman Markas Polres Bogor pada Kamis (4/3) siang. Sekitar pukul 10.30 WIB, puluhan tahanan memakai baju oranye dikeluarkan dari sel untuk berdiri di dekat ratusan sepeda motor yang diparkir berjejer. Kemudian, puluhan orang mendatangi motor yang diparkir rapi dan dikelilingi garis polisi (*police line*). Juga ada mobil yang ikut diparkir di samping deretan motor.

Ternyata ratusan kendaraan roda dua dan empat tersebut merupakan hasil rampasan penyidik dari 60 pelaku pencurian yang beraksi di wilayah hukum Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Kamis siang itu, Polres Bogor merilis hasil kasus kejahatan pencurian dan penadahan kendaraan bermotor. Sontak saja, warga yang sebelumnya melapor ke polisi atas kasus kehilangan, mendatangi Markas Polres Bogor di Cibinong.

Pantauan di lokasi, warga yang menemukan motor maupun mobilnya tampak bersyukur. Mereka berterima kasih kepada aparat yang berhasil menemukan kendaraannya yang hilang dicuri.

Salah seorang korban pencurian, Siska (41 tahun), tidak bisa menyembunyikan rasa gembiranya setelah mengetahui motornya yang hilang dua bulan lalu, terparkir di halaman Markas Polres Bogor. "*Seneng banget* pas *ketemu*, alhamdulillah masih rezeki, *seneng banget* pokoknya. *Gak nyangka* dan salut buat kepolisian," kata Siska sambil memegang motornya yang hilang dicuri pada awal tahun ini.

Siska kehilangan motornya di pertokoan, dekat tempatnya bekerja di Citeureup, Kabupaten Bogor. Pada hari itu, ia sedang berbelanja dan memarkir kendaraannya, seperti sebelum-sebelumnya. Saat Siska keluar toko, ia kaget kendaraannya sudah tidak ada di lokasi. Pun dengan saksi mata di sekitar toko tidak tahu jika ada pencurian motor.

Beruntung ada kamera pengawas yang terpasang di toko, sehingga ia bisa melihat momen motornya dicuri orang tak dikenal. "Pas cek di CCTV itu pelakunya satu orang. Dia duduk di atas motor terus langsung dibawa. *Cepet deh* pokoknya," ucap Siska.

Sementara itu, pemuda asal Cibinong, mengaku bernama Eka mendatangi Markas Polres Bogor mengambil motornya. Sambil membawa surat tanda nomor kendaraan (ST-NK), ia mencari motor Honda Vario yang hilang dua bulan lalu di parkiran minimarket. "Hilangnya di Alfamart Cibinong, waktu saya lagi belanja susu," ujarnya.

Eka kehilangan motornya sekitar pukul 17.00 WIB. Dia pun ditanya Kapolres Bogor AKBP Harun kronologi kejadian hingga maling bisa membawa kabur motornya. Dia girang ketika menemukan Vario miliknya terparkir di halaman Markas Polres Bogor.

Dia langsung mengapresiasi kinerja kepolisian yang membekuk pelaku pencurian dan berhasil mengamankan barang bukti utuh seperti semula. "Terima kasih kepada polisi yang berhasil mengembalikan motor saya. Saya *senang banget*," tuturnya.

> **Terima kasih kepada polisi yang mengembalikan motor saya.**

Kapolres Bogor AKBP Harun menjelaskan, jajaran kepolisian selama 10 hari terakhir menggelar operasi dan mampu menangkap 60 pelaku pencurian. Dari tangan mereka, polisi menyita 134 kendaraan bermotor. Perinciannya, ada 124 motor, sembilan mobil yang diduga sebagai barang curian dan satu truk yang digunakan sebagai alat pengangkut.

Menurut dia, dari 60 tersangka yang ditangkap, tujuh di antaranya merupakan target operasi berasal dari luar wilayah Bogor. Mereka berasal dari Cianjur dan luar Provinsi Jawa Barat, yakni Palembang dan Lampung, tetapi kerap beraksi di wilayah hukum Kabupaten Bogor. "Sementara 53 orang lainnya nontarget operasi," ujar Harun saat ditemui di halaman Markas Polres Bogor.

Dia menjelaskan, modus operandi yang dilakukan para tersangka ada tiga. Mereka beraksi menggunakan kunci leter T, mencongkel jendela dan pintu rumah korban pada malam hari, dan menempel langsung korban. Oleh sebab itu, kunci leter T beserta barang lain yang ditemukan saat penangkapan tersangka turut dibawa.

"Kami juga menyita senjata api rakitan dari Lampung sebanyak 2 buah, senjata tajam, 6 peluru, 7 unit ponsel, serta kunci T, kunci magnet, dan beberapa perlengkapan lain," tuturnya.

Harun mengungkapkan, dari hasil interogasi penyidik kepada tersangka, biasanya mereka paling sering beraksi pada pukul 10.00-17.00 WIB. Para pencuri biasanya mengincar yang diparkir di depan toko atau rumah makan.

Setelah melakukan aksi pencurian, sambung dia, para tersangka langsung membawa barang curian ke daerah Cianjur, ke tempat penadah. Dalam aksinya, tersangka memilih jalur yang sepi, yakni di sekitar Jonggol, Kabupaten Bogor. "Jadi, hari itu ambil, hari itu diarahkan ke Cianjur," ungkapnya.

Bisa diambil

Penyidik sudah mendata semua nomor polisi dan nomor rangka dari kendaraan yang menjadi barang bukti pencurian. Harun pun mengimbau warga yang pernah menjadi korban pencurian kendaraan bermotor untuk mendatangi Markas Polres Bogor. Siapa pun yang menjadi korban bisa memeriksa sendiri apakah ada kendaraannya yang ditemukan polisi.

"Yang merasa kendaraannya menjadi barang bukti kami, silakan menghubungi kami. Nanti kita sampaikan beberapa kendaraan dan nomor polisi, serta nomor rangka yang sudah kita data," ujar Harun.

Untuk mengambil kendaraan yang sempat hilang, Harun meminta masyarakat untuk datang dengan membawa surat dan bukti kendaraan. Jika surat dan kendaraan cocok, warga bisa langsung membawa pulang kendaraannya. "Silakan membawa bukti kendaraan. Langsung datang ke kami," tuturnya.

■ shabrina zakaria ed: erik purnama putra

Baca Esok!
Madeena, Terbit 4 halaman tiap Sabtu, halaman 5, 6, 7 & 8.

Madeena
Hal 5 s/d **hal 8**, edisi **SABTU!**

REPUBLIKA menghadirkan suplemen ***Madeena.*** KINI, **terbit 4 halaman setiap hari Sabtu.** Yaitu di **halaman 5** s/d **halaman 8.** *Madeena* **fokus pada liputan tentang gaya hidup** *(lifestyle), dll.* Di suplemen kali ini, pembaca disuguhi rubrik, tentang **MODIS, BUGAR, DOMPET,** dan **KULINER.**

INFORMASI

PEMBERITAHUAN

PEMASANGAN IKLAN

PASANG IKLAN ANDA
di REPUBLIKA Hubungi :
(021) 79184744 dan
kirim email ke :
iklanrepublika@gmail.com
atau email:
iklan@republika.co.id

YOGYAKARTA

PENGUMUMAN

PANGGILAN SIDANG

DIMHN HDR DI SIDANG PA
Sleman, Selasa,08 Juni 2021, pkl. 09.00 WIB, a.n.Ponijem Pawiro Utomo *binti* Djajadimuldja, pergi dr rmh th 1983 (No.304/P/20/PA.Smn, Pmhn: Trubus *bin* Dalimin Pawiro Utomo,29/11,Bawuk,Minomartani,Ngaglik,Sleman.

antam

PT ANTAM Tbk – UBPB KALBAR
PENGUMUMAN PELELANGAN ULANG

PT ANTAM Tbk – Unit Bisnis Pertambangan Bauksit mengundang Penyedia Barang/Jasa dengan kualifikasi **NON KECIL** sebagai berikut :

Pelelangan : Jasa Verifikasi Ekspor (Surveyor Independen) Untuk Rencana Ekspor 2021-2023
Nomor Pelelangan : T2021010329-1
Pendaftaran tanggal : 5-03-2021 s.d.12-03-2021 jam 09.00 s.d 15.30 WIB
Syarat Pendaftaran : Menyerahkan salinan/copy :
- Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik untuk Tahun 2019.
- Surat Ijin Pelaksana Verifikasi atau Penelusuran Teknis Terhadap Ekspor Produk Pertambangan dari Instansi terkait yang masih berlaku;
- Memiliki Account Aktif eSCM ANTAM UBPB Kal-Bar

Informasi lebih lanjut dapat dilihat di Papan Pengumuman Kantor ANTAM UBPB Tayan atau menghubungi email: sugiyo@antam.com; sigit.triyanto@antam.com; budhi.indharto@antam.com;

Tempat Pendaftaran :
Satuan Kerja Procurement & Material Management PT ANTAM Tbk – Unit Bisnis Pertambangan Bauksit, Jl. Trans Kalimantan, Desa Pedalaman, Kec. Tayan Hilir, Kab. Sanggau, Kalimantan Barat.

Tayan, 5 Maret 2021
Procurement & Material Management

republika.id kini telah hadir menemani Anda sekeluarga di rumah. Cara baru dalam menjangkau kedalaman berita dan menikmati kekayaan pengalaman menyerap infomasi, terlebih di masa Pandemi saat ini.

EPAPER REPUBLIKA

Merupakan koran dalam bentuk digital yang memiliki isi dan tampilan sama seperti edisi cetak yang bisa diakses melalui *desktop* dan *mobile*. Terbit setiap pukul 02 WIB. Pelanggan dapat mengakses arsip koran dari tahun 2011 s/d sekarang.

Anda bisa jua membaca epaper republika dengan mengunduh aplikasi gerai republika yang tersedia di *google playstore*.

JADWAL **SHALAT**

Bandung -3 mnt, Yogyakarta -14 mnt Semarang -14, Surabaya-24 mnt, Jambi+13 mnt, Padang +26, Medan +33 mnt, Makassar -24 mnt

SUBUH	04.43
ZHUHUR	12.08
ASHAR	15.08
MAGHRIB	18.13
ISYA	19.22

HIKMAH

■ OLEH **ABDUL MUID BADRUN**

Revitalisasi Amanah

Salah satu sifat mulia yang diajarkan Rasul Muhammad SAW selain *Siddiq* (jujur), *Tabligh* (komunikatif), *Fathanah* (cerdas) adalah Amanah (tepercaya). Semua dari kita pasti mendapatkan amanah. Yang berbeda adalah sikap kita terhadap amanah yang dititipkan Allah pada kita. Ada yang pandai menjaganya, tapi tidak sedikit yang lalai.

Secara etimologis, kata "amanah" artinya dapat dipercaya atau tepercaya. Namun, secara terminologis artinya segala hal yang dipertanggungjawabkan kepada seseorang. Baik hak-hak itu milik Allah, manusia kepada manusia, benda, pekerjaan, perkataan, maupun cinta. Saking pentingnya menjaga amanah, sampai Rasul Muhammad memberikan peringatan dalam salah satu hadisnya yang artinya: "Jika suatu urusan, diberikan (diamanahkan) bukan pada ahlinya, maka tunggulah kehancurannya." (HR Bukhari)

Ini membuktikan, amanah itu sungguh harus dijaga, dipelihara, dan dijalankan dengan sebaik-baiknya. Profesionalitas itu harga mati untuk menjalankan setiap amanah yang diberikan. Apalagi, amanah sebagai seorang pemimpin. Tentu kepercayaan menjadi kunci bagi setiap pengikutnya. Sulit rasanya berharap ada kemajuan di organisasi, lembaga pemerintah, institusi pendidikan ataupun institusi bisnis tanpa mampu menjalankan amanah dengan baik dan benar.

Mari kita baca ayat Alquran surah al-Anfaal ayat 27: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanah-amanah yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui". Dari ayat ini jelas, bahwa Allah melarang keras kepada kita untuk mengkhianati amanah yang diberikan. Padahal, kita tahu, tapi kita tidak melakukannya. Kita tahu, tapi kita menyelewengkannya. Kita tahu, tapi kita mengkhianatinya. Maka, balasannya jelas kehancuran.

Kalau kita dalami isi Alquran, amanah terdiri atas tiga macam. Pertama, amanah dari Allah SWT. Sesuai dengan bunyi Alquran Surah al-Ahzab yang artinya: "Sesungguhnya kami telah mengemukakan amanah kepada langit, bumi dan gunung-gunung, maka semuanya enggan untuk memikul amanah itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya, dan dipikullah amanah itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat lalim dan amat bodoh".

Kedua, amanah antarmanusia. Di dalam Alquran Surah an-Nisa, ayat 58 Allah SWT berfirman: "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil."

Ketiga, amanah terhadap diri sendiri. Ini sesuai ayat Alquran Surah at-Tahrim, ayat 6, yang artinya: "Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, yang keras, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan".

Menjalankan amanah itu ciri orang beriman. Demikian juga sebaliknya. Karena itu, jaga baik-baik setiap amanah yang diberikan. Apa pun itu! Jika disia-siakan, amanah itu akan menghancurkan. *Wallahu a'lam.* ■

THOUDY BADAI/REPUBLIKA

TOKOH PEMBERDAYAAN 2020 Chief Marketing Officer Rumah Zakat Irvan Nugraha (kanan) menyerahkan penghargaan Tokoh Pemberdayaan 2020 kepada Pemimpin Redaksi Harian *Republika* Irfan Junaidi di kantor Harian *Republika*, Jakarta, Selasa (2/3). Rumah Zakat memberikan penghargaan Tokoh Pemberdayaan 2020 kepada sembilan orang tokoh dari berbagai latar belakang.

Belajar Tatap Muka di Madrasah Dikaji

Secara psikologis, pembelajaran jarak jauh dinilai sudah terlalu lama.

■ IMAS DAMAYANTI

JAKARTA – Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menargetkan untuk memulai pembelajaran tatap muka di sekolah pada Juli 2021. Sementara itu, Kementerian Agama (Kemenag) sejauh ini belum membuat keputusan serupa untuk madrasah.

Direktur Kurikulum, Sarana, Kelembagaan, dan Kesiswaan (KSKK) Kemenag, Ahmad Umar, mengatakan, pihaknya belum dapat memastikan kapan pembelajaran tatap muka di madrasah akan dimulai. Sebab, masih ada sejumlah hal yang harus diperhatikan, terutama terkait kondisi pandemi Covid-19 saat ini.

"Istilahnya, kita masih *wait and see* dulu. Lihat bagaimana program vaksinasinya, karena kita tidak mau terburu-buru, kita harus hati-hati bagaimana perkembangan kondisi vaksinasi ini," kata Umar saat dihubungi *Republika*, Kamis (4/3).

Meski demikian, menurut dia, secara prinsip pembelajaran tatap muka sudah siap dilaksanakan. Namun, adanya satu dan sejumlah pertimbangan terkait kondisi saat ini maka kepastian waktu pembelajaran tatap muka di madrasah belum bisa diumumkan. Saat ini, lanjut Umar, Kemenag tengah menggodok sejumlah strategi pembelajaran tatap muka di madrasah.

Dalam pandangan Pengamat Pendidikan Islam, Adian Husaini, pembelajaran tatap muka madrasah sejatinya sudah sangat layak dilaksanakan. Sebab, secara psikologis, kata dia, para siswa, guru, dan orang tua sudah sangat membutuhkan pembelajaran tatap muka di sekolah. Namun demikian, pemerintah diimbau tidak gegabah dalam menyusun strategi pembelajaran tatap muka.

"Sebenarnya (madrasah) ini harus sesegera mungkin dibuka karena secara psikologis PJJ (pembelajaran jarak jauh) sudah terlalu lama, tapi harus waspada saat pelaksanaan," kata dia.

> **Saat ini, Kemenag masih menggodok sejumlah strategi pembelajaran tatap muka di madrasah.**

Pemerintah, menurut Adian, perlu memastikan bahwa pembelajaran tatap muka tidak mengabaikan protokol kesehatan. Selain itu, ia menyarankan, ada penambahan sikap di madrasah seperti penekanan terhadap doa-doa dan program pendidikan untuk meningkatkan imunitas.

"Jadi, sekolah harus ada program meningkatkan imunitas anak, meningkatkan keluhuran akhlak. (Pendidikan akhlak) inilah yang tidak bisa digantikan internet. Saya rasa saat ini pendidikan Islam adalah yang paling ideal diterapkan di masa pandemi," ujar Adian yang juga ketua umum Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII) ini.

Ia juga meminta pemerintah untuk mengatur mobilitas para siswa di madrasah. Misalnya, dengan mengatur waktu sekolah yang dipangkas beberapa hari guna menghindari kerumunan. Dia pun mendorong pemerintah untuk mempercepat penyediaan alat-alat medis pendeteksi virus yang murah dan terjangkau bagi kalangan madrasah.

"Karena kalau pakai *swab* antigen, itu masih mahal. Maka, pemerintah coba produksi alat-alat medis pendeteksi yang murah dan simpel," kata dia.

Adian menyampaikan, salah satu nilai khas dari pendidikan Islam adalah mengedepankan akhlak dan kejujuran. Menurut dia, selama pembelajaran jarak jauh berlangsung, tak sedikit orang tua yang hanya memikirkan nilai-nilai tinggi anaknya ketimbang kejujuran si anak dalam mengerjakan tugas-tugas dari sekolah.

Untuk itu, dia mengimbau Kemenag untuk dapat memberikan pembinaan kepada para orang tua agar dapat mengajarkan kejujuran serta kedisiplinan kepada anaknya, sebagai karakter utama umat Islam.

"Pemerintah itu harus ada pembinaan kepada orang tua supaya bisa mengajari anaknya tentang kejujuran, kedisiplinan, dan menjadi orang yang akhlaknya baik." ■ **ed:** wachidah handasah

Baznas Targetkan Himpun ZIS Rp 180 Miliar di Ramadhan

■ FUJI E PERMANA

JAKARTA — Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) menargetkan penghimpunan zakat, infak, dan sedekah (ZIS) selama Ramadhan 2021 sebesar Rp 180 miliar. Baznas juga membuat sejumlah program Ramadhan untuk membantu para mustahik agar lebih berdaya.

Pimpinan Baznas bidang penghimpunan, Rizaludin Kurniawan, mengatakan, program Baznas di Ramadhan tahun ini mengambil tema Gerakan Cinta Zakat. Tema ini menekankan, Baznas sekarang menjadi lembaga utama yang menyejahterakan umat.

"Target penghimpunan Baznas pada Ramadhan tahun 2021 ini Rp 180 miliar," kata Rizaludin saat diskusi secara virtual bersama jajaran pimpinan Baznas dan *Republika*, Kamis (4/3).

Ia menerangkan, ada beberapa program yang akan dilaksanakan selama Ramadhan. Di antaranya, program mendorong mustahik menjadi muzaki, dan program bedah rumah agar menjadi rumah layak huni.

Selain itu, ada program paket Ramadhan bahagia, program ini untuk para pengurus masjid, panti, dan fakir miskin. Kemudian, ada program hidangan berkah Ramadhan, khataman Alquran, penyaluran zakat fitrah, tadabur semesta, giat tim Umar bin Khattab, dan lentera Ramadhan atau kultum menjelang berbuka puasa.

Mengenai giat tim Umar bin Khattab, Rizaludin menerangkan, program ini terinspirasi dari Sahabat Umar yang memikul makanan dan membagikannya ke fakir miskin. "Jadi, ini kita akan mendatangi (mustahik), kalau ada permintaan bantuan yang membutuhkan kebutuhan dasar hidup, kita langsung sampaikan (bantuannya) ke mustahik," kata dia.

Rizaludin menerangkan, Baznas sudah memiliki layanan aksi Baznas, tapi melalui giat tim Umar bin Khattab akan lebih khusus lagi aksinya. Kegiatannya seperti Sahabat Umar di masa lalu, yakni mendatangi rumah warga yang membutuhkan bantuan.

Ada pula program zakat istana. Untuk itu, Baznas telah melakukan audiensi dengan Presiden Joko Widodo. "Presiden, Insya Allah akan merespons gerakan zakat istana ini dalam rangka Gerakan Cinta Zakat, gerakan ini juga akan diluncurkan oleh Presiden, ketua DPR, para menteri, dan diikuti oleh jajaran provinsi dan Baznas provinsi se-Indonesia," katanya.

Untuk kanal pembayaran zakat selama Ramadhan, Baznas membuka semua *channel* pembayaran zakat. Ada program jemput zakat, zakat secara daring, bahkan bisa melalui minimarket, seperti Indomaret dan Alfamart.

Dalam forum yang sama, Pemimpin Redaksi Harian *Republika* Irfan Junaidi mengungkapkan kebahagiaannya melihat gerakan zakat semakin meningkat meski di situasi pandemi Covid-19. Sebab, kalau melihat dunia bisnis di masa pandemi ini mengalami tekanan yang berat.

Ia mengatakan, banyak sekali bisnis yang mengalami kontraksi bahkan sampai gulung tikar. Namun, ternyata zakat tidak seperti itu. Zakat tetap menunjukkan tren peningkatan.

"Itu tentu membahagiakan di tengah situasi masyarakat lagi susah, tapi semangat untuk berdonasi dan semangat untuk meringankan beban saudara-saudara kita, tidak ikut melemah," ujar dia.

Irfan juga menyampaikan, *Republika* sangat terhibur melihat tren zakat meningkat. *Republika* menjadi lebih bersemangat untuk terus mendorong dunia zakat, infak, sedekah, dan wakaf agar lebih luas lagi manfaatnya.

"Supaya zakat, infak, sedekah, dan wakaf bisa menjadi pilar pemberdayaan ekonomi bangsa." ■ **ed:** wachidah handasah

Hukum Shalat Jumat Secara *Online*

■ OLEH **ANDRIAN SAPUTRA**

Penggunaan aplikasi komunikasi video tengah menjadi tren di tengah masyarakat. Hal itu sangat membantu masyarakat agar dapat tetap terhubung satu sama lain di tengah pandemi Covid-19. Biasanya masyarakat memanfaatkan aplikasi itu untuk berdiskusi, *talk show*, rapat, dan lainnya.

Namun, bolehkah melaksanakan atau mengikuti shalat Jumat dengan memanfaatkan aplikasi komunikasi video? Artinya, pelaksanaan shalat Jumat berlangsung secara daring dengan posisi imam dan jamaah di lokasi yang berbeda dan tak membentuk shaf.

Pakar fikih yang juga anggota Dewan Mudzakarah Pengurus Pusat Hidayatullah, Ustaz Abdul Kholik, menjelaskan, boleh tidaknya melaksanakan shalat Jumat secara daring atau pelaksanaannya di lokasi berbeda antara imam dan makmum dengan memanfaatkan bantuan media tertentu, sejatinya sudah menjadi perdebatan para ulama masa lalu. Meski demikian, kala itu medianya bukan aplikasi komunikasi video *online* melainkan radio.

Seorang ulama asal Maroko, yakni Syekh Ahmad bin Shiddiq al-Qumary yang wafat pada 1960-an pernah menulis sebuah kitab yang berisi argumentasi yang membuat orang menerima keabsahan shalat Jumat melalui radio. Dijelaskan bahwa sah hukumnya orang melaksanakan shalat Jumat melalui radio dengan syarat lokasi imam berada lebih dekat pada kiblat dibanding makmum.

Misalnya, makmum di Surabaya dan Imam di Jakarta. Akan tetapi, fatwa Syekh Ahmad tersebut dibantah oleh banyak ulama, terutama para ulama dari Kairo, Mesir yang menegaskan bahwa hal itu batal atau tidak sah.

Sebab, kata dia, tujuan dari jamaah dan shalat Jumat adalah bertemunya kaum Muslimin dengan pertemuan rill. Syarat sahnya shalat Jumat dan shalat berjamaah adalah adanya jamaah, adanya ketersambungan shaf secara rill, bukan ketersambungan suara atau gambar. Walaupun shaf jamaah tersambung sampai jauh, kalau shaf itu *nyambung* maka tetap sah.

"Walaupun ada jamaah yang tidak bisa melihat imam (karena posisi di belakang), tapi shafnya masih nyambung itu sah," kata anggota Komisi Fatwa MUI Pusat periode 2020-2025 ini.

Begitupun dengan menggunakan aplikasi video komunikasi, yang pada intinya tidak mempertemukan jamaah secara langsung, atau tidak dapat membentuk shaf jamaah dan tidak terhubung langsung dengan imam. Maka, menurut Ustaz Kholik, shalat Jumat pun tidak bisa didirikan.

"Sekarang kalau ada orang yang shalat Jumat pakai Zoom dan sebagainya, maka tidak ada jamaah rill, *nyambung* shaf secara rill, sehingga ketika jamaah itu tidak terjadi maka shalat Jumatnya juga tidak terjadi karena adanya jamaah itu bagian dari syarat sah shalat Jumat," ujar mantan rektor Sekolah Tinggi Agama Islam Luqman Al-Hakim, Surabaya ini.

Dalam kondisi adanya uzur sehingga terkendala tidak bisa melaksanakan shalat Jumat, dapat melaksanakan shalat Jumat berjamaah dengan keluarga di rumah. Atau jika terkendala membentuk shalat Jumat di rumah, seseorang dapat melaksanakan shalat Zhuhur.

■ **ed:** wachidah handasah

dialog jumat
REPUBLIKA

Hafiza Novira Elvitariani

Merawat Budaya Berderma

Menjadi bagian dari komunitas filantropi Islam, Hafiza Novira Elvitariani memberi warna. Dengan beragam inovasi, Hafiza berupaya merawat tradisi berderma.

Hlm 20

Achmad Hisyam

Semoga Pencabutan Perpres Jadi Langkah Awal Pengetatan Miras

Halaman 15

Hakim yang Adil

Almarhum Artidjo AlKotsar menjadi contoh konkret hakim yang adil. Islam pun mengajarkan betapa berat hakim menjalankan keadilan.

Halaman 16

Perguruan Diniyah Putri Padang Panjang Sumatra Barat

Berkarya Lewat Robot

Berstatus sebagai pesantren tak membuat Perguruan Diniyah Putri melupakan teknologi. Lewat robot, perguruan ini menghasilkan karya-karya terbaik santri.

Halaman 17

THOUDY BADAI/REPUBLIKA

Lindungi Bangsa DARI MIRAS

Minuman keras (miras) menjadi musuh semua peradaban di dunia. Dampaknya yang bertubi-tubi membuat kita harus membangun tameng untuk melindungi bangsa dari minuman memabukkan itu. Dicabutnya Lampiran ke-3 Perpres 10/2021 hanya menjadi percikan serangan dari mereka yang hendak menangguk untung lewat industri tersebut. Butuh payung hukum lebih kuat untuk melindungi bangsa ini dari bahaya minuman keras.

ANTARA

Selamatkan Keluarga dari Miras

Berdasarkan catatan WHO, sebanyak 55 persen pelaku kekerasan domestik dunia dalam melakukan aksinya disertai pengaruh minuman beralkohol.

■ IMAS DAMAYANTI

Dampak minuman keras (miras) terasa hingga ke keluarga. Tidak sedikit dari kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang menimpa perempuan dan anak karena kepala rumah tangga berada di bawah pengaruh miras. Komisioner Komisi Nasional Antikekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), Bahrul Fuad, menjelaskan, meski bukan menjadi faktor tunggal terjadinya KDRT, miras dapat menjadi katalisator kekerasan yang ada.

"Miras ini memang bukan jadi sebab tunggal dalam KDRT. Tapi dia bisa jadi faktor penyerta terjadinya kekerasan kepada para perempuan yang menjadi korban," kata Bahrul saat dihubungi *Republika*, Rabu (3/3).

Dia menjelaskan, dengan mengonsumsi miras, peluang orang untuk melakukan kekerasan bisa lebih tinggi. Dalam fakta-fakta yang ia temui di lapangan, kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan acap kali dilakukan oleh pelaku akibat pengaruh alkohol. Misalnya, kata dia, korban kerap diberikan miras hingga tidak berdaya dan kemudian diperdaya. Contoh lainnya, pelaku kekerasan yang berada di bawah kendali miras kehilangan kendali atas jiwanya sehingga KDRT pun terjadi.

Di sisi lain, pihaknya menambahkan, orang yang melakukan kekerasan akibat pengaruh miras akan mengganggu ekonomi keluarga, relasi dengan keluarga yakni anak-istri, hingga menimbulkan konflik dalam rumah tangga. "Mudharat (dari miras)-nya sangat jelas, *nggak* ada manfaatnya," kata dia.

Berdasarkan catatan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), sebanyak 55 persen pelaku kekerasan domestik (rumah tangga) dunia dalam melakukan aksinya disertai pengaruh minuman beralkohol. Adapun dua pertiga korban KDRT telah mengakui bahwa pelaku kekerasan memang melakukan aksi-aksi kekerasan dalam pengaruh minuman memabukkan tersebut.

Di Indonesia, dia menambahkan, tak sedikit aduan adanya kasus-kasus KDRT yang disebabkan oleh pengaruh alkohol oleh pelaku kekerasannya. "Di Komnas Perempuan, kita memang belum memilah secara spesifik berapa persen kasus KDRT yang terjadi akibat miras. Tapi kami sering menerima aduan bahwa memang pelaku kekerasan ada yang terpengaruh miras," kata dia.

Jika ditinjau dari dampak miras dan alkohol sendiri, Bahrul menjelaskan, miras dapat menurunkan daya kognitif yang pada akhirnya akan menghilangkan daya nalar bagi yang mengkonsumsinya. Data nalar yang rendah kemudian akan menghilangkan *self control*, sehingga dia menilai hal itu akan menimbulkan konflik. Dia pun mengimbau kepada pemerintah untuk melakukan kebijakan-kebijakan yang komprehensif terkait miras. Seperti membatasi produksi (ketersediaan) miras, pembatasan waktu dan tempat jual, hingga pengaturan harga yang tinggi agar sulit terjangkau oleh masyarakat.

"Dan yang penting juga, pemerintah perlu sediakan tempat rehabilitasi untuk pecandu miras. Sehingga dia nantinya bisa sembuh dan beraktivitas normal," kata Bahrul.

> **"Di Komnas Perempuan, kita memang belum memilah secara spesifik berapa persen kasus KDRT yang terjadi akibat miras. Namun, kami sering menerima aduan bahwa memang pelaku kekerasan ada yang terpengaruh miras.**

Seturut dengan itu, Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Jasra Putra mengatakan, miras memiliki dampak yang pasti bagi anak-anak. Menurut dia, tanpa perlu melegalkan investasi miras, fakta di lapangan telah menunjukkan bahwa beredarnya berbagai produk miras telah banyak mengorbankan anak-anak. "Ada kasus-kasus anak meninggal karena miras oplosan, akibat minimnya pengawasan ketat dari pemerintah terkait miras. Apalagi harus dilegalkan? Kasus-kasus yang timbul akibat miras, justru harusnya diminimalisasi, dikurangi," kata dia.

Dia menekankan, pengawasan yang ketat terkait miras perlu diseriusi agar tak membahayakan kesehatan dan masa depan anak. Saat ini, Jasra menilai, regulasi pengawasan miras dan alkohol di Indonesia masih sangat lemah. Contohnya, dengan tidak adanya persyaratan bagi konsumen miras yang dapat dikonsumsi oleh usia-usia tertentu.

Artinya, tidak ada persyaratan tulis bahwa miras dan alkohol tidak boleh dikonsumsi atau dijangkau anak-anak di dalam kemasan produk. Menurut dia, seringkali laporan pencegahan anak-anak untuk tidak mengonsumsi minuman keras pada kenyataannya di level akar rumput sangat sulit dicegah. Dengan demikian, hal itu lebih menampakkan regulasi yang pengawasannya sangat lemah.

"Untuk itu tidak dilegalkan saja, peredarannya luar biasa. Apalagi, kalau diberi ruang, kita khawatir akan lebih berat tugas bangsa ini menyelamatkan generasinya," kata dia. ■ ed: a syalaby ichsan

Kawal RUU Minol Masuk Prolegnas 2021

Pencabutan lampiran ketiga Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 Tahun 2021 yang mengatur tentang minuman keras (miras) bukan menjadi akhir dari serangan bahaya miras. Masih adanya kekosongan hukum setingkat undang-undang tentang peredaran minuman beralkohol membuat miras masih tetap bebas diperdagangkan. Rancangan Undang-Undang (RUU) Minuman Beralkohol (Minol) yang diusulkan sejumlaf fraksi DPR pun tersendat.

Anggota Fraksi PKS Ledia Hanifa Amaliah mengatakan, saat ini RUU Minol masih dalam tahapan harmonisasi di Badan Legislatif (Baleg) DPR. Dia menjelaskan, seluruh RUU termasuk RUU Minol belum dapat dibahas lebih jauh karena belum diputuskan ke dalam prioritas program legislatif nasional (prolegnas) 2021. "(RUU Minol) itu *kan* harus diputuskan di paripurna, jadi akhirnya belum ditetapkan prolegnasnya. *Kalo* itu sudah dibahas, harusnya diagendakan kembali (terkait RUU Minol)," kata Ledia saat dihubungi *Republika*, Rabu (3/3).

Namun, Ledia menekankan, RUU Minol akan terus diperjuangkan karena memiliki urgensi yang cukup besar bagi kelangsungan bangsa. Terutama, kata dia, bagaimana Indonesia belum memiliki regulasi memadai tentang miras yang memiliki tingkat kebahayaan tinggi.

Tak hanya itu, pihaknya juga menekankan, minuman beralkohol membawa pengaruh negatif di masyarakat. Menurut Ledia, RUU Minol juga akan mengakomodasi masukan-masukan yang bercirikan *local wisdom* apabila dibutuhkan. Namun, berdasarkan beberapa pernyataan tokoh-tokoh di empat provinsi yang masuk dalam Perpres Miras, terdapat fakta yang menyebutkan, miras dan alkohol bukanlah bagian dari budaya yang baik bagi adat maupun agama. "Kita lihat di Papua misalnya yang mengeluarkan perda miras. Itu karena mereka lihat bahwa dampak miras ini justru sangat bahaya bagi masyarakat mereka, membawa kerusakan yang besar," kata dia.

Senada dengan Ledia, anggota Fraksi PAN Guspardi Gaus menyampaikan pentingnya mendorong RUU Minol untuk masuk ke dalam prolegnas 2021. "RUU Minol ini urgensinya sungguh luar biasa," kata Guspardi.

Dia menjelaskan, prolegnas 2021 masih tertunda sehingga masih ada waktu bagi para pengusul RUU tersebut untuk memperbaiki draf-draf yang belum sempurna. Dalam pembahasan RUU tersebut, ada banyak sekali masukan secara naskah akademis dari RUU Minol yang diajukan. "Drafnya *kan* sudah berkali-kali ditolak, mungkin masih kurang sempurna. Sehingga harus disempurnakan *dulu* oleh tim naskah akademis," kata dia.

Guspardi menjelaskan, hadirnya RUU Minol ini patut dihadirkan sebagai antitesa atas legalisasi miras dan alkohol dengan status investasi terbuka. Menurut dia, tanpa dilegalkan saja, pengendalian dampak akibat miras dan alkohol belum bisa dijamin oleh pemerintah secara menyeluruh.

Apalagi, dia menjabarkan, dampak miras dan alkohol yang nyata menjadi ancaman bangsa kerap kali menghadirkan kasus-kasus kriminalitas yang dapat mencetak kemiskinan-kemiskinan baru. Pengawasan dan kontrol pemerintah terhadap peredaran miras hingga saat ini dinilai sangat rendah. Karena itu, dia menegaskan, klaim-klaim yang bernada otoritatif terhadap legalisasi investasi miras haruslah ditolak. "Masalahnya, ada *nggak* komitmen pemerintah selama ini untuk membatasi (minol)? *Kan* tidak ada. Sekarang saja sudah kewalahan, itu *kan* klaimnya pemerintah saja yang berlagak bisa mengatasi dan mengontrol miras," kata Guspardi. ■ ed: a syalaby ichsan

DOKREP

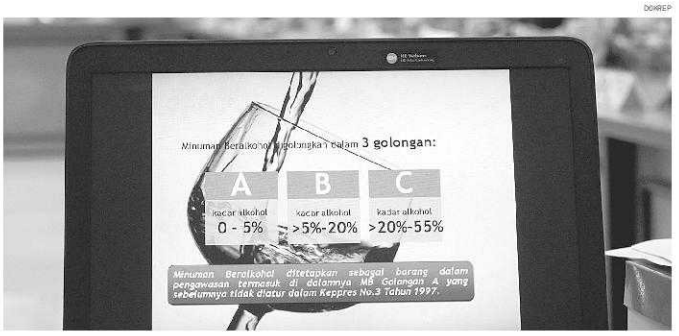

Bersama Melawan Miras

PUTRA M AKBAR/REPUBLIKA

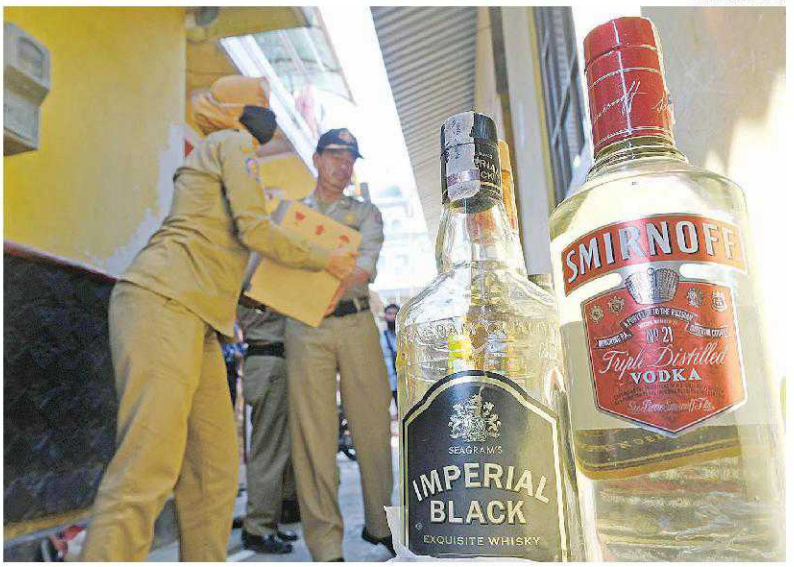

Larangan meminum khamar juga diajarkan dalam agama-agama lainnya.

■ ANDRIAN SAPUTRA

Pemerintah telah mencabut lampiran yang mengatur pembukaan investasi industri minuman keras (miras) yang mengandung alkohol dalam Perpres Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal. Meski dicabut, masyarakat diharapkan terus saling mengingatkan tentang bahaya mengonsumsi miras dan mencegah peredarannya di lingkungan masing-masing. Tak terkecuali miras oplosan yang sulit dideteksi peredarannya oleh aparat.

Ketua Pusat Dakwah dan Perbaikan Akhlak Bangsa Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Masyhuril Khamis menjelaskan, ajaran Islam memberikan rambu tentang perlunya menjaga *maqashid syariah* atau tujuan-tujuan bersyariah. Di antaranya yakni menjaga agama, akal, keturunan, diri, *nafs* dan harta dari pengaruh hal-hal yang merusak, salah satunya adalah dari pengaruh *khmar* atau minuman keras.

Ia mengatakan, sebuah riwayat hadis bahkan menjelaskan tentang golongan orang yang mendapatkan laknat Allah karena perbuatannya berkaitan dengan miras. Selain Allah melaknat khamar itu sendiri, Allah juga melaknat peminumnya, orang yang menuangkan khamar, yang menjual khamar, yang membeli khamar, yang memeras atau meracik khamar, yang mengambil hasil perasannya, yang mengantarnya, dan orang yang meminta diantarkan khamar.

Kiai Masyhuril menegaskan, larangan meminum khamar juga diajarkan dalam agama-agama lainnya. Ini karena meminum khamar sangat berbahaya dan dapat merusak akal sehat. Selain itu banyak kasus kejahatan yang terjadi setelah pelakunya mabuk karena minum khamar.

Oleh karena itu, ia pun mengajak setiap individu masyarakat menjaga dirinya agar terhindar dari khamar. Di antaranya dengan menjaga dan meningkatkan keimanan serta menjauhkan diri dari pergaulan buruk dan tidak mendidik. Ia pun mengajak setiap elemen masyarakat agar bergotong royong meningkatkan kewaspadaan untuk memastikan lingkungannya terbebas dari peredaran minuman keras.

"Kita secara kolektif seharusnya masyarakat menjaga lingkungannya dari peredaran miras dan perbuatan maksiat lainnya, tidak boleh *cuek*. Kepedulian dan keberpihakan pada kebenaran, pada perbaikan akhlak bangsa inilah yang seharusnya dimiliki semua individu," kata dia kepada *Republika*, beberapa hari lalu.

Wakil Ketua Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama KH Muhammad Nur Hayid mengatakan, banyak penjelasan tentang bahaya mengonsumsi miras dalam Alquran dan hadis. Di antaranya, Rasulullah menjelaskan bahwa khamar adalah pangkal terjadinya tindakan kejahatan, seperti membunuh, merampok, berzina, bahkan ingkar kepada Allah dan semakin membuat kerusakan di muka bumi.

> **Secara kolektif seharusnya masyarakat menjaga lingkungannya dari peredaran miras dan perbuatan maksiat lainnya, tidak boleh *cuek*.**

Dalam Alquran, meminum khamar ditegaskan sebagai salah satu dari perbuatan setan. Dalam riwayat lainnya, jelas Gus Hayid, terdapat penjelasan bahwa orang yang sedang meminum khamar akan terlepas dari keimanan. Bahkan, konsekuensi dari mengonsumsi khamar adalah ibadah shalatnya tidak diterima hingga 40 hari.

Meminum khamar juga masuk pada golongan perbuatan dosa besar. Sejumlah riwayat juga menjelaskan tentang siksaan yang amat pedih bagi orang-orang yang suka meminum khamar.

Gus Hayid menjelaskan, setiap individu harus mempunyai kesadaran tentang bahayanya miras. Kesadaran tersebut dapat dibangun dengan mempelajari keterangan-keterangan pada sumber-sumber agama maupun memetik pelajaran dari kisah-kisah orang-orang terdahulu.

Menurut Gus Hayid, setiap agama mengajarkan tentang bahayanya mengonsumsi miras. "Jadi, cara terbaik agar tiap individu terhindar dari miras itu dengan dimulai dari kesadaran individu yang harus dibangunkan. Setelah itu ditopang peraturan yang tegas dan dijalankan," kata dia.

Gus Hayid pun menyeru masyarakat agar bersatu memberantas dan mencegah peredaran miras di lingkungannya masing-masing. Ia menilai masyarakat yang sadar akan bahaya miras tidak boleh diam atau menjadi kelompok *silent majority* ketika mendapati di lingkungannya terdapat peredaran miras. Masyarakat dapat berkoordinasi dengan tokoh agama, aparat pemerintahan setempat, dan aparat penegak hukum untuk menindak peredaran dan konsumsi miras di lingkungannya.

Ketua PP Muhammadiyah Prof Dadang Kahmad mengapresiasi keputusan pemerintah untuk mencabut lampiran tentang perdagangan miras pada Perpres Nomor 10/2021. Dadang mengatakan, miras tidak patut diperdagangkan, apalagi di tengah masyarakat beragama. Sejumlah ayat dalam Alquran yang menjadi pedoman umat Islam dengan tegas menjelaskan kemudaratan dan haramnya miras. Oleh karena itu, miras harus dijauhi agar terhindar dari kerusakan mental dan moral.

Dadang pun mengingatkan tiap individu untuk tidak mencoba-coba mencicipi miras karena menyebabkan kecanduan atau ketagihan yang sulit dihilangkan. Ia juga berharap generasi bangsa menghindari pergaulan yang dapat menjerumuskan pada konsumsi miras dan narkoba.

Di sisi lain, Dadang mendorong peningkatan penyuluhan di setiap daerah tentang bahaya miras. Itu sebagai upaya untuk mengantisipasi agar lingkungan masyarakat terbebas dari miras.

"Saya yakin masyarakat banyak tidak tahu bahwa miras itu haram dan miras itu membahayakan, di tengah masyarakat yang tingkat pendidikan rendah, rata-rata hanya lulusan SD dan tingkat kesejahteraan juga rendah, maka efek negatif dari miras itu akan lebih berbahaya dibandingkan dengan masyarakat maju," ujar dia. ■ **ed:** a syalaby ichsan

Wawancara

DOKPRI

Pemerintah telah mencabut lampiran ketiga Perpres 10/2021 yang mengatur pembukaan investasi industri minuman beralkohol. Pencabutan lampiran tersebut dilakukan Presiden Joko Widodo setelah mendapatkan kritik dari pemerintah daerah, ekonom, hingga tokoh agama. Namun demikian, sempat hadirnya beleid tersebut membuat masyarakat perlu waspada akan bahaya minuman keras. Wartawan *Republika* **Andrian Saputra** mewawancarai kriminolog Universitas Indonesia (UI) **Achmad Hisyam** untuk mengetahui bahaya miras dan hubungannya dengan tindak kriminal. Berikut kutipannya.

Achmad Hisyam

Semoga Pencabutan Perpres Jadi Langkah Awal Pengetatan Miras

Bagaimana pendapat Anda dengan keputusan pemerintah mencabut poin yang mengatur investasi industri miras pada Perpres 10/2021?

Itu harus disyukuri, artinya Presiden masih mendengar aspirasi yang ada di masyarakat. Tapi, bukan berarti dengan pembatalan tersebut kita bisa mengabaikan keberadaan miras yang saat ini marak beredar di masyarakat, baik itu yang bermerek ataupun tradisional yang dibuat secara oplosan oleh masyarakat yang tidak bisa membeli minuman yang bermerek. Jadi, intinya yang pertama, kita bersyukur, alhamdulillah, bahwa kebijakan tersebut dibatalkan. Tapi, tetap kita harus waspada dengan keberadaan miras saat ini dan dampaknya terhadap kejahatan yang semakin banyak apabila konsumsi tersebut tidak dihentikan.

Kemudian, kita bisa mendukung rencana pembentukan UU Miras sebagaimana yang disampaikan dan digaungkan Ibu Fahira Idris yang selama ini kita kenal beliau cukup vokal memberantas peredaran miras di Indonesia. Semoga kebijakan yang diambil Presiden dengan mencabut perpres tersebut menjadi langkah awal dalam meminimalkan dan melokalisasi serta melakukan pengetatan dari distribusi konsumsi miras yang saat ini berada di Indonesia.

Dalam kriminologi, apakah ada kaitannya mengonsumsi miras dengan perilaku kriminal?

Dalam studi-studi ilmiah jelas ada kaitannya antara tindakan atau pelaku kriminalitas dengan minuman keras. Cuma harus jujur juga bahwa itu bukan faktor tunggal karena faktor orang berbuat kriminal bukan cuma miras. Jadi, ada hal-hal lain yang menjadi penyebab seseorang melakukan tindakan kriminalitas. Tapi, miras itu bisa disebut sebagai faktor yang memperbesar peluang seseorang untuk berbuat kriminal.

Di sisi lain, kalau kita mau lihat mirasnya, jangan hanya terpaku pada tindakan kriminalitas yang dalam artian merugikan orang lain, ya. Kan ada juga tindakan yang merugikan diri sendiri sebagai dampak dari miras tadi. Ketika dia mabuk, dia akan merusak badannya, merusak otaknya, dirinya, kemudian dia berjalan atau berkendara ada risiko untuk dirinya sendiri untuk celaka. Jadi, tidak melulu soal tindakan kriminal.

Jadi, miras itu menjadi salah satu faktor yang membuat seseorang lebih besar peluangnya untuk berbuat kriminal, misalnya seseorang sebenarnya tidak mau berbuat jahat, tapi ketika dia mabuk kemudian dia kehilangan kontrol, misalnya dia sedang main kartu maka dia menusuk temannya karena kalah. Seperti penembakan (oleh oknum aparat) di kafe beberapa waktu lalu, di antara faktor penyebabnya dia menembak, ya, saya duga karena dia sudah tidak bisa mengontrol dirinya lagi karena minuman.

Kemudian, miras itu *kan* candu, ketagihan. Ketika dia sudah kecanduan minuman keras maka dia akan memaksakan untuk beli walaupun kondisi ekonominya tidak mampu. Pada akhirnya, ketika tidak mampu beli yang bermerek, dia akan oplos sendiri, itu justru malah bertambah bahayanya untuk dirinya sendiri.

Artinya, mengonsumsi miras membuat seseorang berpotensi melakukan tindakan kriminal?

Studi-studi internasional sudah menunjukkan bahwa meminum minuman beralkohol itu akan membuat peluang berbuat jahat lebih besar. Tapi, lagi-lagi ada dua macam studi dalam kriminologi, yaitu kejahatan yang ada korbannya dan kejahatan yang tanpa korban. Untuk yang miras ini, saya rasa akan meningkatkan kejahatan yang tanpa korban. Maksudnya yang merugikan peminumnya sendiri. Entah itu habis minum dia *nabrak* dan lainnya. Ketika miras mudah diakses, pasti akan meningkatkan faktor kriminalitasnya karena orang akan lebih sering kehilangan kontrol atas dirinya, hilang kendali.

Apakah kriminalitas di Indonesia yang pengaruhi mengonsumsi miras menjadi kasus yang tertinggi?

Kalau dibilang tertinggi, saya *enggak* tahu, tapi banyaklah. Kita bisa lihat dari berita-berita, setiap hari ada orang mabuk terus berkelahi, mabuk terus *nabrak*. Yang pasti, ini meningkatkan peluang orang berbuat jahat. Jadi, kita lihat dari sisi kesehatan dan dari sisi kriminalitas. Dari sisi kesehatan itu miras jelas merugikan, *enggak* ada studi yang menyebutkan meminum miras itu jadi sehat, tidak ada. Kemudian, dari masalah kejahatan, kriminalitas sudah sangat banyak studi yang menunjukkan bahwa ketika orang itu meminum minuman keras maka peluang dia berbuat jahat itu lebih besar. ■

Hakim yang Adil

DOKREP

Jabatan hakim seperti yang dilakoni Artidjo bukanlah pekerjaan ringan.

■ A SYALABY ICHSAN

Lelaki tua itu dihubungi salah satu pengusaha di negeri ini. Di kantor Mahkamah Agung (MA), Jakarta, pengusaha tersebut langsung masuk ke ruangan. Dia mengatakan kepada lelaki itu. "Pak, yang lain sudah." Dengan emosi, lelaki itu berseloroh kepada si pengusaha yang berupaya mengiming-iminginya sejumlah uang. "Apa-apaan ini? Saudara menghina saya!"

Begitulah sepotong kisah hidup Artidjo Alkostar. Sosok hakim yang wafat pada Ahad, 28 Februari lalu. Lelaki asal Madura ini punya nyali untuk berkata tidak kepada praktik suap. Pada kisah lain misalnya, Artidjo langsung menolak saat diserahkan sebuah cek kosong yang bisa diisi dengan angka berapa saja.

Dia pun berani mengambil keputusan saat mengetuk palu vonis untuk koruptor. Tidak jarang Artidjo memperberat hukuman para terdakwa perkara korupsi setelah naik banding ke tingkat selanjutnya. Di sisi lain, Artidjo pun pernah membebaskan seorang *office boy* yang dijadikan kamuflase skema korupsi. Prinsip memberi keputusan dengan seadil-adilnya dipegang benar oleh almarhum saat melakoni profesi sebagai hakim.

Artidjo pun melakoni hidupnya dengan sederhana. Saat menjadi hakim agung, Artidjo mengontrak rumah di bilangan Kwitang. Dia menggunakan bajaj untuk sampai ke kantor. Saat wafat, dia hanya meninggalkan harta yang bila dikalkulasikan tak sampai Rp 1 miliar.

Jabatan hakim seperti yang dilakoni Artidjo bukanlah pekerjaan yang ringan. Profesi ini mendapatkan perhatian khusus di dalam ayat Alquran. "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat." (QS an-Nisa ayat 58).

Pada ayat lainnya, Allah SWT berfirman: "Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebahagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling (dari hukum yang telah diturunkan Allah) maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah menghendaki akan menimpakan musibah kepada mereka disebabkan sebagian dosa-dosa mereka. Dan sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik." (QS al-Maidah ayat 49).

Muhammad Ali dalam *Hakim dalam Perspektif Hadis* menjelaskan, hakim yang berasal dari bahasa Arab dengan bentuk jamak *hukkam* memiliki makna mencegah. Dengan demikian, kata hakim mengandung makna menghalangi terjadinya kesulitan, penganiayaan, mudarat, kezaliman, dan perbuatan jahat lainnya. Prof Quraish Shihab menjelaskan, *al-hakam* dan *al-hakim* merupakan nama sekaligus sifat Tuhan Yang Maha Suci. Salah satu cabang dari sifat ini adalah qadha, yakni ketetapan yang bersifat menyeluruh bagi sebab yang pasti. Yang meneladani sifat ini hendaknya memperdalam pengetahuannya tentang Allah SWT. Dari sini kemudian dipahami bahwa hakim semakna dengan *qadhi*, yakni orang yang memutuskan perkara hukum dalam masalah agama sesuai ketentuan Allah.

Amat berat menjadi seorang hakim. Butuh kejujuran, keberanian, ilmu, dan pengetahuan agar sukses menjalani profesi ini. Rasulullah SAW berdasarkan hadis yang diriwayatkan Imam Abu Dawud, Tirmidzi, dan Ibnu Majah, bahkan menyebutkan di antara tiga hakim hanya satu yang berada di surga, dua lainnya masuk neraka.

Hakim yang sukses di surga ialah seorang hakim yang mengetahui kebenaran, lalu ia memutuskan perkara berdasarkan kebenaran itu. Adapun hakim yang mengetahui kebenaran lalu ia curang dalam memutuskan perkara maka dia berada di neraka. Sementara itu, hakim yang memutuskan perkara kepada manusia (yang terdakwa) berdasarkan kebodohannya, juga di neraka.

> **Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil.**

Keadilan Rasulullah

Semasa hidupnya, Nabi SAW dikenal sebagai hakim yang adil. Salah satu kisahnya yakni tentang seorang perempuan dari keluarga terhormat dan disegani dari bani Makhzum. Perempuan yang mencuri itu mesti dihukum sesuai dengan aturan yang diterapkan saat itu, yaitu dengan dipotong tangannya. Namun, kaum dan keluarga wanita itu merasa keberatan.

Akhirnya, mereka menemui Usamah bin Zain, seorang sahabat yang dekat dan dicintai Rasulullah. Mereka memohon kepada Usamah untuk menghadap Rasulullah dan menyampaikan maksud mereka. Setelah itu, Usamah kemudian beranjak pergi menemui Rasulullah dan menyampaikan keinginan keluarga wanita yang melakukan pencurian itu. Setelah mendengarkan permintaan itu, Rasulullah pun terlihat marah, lalu berkata, "Apakah kau meminta keringanan atas hukum yang ditetapkan Allah?"

Kemudian, beliau berdiri dan berkhutbah di hadapan kaum muslimin hingga sampai pada sabdanya: "Sesungguhnya yang telah membinasakan umat sebelum kalian adalah jika ada orang terhormat dan mulia di antara mereka mencuri, mereka tidak menghukumnya. Sebaliknya, jika orang rendahan yang mencuri, mereka tegakkan hukuman terhadapnya. Demi Allah, bahkan seandainya Fatimah putri Muhammad mencuri, niscaya aku sendiri yang akan memotong tangannya!" ■

FATWA

Menggunakan Dana Salah Transfer, Bolehkah?

■ ANDRIAN SAPUTRA

Beberapa waktu lalu, seorang nasabah perbankan asal Surabaya harus berurusan dengan aparat penegak hukum setelah dilaporkan menggunakan dana salah transfer yang masuk ke rekening pribadinya. Padahal, nasabah tersebut sudah memperoleh pemberitahuan dari pihak bank dan memintanya segera mengembalikan.

Berkaca dari kasus itu, bolehkah menggunakan dana salah transfer? Bagaimana bila pemilik dana menagih, apakah harus dikembalikan semuanya? Bagaimana tuntunan syariat Islam bila mendapat dana yang tidak jelas asal usulnya?

Pakar fikih dan ekonomi syariah yang juga menjabat Sekretaris Bidang Perbankan Syariah Badan Pengurus Harian Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (BPH DSN MUI), Ustaz Muhammad Maksum, menjelaskan, dana salah transfer adalah milik nasabah yang salah mentransfer dan bukan hak nasabah yang menerima dana salah transfer tersebut. Nasabah penerima dana salah transfer itu pun tidak boleh menggunakan dana tersebut. Di dalam Islam, terdapat ketentuan terkait suatu kepemilikan haruslah jelas status dan sebabnya. Misalnya, karena sebab hibah atau hadiah, jual beli, atau perpindahan kepemilikan lainnya.

Ustaz Maksum menjelaskan, dalam konteks kesalahan mentransfer tersebut, pihak pemilik dana tidak memiliki niatan memindahkan kepemilikan dana kepada rekening nasabah yang kemudian menerima dana salah transfer. Itu terjadi bisa karena itu *human error* seperti kesalahan menginput data nomor rekening. Oleh sebab itu, jelas Ustaz Maksum, penerima dana salah transfer wajib hukumnya mengembalikan seluruh dana tersebut.

"Sehingga, uang yang ada di dalam rekening kita karena kesalahan transfer orang lain adalah merupakan milik orang lain tersebut, bukan milik kita, sehingga kita tidak boleh memanfaatkannya. Apabila seseorang yang tadi itu merasa salah transfer kemudian mengetahui rekening kita yang menerima dan dia meminta kembali maka kewajiban kita sebagai Muslim harus mengembalikan seluruh uang yang kita terima tersebut. Misal transfer yang kita terima 1 juta maka sebesar uang tersebut yang harus kita transfer kembali kepada pemiliknya yang salah transfer tersebut," kata Ustaz Maksum yang juga dosen tetap UIN Sunan Hidayatullah Jakarta kepada *Republika*, beberapa waktu lalu.

Fikih Islam memberikan tuntunan agar seorang Muslim berhati-hati ketika mendapati harta yang statusnya tidak jelas karena beberapa kemungkinan semisal status hukumnya yang tidak jelas atau pun status pemiliknya yang tak jelas. Ustaz Maksum mengatakan, berdasarkan Fatwa MUI Nomor 123 Tahun 2018 yang dikeluarkan DSN MUI, uang yang tidak jelas pemiliknya, atau pemiliknya jelas tapi tidak diketahui keberadaannya atau proses mengembalikan uang tersebut memiliki biaya yang lebih besar dari jumlah uangnya, uang tersebut tidak boleh dimiliki atau pun digunakan untuk kepentingan pribadi. Melainkan harus disalurkan untuk kepentingan sosial. Fatwa yang dikeluarkan DSN MUI ini berlaku pada lembaga keuangan syariah.

"Karena itu, kalau kita mencoba melihat dari konteks individu atau pribadi-pribadi seseorang maka uang tersebut tidak boleh digunakan oleh pribadi-pribadi. Dan kalau kita melihat konsep *luqathah* di dalam Islam, uang tersebut harus diumumkan dulu selama paling tidak selama satu tahun agar supaya pemiliknya itu mengetahui. Sampai setahunn tidak ada pemiliknya yang mengetahui, maka harta tersebut itu harus digunakan untuk kepentingan sosial," kata dia.

Oleh karena itu, jelas Ustaz Maksum, ketika seorang Muslim mendapatkan dana yang tidak jelas maka terlebih dulu mencari tahu pemiliknya dan mengembalikan. Namun, bila tidak ada pemiliknya, dapat digunakan untuk kemaslahatan umum. Sementara berkaitan dengan dana salah transfer rekening, Ustaz Maksum menjelaskan, sistem dan layanan perbankan dan lembaga keuangan masa kini telah memberikan kemudahan dan solusi bagi seorang nasabah yang mendapati dana salah transfer. Perbankan pun akan mudah melacak asal dana tersebut atau pemilik dana.

ANTARA

Sebab itu, menurut Ustaz Maksum, ketika seorang mendapat dana salah transfer sebaiknya segera datang melapor ke perbankan dan meminta proses pengembalian dana tersebut kepada pemilik dana. Atau pun jika terdapat kendala proses pengembalian di perbankan, maka dapat mendatangi pengaduan nasabah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk melaporkan kejadian dana transfer yang salah kirim tersebut. Upaya ini merupakan bagian dari menjalankan prosedur atau ketentuan hukum syariat dan negara.

"Apa yang dilakukan ini adalah merupakan satu klarifikasi hukum positif dan juga untuk membebaskan diri dari ketentuan-ketentuan agama Islam terkait dengan kepemilikan harta tersebut, sehingga kalau kita sudah serahkan ke bank, bank untuk mentransfer ke rekening yang mentransfer. Atau kita laporkan dan kembalikan dananya ke OJK maka proses tanggung jawab kita sebagai penerima transfer itu sudah terbebas secara hukum Islam maupun secara hukum positif. Dan itu juga secara hukum kita akan terbebas dari tuntutan-tuntutan di kemudian hari karena kita dianggap lalai menggunakan harta yang bukan miliknya," kata dia. ■ ed: a syalaby ichsan

Perguruan Diniyyah Putri Padang Panjang Sumatra Barat

Berkarya Lewat Robot

ANTARA

Kini sudah ada dua robot pelayan kafe yang dibuat santri Diniyyah.

■ ANDRIAN SAPUTRA

Para santri Perguruan Diniyyah Putri Padang Panjang, Sumatra Barat, berhasil membuat robot pelayan kafe. Robot itu mampu melayani pengunjung kafe di lingkungan pesantren dengan sangat baik, seperti mengantarkan pesanan makanan dan minuman. Keberhasilan santri Diniyyah membuat robot bermula ketika beberapa santri mengikuti perlombaan robotik tingkat nasional. Santri Diniyah yang mengikuti ekstra kurikuler robotik di pesantren pun merancang robot yang dapat bergerak dengan membaca garis hitam.

FACEBOOK

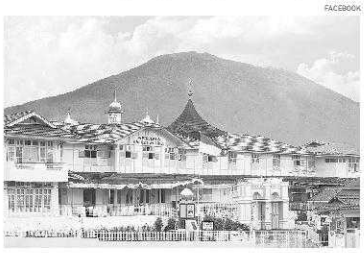

Saat itu bentuk robot masih sederhana. Namun, dari 540 peserta, mereka mampu menjadi juara ketiga dalam kompetisi itu. Para santri Diniyyah kemudian mengembangkan dan mendesain ulang robot tersebut sehingga dapat memiliki fungsi lebih atau dapat membantu pekerjaan manusia. Kini, sudah ada dua robot pelayan kafe yang dibuat santri Diniyyah. Yaitu satu robot yang bergerak dengan membaca garis hitam, satu robot lainnya bergerak dengan dioperasikan melalui remote kontrol. Para santri pun tengah berencana membuat tipe robot lainnya yang memiliki fungsi berbeda.

"Ada beberapa robot yang mau kita kembangkan yang memang menggunakan *artificial intelligence*, yang lebih fungsional. Untuk kegiatan belajar, tahfiz, kegiatan sekolah itu sedang kita siapkan beberapa. Mungkin prototipenya selesai Juni," kata Pimpinan Perguruan Diniyyah Putri Padang Panjang, Ustazah Fauziah Fauzan el-Muhammady, kepada *Republika*, beberapa waktu lalu.

Kegiatan sehari-hari para santri Diniyyah Putri Padang Panjang tidak hanya mengaji dan mengikuti pembelajaran formal di kelas. Di sini, santri dapat mengalurkan minat dan bakatnya agar lebih berkembang dengan mengikuti berbagai ekstrakurikuler. Ada sekitar 48 ekskul dengan ratusan karya santri di dalamnya. Semisal dalam pengembangan literasi, banyak santri yang telah mampu membuat novel, cerpen, komik pembelajaran, buku panduan, dan lainnya. Untuk pengembangan teknologi informasi, para santri Diniyyah pun telah mampu membuat aplikasi, video, membuat, dan mengelola situs daring.

Dalam bidang seni dan mode, santri mampu membuat kaligrafi, merancang busana Muslimah, jilbab, dan lainnya. Untuk eksul pengembangan sains, para santri sudah mampu membuat pupuk cair dari limbah nasi, sabun dari limbah minyak, dan lainnya. Ada juga ekskul berkaitan dengan kuliner semisal membuat produk-produk makan dan minuman yang juga punya nilai jual. Menurut Fauziyah, ada sekitar 470 proyek buatan santri Diniyyah yang beberapa waktu lalu dipamerkan dalam acara pesantren. Beberapa karya santri pun tengah diajukan agar mendapatkan legalitas paten Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI).

"Santri tidak hanya memperlajari pelajaran secara akademisi tapi mereka langsung praktiksnya dan manfaatnya apa bagi kehidupan, sehingga mereka tahu bahwa mereka harus menciptakan manfaat sebaik-baiknya. Bermanfaat bagi orang lain," kata Ustazah Fauziah.

Ustazah Fauziyah berharap dengan beragam skill yang dimiliki para santri, membuat mereka dapat berkolaborasi, baik semasih belajar maupun setelah lulus, untuk membuat karya-karya yang bermaslahat bagi masyarakat. Menariknya lagi perguruan Diniyyah Putri Padang Panjang tak menerapkan *ranking* untuk mengukur prestasi santri sebagaimana lembaga pendidikan lainnya.

Selain tak ada *ranking*, santri juga tidak dibebani dengan PR sehari-hari. Penerimaan santri bahkan tidak berdasarkan hasil ujian nasional (UN). Perguruan Diniyyah Putri Padang Panjang mempunyai tekad untuk menggali dan mengembangkan kemampuan santri dalam bidang yang disenangi.

Para santri juga didorong agar dapat menjadi penghafal Alquran. Minimal santri dapat menghafalkan tiga juz. Namun, para pengajar sangat memotivasi santrinya yang mempunyai kemampuan menghafal untuk bisa mengkhatamkan 30 juz. Ada tiga jurusan yang dapat dipilih santri pada tingkat pendidikan aliyah, yakni IPA, IPS, dan agama.

■ **ed:** a syalaby ichsan

> **Ada beberapa robot yang mau kita kembangkan yang memang menggunakan *artificial intelligence*, yang lebih fungsional.**

PROFIL PESANTREN

Nama:
Perguruan Diniyyah Putri Padang Panjang

Alamat:
Jalan Abdul Hamid Hakim No 30, Ps. Usang, Kec. Padang Panjang, Kota Padang Panjang, Sumatra Barat.

Program Pendidikan:
Asrama, Paud Rahmah el-Yunusiyyah, MI Rahmah el-Yunusiyyah, MTSS DMP Diniyyah Putri, SMP Diniyyah Putri, MAS KMI Diniyyah Putri, Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Diniyyah Putri Rahmah el-Yunusiyyah

Total santri: 1.200 santri

SPP:
Rp 2 juta per bulan (termasuk makan, kegiatan dan keperluan santri dan berbagai hal lainnya).

REHAL

Petualangan Anak Mencari Allah

Bertualang menjadi aktivitas sehari-hari anak. Kepalanya kaya dengan rasa ingin tahu terhadap apa pun. Dia akan bertanya mengenai benda, binatang, tumbuhan dan siapa pun yang ada diperkenalkan kepadanya. Saat anak mulai diajarkan untuk mengenali Allah Ta'ala, rasa penasaran juga kerap membuncah. Siapa sosok yang disebut sebagai Sang Maha Pencipta itu?

Buku anak yang didominasi dengan ilustrasi ini menceritakan dua karib, Kareem dan Khaleel (kucingnya) yang penasaran mengenai keberadaan Allah Ta'ala. Layaknya kisah Nabi Ibrahim AS mencari Tuhan karena sempat bertanya apakah bulan dan matahari sosok Tuhan sebenarnya. Mereka pun memutuskan untuk bertualang mencari Allah sampai dapat.

Mereka mengangkasa dengan menumpang burung. Mereka juga ke hutan dan bertemu harimau beserta penghuni lainnya. Mereka pun ke laut hingga sampai ke benua antartika untuk menyaksikan aurora. Tidak puas sampai di situ, mereka pun dengan dibantu kawanan hewan, membuat roket dari pecahan pesawat yang ada. Mereka lantas memutuskan untuk melanglang ke luar angkasa guna mencari keberadaan Allah.

Di sana, mereka menyusuri planet satu demi satu. Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus hingga Neptunus mereka jelajahi. Dari atas sana, Kareem dan Khaleel menyaksikan begitu hebat keberadaan alam semesta. Meski demikian, mereka belum sadar di mana sebenarnya Allah berada.

Judul Buku	: Kareem dan Khaleel Mencari Allah
Penulis	: Junissa Bianda
Penerbit	: Buah Hati
Tahun Terbit	: 2021
Tebal Buku	: 34 Halaman

Sampai pada satu waktu, titik kesadaran itu mereka dapatkan. Ternyata, semua makhluk berikut alam semesta merupakan bukti keberadaan-Nya.

Apa yang mereka saksikan berupa binatang-binatang di hutan, ikan dan makhluk-makhluk aneh di laut, gradasi cahaya di langit aurora hingga kemegahan planet-planet di luar angkasa merupakan bukti jika Allah ada. Meski tak tertihat, Allah selalu mendengar doa-doa yang mereka panjatkan. Ini menjadikan mereka sadar bila Allah teramat dekat dengan mereka karena bisa mendengar doa yang terucap dari dalam hati. Alhasil, Kareem dan Khaleel memutuskan untuk pulang karena perutnya sudah lapar.

■ **ed:** a syalaby ichsan

Romansa Dua Dunia

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menyebutkan, romansa adalah novel atau kisah prosa lainnya yang berciri khas tindakan kepahlawanan, kehebatan, dan keromantisan.

Novel *Di Antara Dua Cinta* yang ditulis oleh Mustofa Najib merupakan contoh romansa yang sangat apik. Novel tentang perjuangan orang-orang Hadrami (perantau dari Hadramaut, Yaman Selatan) di tanah Jawa (Indonesia) sejak akhir abad ke-19 hingga abad ke-20 ini tidak hanya menyuguhkan kegigihan para Hadrami—yang menembus jarak sejauh 7.000 km dengan kapal laut selama berpuluh hari—untuk mencari kehidupan dan penghidupan yang lebih baik di tanah subur nan indah bernama Jawa (Indonesia).

Novel ini pun dibumbui kisah cinta yang sangat kuat dari para tokohnya. Umar dengan dua istrinya: Khadijah yang merupakan wanita tangguh asli Hadramaut dan tinggal di negeri asalnya, dan Aisyah, seorang wanita keturunan Hadrami yang tinggal di Solo.

Umar meninggalkan negeri leluhurnya saat berusia 26 tahun. Ia menitipkan istrinya yang saat itu berusia 21 tahun dan dua anaknya yang masih kecil, Muhammad dan Lulu, kepada Allah. Di Jawa, Umar kemudian menikahi Fatimah yang akhirnya terpaksa dia ceraikan karena alasan yang tidak bisa ditawar lagi. Ia lalu menikah lagi dengan Aisyah yang menjadi pendamping setia hingga ajal menjemputnya.

Setelah sukses membangun bisnis di Tanah Jawa—yang hasilnya sebagian dikirim untuk menafkahi keluarganya di Hadramaut—selama 35 tahun, akhirnya ia pun kembali ke negeri leluhurnya untuk menengok istri dan anak-anaknya. Sungguh perjumpaan yang tak pernah terbayangkan oleh istri dan anak-anaknya, walaupun mereka memimpikannya.

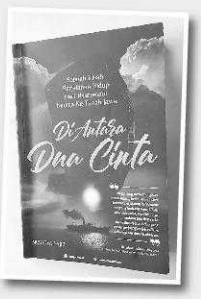

Judul	: Di Antara Dua Cinta
Penulis	: Mustofa Najib
Penerbit	: Telaga Cinta
Cetakan	: I, Januari 2021
Tebal	: xxii + 182 hlm

Umar sempat ingin tinggal berlama-lama di Seiyun—tempat kelahirannya di Hadramaut—tetapi panggilan kerinduan untuk kembali ke Solo (rumahnya bersama Aisyah)—selalu mengetuk hatinya. Akhirnya, ia pun kembali ke Jawa. Namun, setelah berada di Jawa, ia ingin kembali ke Hadramaut, ingin wafat dan dikuburkan di sana.

Bagaimanapun, ia tidak bisa memilih salah satu di antara dua cinta: Khadijah dan Aisyah. Ia juga tidak bisa menjatuhkan pilihan pada Seiyun ataukah Solo. "Dua kota yang berjarak ribuan kilometer ini sama-sama tempat pulang bagiku." (Hlm 152).

"Di hatiku, Seiyun dan Solo saling berebut kedudukan dan keduanya sama kuat. Sebuah pergulatan yang tak pernah selesai dan melelahkan. Aku hidup di antara dua cinta." (Hlm 153).

Tidak hanya romantisme Umar, Khadijah, dan Aisyah yang mampu menyentuh sisi terdalam perasaan cinta kita, novel ini pun kaya dengan sejarah, terutama tentang perjuangan orang-orang Hadrami keluar dari tantangan kemiskinan untuk mencari kehidupan yang lebih baik di tanah rantau. Juga tentang sejarah tentang tanah impian bernama Jawa (Indonesia), dari Jakarta (Batavia), Surabaya, Pekalongan, Solo, dan kota-kota lain di mana banyak orang Hadrami bermukim.

Membaca novel ini kita seperti disuguhkan lembaran-lembaran sejarah sambil menikmati romantika dua dunia, romantika dua cinta.

■ Irwan kelana **ed:** a syalaby ichsan

Kedaulatan Pangan Hak Para Mustahik

WIHDAN HIDAYAT/REPUBLIKA

Berbicara mengenai kedaulatan pangan, tak lepas dari ujung tombak pangan, yakni petani.

■ IMAS DAMAYANTI

Kedaulatan pangan sudah selayaknya menjadi kepastian bagi setiap warga. Pemenuhan akses pangan kepada setiap manusia harus dipenuhi tidak terkecuali bagi para mustahik.

Vice President Program Wakaf Ekonomi Produktif Global Wakaf Aksi Cepat Tanggap (ACT), Sri Eddy Kuncoro, mengatakan, perjuangan terhadap kedaulatan pangan harus dimonitor mulai dari sisi hulu hingga hilir. Misalnya, berbicara mengenai kedaulatan pangan, tak lepas dari ujung tombak pangan, yakni petani. "Petani dalam hal ini *kan* mayoritasnya adalah petani padi dan sawah. Inilah program pangan yang kita sasar, pangan produktif," kata Eddy saat dihubungi *Republika*, Rabu (3/3).

Dia menjelaskan, sasaran program kedaulatan pangan terhadap petani untuk mengatasi berbagai persoalan pangan yang masih terjadi hingga saat ini. Permasalahan pangan pun umumnya masih menjadi kendala yang kerap menyasar kalangan mustahik.

Untuk itu, dia menegaskan, ACT menjalankan program pangan produkif dengan memasukkan intervensi teknologi guna mendorong akselerasi produksi petani. Tanpa menggunakan intervensi teknologi, dia menjelaskan, dari 1 hektare lahan sawah hanya bisa menghasilkan 5-6 ton gabah kering panen (GKP). Sedangkan idealnya, hasil produksi satu hektare sawah dapat menghasilkan 7-8 ton GKP. "Tapi, kalau ada intervensi teknologi, itu bisa menghasilkan sampai 14-15 ton GKP per hektare," kata dia.

> **"Belum lagi adanya impor-impor beras murah yang semakin memukul petani. Jadi, tantangannya itu dari hulu ke hilir. Padahal kita tahu, dalam kedaulatan pangan juga ada hak-hak mustahik di sana."**

Dengan hasil yang lebih itu, dia berharap para petani dapat mendistribusikan hasil produksinya dengan baik. Menurut dia, ACT bekerja sama dengan para petani di beberapa wilayah yang sukses menggunakan intervensi teknologi dalam berproduksi. Mereka membagikan pengetahuan tersebut kepada para mustahik di sekitar wilayah tersebut.

Adapun aspek selanjutnya adalah dari sisi permodalan. Menurut dia, hingga kini rata-rata petani masih sering terjerat utang kepada para tengkulak dan rentenir sebesar Rp 1 juta-Rp 3 juta per waktu panen (empat bulan sekali untuk panen padi). Permasalahan harga masih kerap dimainkan oleh para tengkulak dan rentenir yang menyebabkan petani sulit mengatur harga agar balik modal.

"Belum lagi adanya impor-impor beras murah yang semakin memukul petani. Jadi, tantangannya itu dari hulu ke hilir. Padahal kita tahu, dalam kedaulatan pangan juga ada hak-hak mustahik di sana," kata Eddy.

Direktur Utama Laznas Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Supendik mengungkapkan, program lumbung pangan BMH berupaya menyasar para mustahik. Khususnya kepada kalangan santri agar dapat memperoleh akses jaminan pangan yang baik guna menunjang pemenuhan gizi. "Mengingat begitu besar dampaknya kekurangan gizi di masyarakat, ini harus jadi perhatian dan tanggung jawab kita semua. Program yang berkaitan dengan gizi, salah satunya telah kami rangkul dengan program lumbung pangan santri," kata dia.

Program tersebut, kata dia, menjalankan akivitas di bidang pertanian serta peternakan yang melibatkan para santri. Pada tahun ini, dia mengatakan, program lumbung pangan santri dilakukan dengan menyediakan lahan sawah seluas 200 hektare di Sulawesi Selatan.

"Kami berharap program ini nantinya bisa menyediakan pangan santri-santri kami di seluruh Indonesia. Untuk itu, kami mengajak kepada para muzaki untuk terlibat dalam program ini," kata Supendik.

■ ed: a syalaby ichsan

KOMUNITAS

Trauma Healing UMM untuk Korban Longsor Nganjuk

■ WILDA FIZRIYANI

Mobil Kaca Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) bekerja sama dengan Mahasiswa Relawan Siaga Bencana (Maharesigana) kembali melakukan aktivitasnya dengan mengunjungi Desa Selopuro, Ngetos, Kabupaten Nganjuk. Mereka memberikan *trauma healing* untuk anak-anak yang berada di tempat pengungsian.

Penanggung jawab pengungsian Eko S mengatakan, kehadiran Mobil Kaca UMM selain memberikan edukasi juga sangat menghibur anak-anak yang berada di tempat pengungsian. Kegiatan dimulai dengan mengajak anak-anak untuk bermain beberapa permainan, seperti estafet *holahoop, moving* bola, dan bermain kata. "Setelah itu, anak-anak disuguhkan dengan film-film kartun Islami," kata Eko.

Selesai menonton, anak-anak dibebaskan untuk membaca buku yang tersedia di Mobil Kaca. Untuk anak-anak yang belum bisa membaca, mereka bisa berkumpul untuk mendengarkan dongeng.

Menurut Eko, anak-anak biasanya bermain sendiri di tempat pengungsian. Mereka jarang ada kegiatan bermain bersama, membaca buku, dan menonton film. Oleh karena itu, dia sangat berterima kasih kepada UMM dan mobil Kaca karena telah menghibur dan mengedukasi anak-anak di tempat pengungsian.

Berbagai kegiatan yang dirancang untuk anak-anak kali ini merupakan upaya untuk mengurangi rasa cemas dan khawatir yang dialami anak-anak setelah bencana banjir dan tanah longsor. Anggota Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC) Kabupaten Nganjuk, Sitta Ardilillahi Ulfa, berharap kegiatan ini tidak hanya berhenti untuk anak-anak. Mengingat masa pengungsian masih akan lama, ia berharap akan ada program lanjutan yang ditujukan untuk remaja dan dewasa.

WILDA FIZRIYANI/REPUBLIKA

Koordinator Lapangan Mobil Kaca UMM Nurul Hamidah mengaku sempat terkejut dan senang dengan antusiasme anak-anak dalam mengikuti kegiatan. Anak-anak terlihat senang ketika Mobil Kaca UMM memutar film kartun. Lalu, ketika sesi membaca buku, anak-anak langsung menyerbu dan memilih buku-buku yang mereka sukai untuk dibaca. "Bahkan, beberapa orang dewasa juga ikut membaca buku," ucap perempuan yang disapa Mida ini.

Mida menegaskan semua kegiatan dilakukan dengan protokol kesehatan yang ketat. Para relawan harus mendapatkan hasil negatif dalam tes usap antigen. "Selain itu, para relawan juga wajib mengenakan masker dan mencuci tangan selama berkunjung di kamp pengungsian," ujar dia dalam pesan resmi yang diterima *Republika*, Senin (1/3).

■ ed: a syalaby ichsan

Kajian Muslimat NU Ustazah Lilik Umi Kaltsum

Tafsir Surah Al-Waqi'ah

YOUTUBE MUSLIMAT NU OFFICIAL

● Ustazah Lilik Umi Kaltsum

Surah ini dibuka dengan penjelasan tentang hari kiamat yang pasti terjadinya dan tak bisa didustakan.

■ ANDRIAN SAPUTRA

Surah al-Waqi'ah termasuk kategori surah Makkiyah dalam Alquran yang diturunkan sebelum peristiwa hijrahnya Rasulullah ke Madinah. Surah ini terdiri atas 96 ayat. Berdasarkan tartib mushafi atau urutan surah, al-Waqi'ah berada pada urutan surah ke-56. Berdasarkan tartib nuzuli atau urutan turunnya, surah al-Waqi'ah turun sebelum surah as-Syu'ara dan setelah surah Thaha. Secara global, surah al-Waqi'ah menjelaskan tentang peristiwa kiamat, tentang hari pembalasan yang tak dipercayai kaum musyrik, hingga tentang penghuni surga dan neraka.

Pakar tafsir Alquran yang juga pengajar ilmu Alquran dan tafsir Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Ustazah Lilik Umi Kaltsum, menjelaskan, surah al-Waqi'ah memiliki arti 'terjadi'. Kata al-Waqi'ah dengan menggunakan isim makrifat mengandung makna sebuah kejadian yang agung, besar. Para ulama berpendapat itu maknanya, yakni hari kiamat. Oleh karena itu, sebutan lain dari hari kiamat adalah yaumul waqiah.

Surah ini dibuka dengan penjelasan tentang hari kiamat yang pasti terjadinya dan tak bisa didustakan. Pada ayat 4-6 digambarkan tentang kondisi alam semesta ketika terjadinya hari kiamat. Pada hari itu, Allah menggguncangkan bumi dengan begitu dahsyat, menghancurkan gunung-gunung laksana debu yang berterbangan.

Ustazah Lilik yang juga alumnus pesantren Sunan Pandanaran Yogyakarta dan anggota Lajnah Pentashih Mushaf Alquran Kemenag RI menjelaskan setelah proses kiamat manusia akan memasuki fase yang disebut hari pembalasan. Pada fase ini, manusia terbagi menjadi tiga golongan. Yakni golongan *Asabiquna Sabiqun, Ashabul Yamin, dan Ashabus Syimal*.

Kelompok *Asabiquna Sabiqun* adalah kelompok orang-orang yang lebih dulu beriman. Kelompok ini yang pertama masuk ke dalam surga. "Ini (kelompok) orang-orang yang termulia, yang mendapatkan surga penuh nikmat. Yang paling awal, terdepan memperoleh hidayah Allah dan masuk surga," kata Ustazah Lilik saat mengisi kajian daring tafsir surah al-Waqiah yang diselenggarakan Muslimat Nahdlatul Ulama (NU), beberapa hari lalu.

Ustazah Lilik menjelaskan, kelompok ini akan mendapatkan berbagai kenikmatan surga sebagaimana dijelaskan pada ayat 15-24. Tak ada ucapan yang sia-sia yang keluar dari lisan mereka, melainkan mereka mengucapkan salam kedamaian. Sedangkan *Ashabul Yamin* atau golongan kanan juga adalah orang-orang saleh meski kedudukannya berada di bawah *Assabiquna Sabiqun* atau orang-orang terdahulu. Kelompok *Ashabul Yamin* pada ayat 39-40 dijelaskan bahwa kelompok ini sebagian dari orang-orang terdahulu dan sebagian dari orang-orang kemudian. Kelompok ini juga memperoleh naungan dan kenikmatan surga.

Sementara itu, *Ashabus Syimal* atau golongan kiri adalah mereka yang mendapatkan siksaan pedih di neraka. Mereka merasakan mendidihnya api neraka, dan kesengsaraan di dalamnya. Pada ayat 45-46 pun dijelaskan tentang sebab kelompok ini masuk ke dalam neraka. "Mereka berfoya-foya waktu hidupnya di dunia, menggunakan harta tak pada tempatnya secara berlebihan. Mereka berbuat dosa besar, tidak percaya hari kebangkitan," ujar dia.

Surah al-Waqi'ah juga menjelaskan bagaimana pertanyaan-pertanyaan kaum musyrikin yang meragukan dan bertanya tentang hari kebangkitan. Alquran menjawabnya dengan logis. Sebagaimana pada ayat 57-58 yang menjelaskan tentang penciptaan manusia. Kemudian penjelasan tentang siapa yang menumbuhkan benih tanaman, tentang siapa yang menurunkan air dari awan, tentang api yang menyala, tentang siapa yang menumbuhkan kayu dan lainnya. Setelah itu semua, dalam al-Waqiah Allah menyeru agar manusia bertasbih kepada Allah.

"Allah telah memberikan semuanya kepada manusia. Maka, kenapa berat *banget* untuk mensucikan Allah. Maka, mereka dijelaskan secara logika, tetapi tidak mau beriman," kata dia.

Ustazah Lilik juga menjelaskan tentang keutamaan surah al-Waqi'ah. Sebagaimana dalam sebuah riwayat Rasulullah mengatakan siapa yang membaca surat al-Waqi'ah setiap malam hari, selamanya orang tersebut tidak akan tertimpa kemiskinan. Keterangan ini dapat ditemukan dalam *Tafsir Ibnu Katsir* jilid I halaman 281. ■ ed: a syalaby ichsan

> **Mereka berfoya-foya waktu hidupnya di dunia, menggunakan harta tak pada tempatnya secara berlebihan. Mereka berbuat dosa besar, tidak percaya hari kebangkitan.**

FIKIH MUSLIMAH

Perempuan-Perempuan yang Haram Dinikahi pada Waktu Tertentu

■ IMAS DAMAYANTI

Islam memperbolehkan bagi laki-laki maupun perempuan untuk memiliki pasangan hidup sesuai dengan aturan yang berlaku. Oleh karena itu, hak seseorang untuk menikah bukan berarti bisa dilakukan dengan sebebas-bebasnya.

Salah satu yang diatur adalah mengenai larangan bagi laki-laki untuk menikahi perempuan-perempuan pada waktu tertentu yang terlarang dalam syariat. Muhammad Bagir dalam buku *Muamalah Menurut Alquran, Sunah, dan Para Ulama* menjelaskan, beberapa perempuan haram untuk dinikahi bukan karena adanya pertalian nasab (keturunan), melainkan karena adanya status tertentu yang menyertainya.

Pertama, diharamkan memperistri dua orang kakak beradik. Haram hukumnya mempermadukan (menghimpunkan) antara dua orang perempuan kakak beradik dalam satu pernikahan pada suatu masa yang bersamaan.

Diharamkan juga mempermadukan antara seorang perempuan dan bibinya (baik dari pihak ibu maupun saudara ayah). Sebagaimana juga yang diharamkan mempermadukan antara dua orang perempuan yang ada hubungan mahram antara keduanya. Seandainya salah seorang dari keduanya adalah laki-laki, tidak dibenarkan berlangsungnya pernikahan antara keduanya.

Sebagai contoh, seseorang yang mengawini perempuan lalu menikahi juga keponakannya. Larangan ini dijelaskan secara tegas sebagaimana firman Allah dalam Alquran surah an-Nisa ayat 23 dan hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Nabi Muhammad SAW melarang laki-laki menghimpunkan (dalam suatu pernikahan) antara seorang perempuan dan bibinya.

Adapun alasan diharamkannya pernikahan jenis tersebut adalah untuk menjaga kerukunan dan ketenangan dalam kehidupan berkeluarga. Bagaimanapun, hal-hal semacam itu dapat menimbulkan perasaan saling curiga, cemburu, benci, dan saling bermusuhan yang dapat berakibat pada hancurnya pertalian saudara dan kasih sayang. Dijelaskan juga bahwa pernikahan semacam ini jelas dilarang bukan hanya dalam suatu perkawinan yang masih berlangsung, melainkan ketika si istri pertama belum melewati masa iddahnya setelah diceraikan oleh suaminya.

Kedua, perempuan yang masih terikat pernikahan dengan orang lain. Haram hukumnya menikahi perempuan yang masih dalam ikatan pernikahan dengan orang lain ataupun yang masih menjalankan masa iddah. Hal itu sebagaimana yang ditegaskan Allah dalam Alquran surah an-Nisa penggalan ayat 24: "*Wal-muhshanaatu minan-nisaa-I illa maa malakat aimanukum*." Yang artinya: "Dan (diharamkan juga bagimu mengawini) perempuan yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu."

Ketiga, larangan menikahi pezina sebelum bertobat. Tidak dihalalkan bagi seorang Muslim mengawini seorang perempuan yang dikenal (berprofesi) sebagai pezina atau pelacur. Sebagaimana juga tidak dihalalkan bagi seorang Muslimah menikahi seorang laki-laki yang dikenal sebagai pezina atau pelacur, kecuali setelah kedua-duanya sudah bertobat.

Hal itu karena Allah SWT telah menjadikan kesucian (yakni kehidupan yang bersih dan terjauhkan dari perzinaan) sebagai salah satu persyaratan yang harus dipenuhi. Aturan itu berlaku baik bagi laki-laki maupun perempuan sebelum berlangsungnya pernikahan.

Keempat, menikahi pezina yang telah bertobat. Untuk pendapat ini, Hasan al-Bashri berpandangan, seorang laki-laki diharamkan untuk selama-lamanya menikahi pasangan perempuannya yang pernah berzina dengannya. Hal itu karena pernikahan merupakan karunia suci Allah SWT bagi hamba-hamba-Nya. Maka dari itu, siapa saja yang menyia-nyiakan karunia itu dan melanggar kesuciannya, dia harus menerima hukuman dengan tidak memperkenankannya meneruskan hubungan dengan pasangannya.

■ ed: a syalaby ichsan

ANTARA

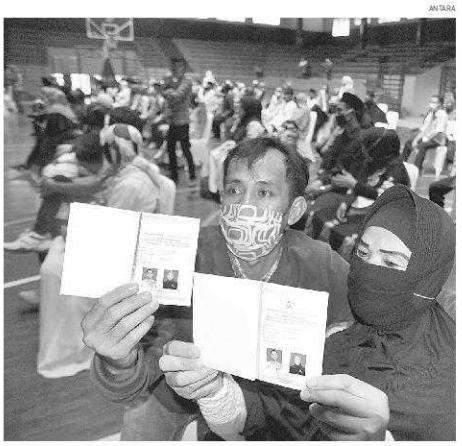

HAFIZA ELVIRA NOFITARIANI

Merawat Budaya Berderma

Di usianya yang masih muda, Hafiza gigih merawat, menggerakkan, dan menghasilkan dampak sosial berkelanjutan bagi Indonesia.

■ IMAS DAMAYANTI

Tidak semua orang bisa merealisasikan cintanya terhadap bangsa dan agama dengan kontribusi nyata. Apalagi, dalam merawat nilai-nilai kebaikan bangsa Indonesia yang dikenal paling dermawan di dunia.

Hafiza Elvira Nofitariani menjadi salah satu anak bangsa yang dapat mengaktualisasikan rasa cinta terhadap bangsa dan agama melalui aksi-aksi nyata. Di usianya yang masih muda, Hafiza gigih merawat, menggerakkan, dan menghasilkan dampak sosial berkelanjutan bagi Indonesia melalui dunia filantropi.

Muslimah yang memenangkan predikat Top 5th Indonesia Young Business Leaders Award (IYBLA) 2021 kategori Function Leader ini diapresiasi atas prestasinya. Dia diganjar penghargaan atas kepemimpinannya sebagai pelaksana tugas (Plt) kepala Divisi Digital Fundraising Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) yang telah mendorong berbagai kemajuan dalam bidang pengumpulan digital. Hafiza juga berkontribusi dalam membentuk dukungan bagi kader muda yang potensial dan berprestasi di lembaga filantropi pelat merah itu.

Sederet prestasi Hafiza merupakan buah dari proses perjalanan yang menempanya hingga kini. Muslimah yang merupakan alumnus Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia (UI) ini juga pernah menyabet predikat sebagai mahasiswi berprestasi pada 2010 silam. Bidang akademik yang digeluti Hafiza tersebut pada akhirnya semakin memupuk minatnya terhadap dunia filantropi kelak.

"Di ilmu keperawatan itu memang sepertinya agak berbeda jauh dengan dunia filantropi. Tapi, justru aspek sosial dan kemanusiaan sama-sama hadir di keduanya. Saya pribadi memang *passion* sekali di aspek *social project* dan kemanusiaan," kata Hafiza saat dihubungi *Republika*, Selasa (2/3).

Hafiza bercerita tentang bagaimana perjalanannya di dunia filantropi bermula. Semasa kuliah, dia kerap aktif mengikuti kegiatan-kegiatan sosial dan kemudian bekerja di Laznas Dompet Dhuafa (DD) setelah menamatkan studi S1-nya. Di DD, Hafiza mengaku mengikuti program *management trainee*. Hafiza menjadi amil selama beberapa tahun di organisasi filantropi tersebut.

Dari sana, Hafiza kemudian meyakini, dunia *non-govermental organization* (NGO) dan perzakatan sangatlah luas. Dia pun mulai memfokuskan diri untuk menerjunkan diri secara serius dan detail. Dalam perjalanannya menekuni dunia filantropi ini, Hafiza mengakui ada banyak tantangan yang perlu dihadapi secara baik dan profesional.

Tantangan pertama yakni bagaimana dia dapat mengelola dana umat agar bisa bermanfaat bagi orang banyak. Kedua, aspek edukasi mengenai zakat dan donasi. Ketiga, bagaimana pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) dapat mengubah mustahik menjadi muzaki. "Dan mungkin salah satu targetnya adalah bagaimana agar angka kemiskinan dapat ditekan sedemikian mungkin lewat dana ZIS yang dikelola," kata dia.

Bermula dari keluarga

Dunia filantropi dan zakat bagi Hafiza adalah jalan dalam mengamalkan nilai-nilai kebaikan yang ia pegang sebagai prinsip. Dia ingat betul bagaimana lingkungan keluarga telah memperkenalkan mengenai aspek-aspek kebaikan sosial mulai skala yang paling kecil di usianya yang masih dini. "Dari keluarga, saya lebih banyak melihat contoh. Jadi, keluarga saya memberikan contoh tentang dunia filantropi, bahwa kita bisa *kok* membantu orang sedari kecil. Dari nenek saya, saya juga belajar itu," kata Hafiza.

Merawat budaya berderma di Indonesia menjadi poin mendalam yang memang merangsang Hafiza agar terus mempersembahkan yang terbaik. Selain karena telah terbukti dalam mengembangkan *digital fundraising* Baznas melalui kanal-kanal digital dengan penghimpunan donasi yang terus meningkat, Hafiza terus membaca pergerakan tren-tren baru dengan meramu berbagai inovasi dengan target yang dicanangkan.

Di tengah kesibukannya, dalam waktu dekat Muslimah yang satu ini juga merupakan penerima beasiswa dari LPDP di salah satu kampus di Amerika Serikat dalam studi *non-profit management*. Baginya, menggali ilmu di dunia filantropi hingga ke negeri-negeri jauh diharapkan dapat membawanya kembali ke Indonesia untuk menerapkannya di Baznas.

"Sambil menunggu berangkat kuliah S-2 ke sana, saya terus kembangkan di digital dengan kampanye-kampanye kreatif. Alhamdulillah, saya *happy* (berkiprah dalam dunia filantropi)," kata dia. ■ **ed:** a syalaby ichsan

> **Salah satu targetnya adalah bagaimana agar angka kemiskinan dapat ditekan sedemikian mungkin lewat dana ZIS.**

Profil

Nama lengkap:
Hafiza Elvira Nofitariani

Tempat, tanggal, lahir:
Jakarta, 22 September 1990

Riwayat pendidikan:
S1 Ilmu Keperawatan, Universitas Indonesia

Riwayat aktivitas/organisasi:
- 2021-saat ini: Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) - Anggota Komite Keuangan Sosial
- 2020: World Zakat Forum Youth Symposium - Coordinator
- 2020-saat ini: Institut Fundraising Indonesia - Associate Trainer
- 2011-2017: Nalacity Foundation - Founder
- 2009-saat ini: Toastmasters International - Public Speaking Organization

Prestasi:
- 2021: Top 4th Indonesia Young Business Leaders Award (IYBLA) - Majalah SWA & PT PLN
- 2017-2018: Amil Terbaik - Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)
- 2015: Delegasi Changing Faces Women's Leadership Seminar, Hawaii, USA

Prof KH Nasaruddin Umar
Imam Besar Masjid Istiqlal

TASAWUF

Teologi Nama dan yang Dinamai (Bagian 3)

Alam berasal dari bahasa Arab, dari akar kata *'alima-ya'lam*, berarti 'mengetahui', 'memahami', kemudian membentuk beberapa kata, seperti *'alim*, jamaknya *'ulama* berarti 'ilmuwan'. Dari akar kata ini juga lahir kata *'alam*, jamaknya *'alamin* berarti 'alam semesta' dan *alamat* berarti 'alamat' atau address.

Dengan demikian, alam tidak bisa dipisahkan dengan ilmu, alam, dan alamat. Siapa yang beralamat pada alam, memerlukan ilmu. Semakin dalam ilmu seseorang, semakin sadar siapa sesungguhnya alam ini. Hubungan segitiga manusia, alam, dan Allah SWT merupakan hakikat yang tersimpul di dalam kitab suci, khususnya dalam Alquran.

Siapa sesungguhnya Yang Maha Esa dan siapa yang tampil banyak dalam bentuk alam semesta merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan. Inilah yang sering disebut oleh kalangan kosmolog Islam: "Satu dalam banyak dan banyak dalam satu wujud" (*al-wahdah fi 'ain al-katsrah fi 'ain al-wahda*).

Ungkapan yang mirip dengan itu ditemukan juga di dalam agama-agama besar lain, seperti dalam kitab Upanisad, kitab suci bagi agama Hindu yang melukiskan Tuhan Yang Mahaagung (Atma) sebagaimana dijelaskan oleh Prof S Abhayananda: "*The one all-pervading Being, who, while transcending this world of light and shadow, is Itself and God are one: ... There are not many, but only ONE*" (Yang satu itu meliputi segala sesuatu, yang menyebabkan terwujudnya cahaya bumi dan banyangannya, Dia itu sendiri: Dia tidak banyak tetapi hanya SATU).

Agak mirip dengan istilah tasawuf yang sering melukiskan Tuhan dengan kalimat unik, seperti "*Faman takhayyala minkum annahu ra'ahu fama 'arafa*" (Barangsiapa di antara kalian mengimajinasikan telah melihat Tuhan maka sesungguhnya dia tidak memahami Tuhan). Pernyataan itu mirip dengan apa yang diungkapkan dalam kitab Upanisad: "*... if you think, 'I know well,' you do not know the Truth. You only perceive that appearance of Brahman produced by the inner senses*" (Jika engkau berpikir, "Saya memahami dengan baik" (tentang Tuhan), berarti engkau belum memahami Tuhan. Engkau hanya beranggapan sendiri tentang keberadaan Tuhan).

Angka satu dalam dunia metafisika tidak sama dengan angka satu dalam dunia fisika atau matematika. Dalam dunia matematika, angka 1 meniscayakan angka 2, 3, 10, 100, 1.000, dst. Akan tetapi, angka satu dalam dunia metafisika tidak meniscayakan angka berikutnya. Dalam bahasa Indonesia sering disebut Allah itu esa, bukan satu.

Sebagaimana telah dijelaskan terdahulu bahwa relasi antara Allah SWT dengan makhluk-Nya dalam pandangan kosmologi, khususnya oleh kalangan ahli teosofi Islam seperti Ibn 'Arabi, tidak seperti yang digambarkan oleh para teolog (ahli ilmu kalam) dan para ahli fikih (*fuqâhâ*) yang menggambarkan Allah SWT sebagai Sang Pencipta (al-Khaliq) dan hambanya sebagai ciptaan (*al-makhluq*), sehingga relasi yang terjalin di antara keduanya ialah relasi kuasa (*power relations*). Allah SWT Sang Raja yang disembah dan makhluk termasuk manusia adalah hamba yang harus menyembah kepada-Nya. ■

KANTOR PERWAKILAN JAWA BARAT
Jl Mangga No 47 Bandung
Telp : 022 - 87243363/87243364
Faks : 022 - 87243365
E-mail : jabar@republika.co.id
jabar@redaksi.republika.co.id

ABDAN SYAKURA/REPUBLIKA

CEK PANGAN

Petugas menguji kadar residu pestisida sayuran kangkung di Mobil Laboratorium Keliling Keamanan Pangan Segar di Jalan Taman Raflesia, Kiaracondong, Kota Bandung, Kamis (4/3). Dinas Pangan dan Pertanian Kota Bandung menyediakan mobil laboratorium untuk pemeriksaan gratis mutu pangan segar, seperti sayuran, buah, dan daging, guna memastikan keamanan warga mengonsumsinya.

342 Kendaraan Diamankan

Warga yang merasa kehilangan bisa mengecek kendaraan di kantor kepolisian.

■ DJOKO SUCENO, BAYU ADJI P

BANDUNG — Jajaran kepolisian di wilayah hukum Polda Jawa Barat (Jabar) mengamankan 342 unit kendaraan sebagai barang bukti kasus pencurian kendaraan bermotor (curanmor). Barang bukti diamankan selama Operasi Jaran Lodaya 2021, yang digelar sejak 22 Februari hingga 3 Maret lalu.

Kepala Bidang Humas Polda Jabar Kombes Pol Erdi A Chaniago mengatakan, Operasi Jaran Lodaya ini menyasar pelaku curanmor dan penadah kendaraan hasil curanmor. Dari hasil operasi, kata dia, kebanyakan barang bukti yang diamankan berupa kendaraan roda dua. "Kendaraan bermotor roda dua berjumlah keseluruhannya 322 unit," kata dia, saat rilis pengungkapan kasus di Markas Polda Jabar, Kota Bandung, Kamis (4/3).

Selain itu, diamankan juga 19 unit kendaraan roda empat dan satu unit kendaraan roda enam. Selama operasi, Erdi mengatakan, polisi juga menangkap 249 tersangka. Di mana 37 di antaranya merupakan target operasi (TO). Menurut dia, ada sejumlah tempat yang menjadi sasaran curanmor ini. Paling banyak, kata dia, sasarannya kendaraan yang berada di teras atau garasi rumah dan tempat kontrakan. Selain itu, kendaraan yang terparkir di pinggir jalan raya atau fasilitas umum.

Menurut Erdi, kejadian curanmor ini paling banyak terjadi pada sekitar pukul 24.00 WIB-06.00 WIB. Ia menjelaskan, modus curanmor ini, antara lain dengan merusak kunci kendaraan menggunakan kunci leter T. Ada juga tersangka yang membobol jendela atau rumah sasaran. Selain itu, kata dia, modusnya memepet kendaraan korban di jalan. "Perampasan roda dua dengan cara memepet kendaraan yang jadi sasaran, dengan menggunakan senjata tajam atau senjata api," kata dia.

Bagi warga yang kehilangan kendaraan, Erdi mempersilakan untuk mengecek langsung ke markas polres. "Silakan hubungi polres masing-masing di mana masyarakat tinggal dan kendaraan tersebut hilang. Kami siap membantu untuk memfasilitasi dalam proses pinjam-pakai kendaraan apabila diperlukan, sepanjang penyidikan sudah selesai," ujarnya.

Polres Tasikmalaya Kota pun mempersilakan warga yang kehilangan kendaraan untuk mengecek ke markas polres, serta membawa bukti kepemilikan kendaraan. Di wilayah hukum Polres Tasikmalaya Kota, selama operasi Jaran Lodaya 2021, polisi bisa mengamankan 19 unit kendaraan roda dua yang diduga hasil curanmor.

Barang bukti itu diamankan dari dua tersangka berinisial EJ (28 tahun) dan AWS (45). "Dua orang itu diduga terlibat dalam aksi pencurian di tujuh TKP dalam kurun waktu sejak Agustus 2020-Februari 2021. Seluruhnya berada di Kota Tasik," kata Kepala Polres Tasikmalaya Kota AKBP Doni Hermawan, saat rilis pengungkapan kasus curanmor, kemarin.

Menurut Doni, kasus itu terungkap ketika tersangka EJ, yang diduga penadah, menjual motor lewat media sosial. Polisi kemudian menangkapnya dan melakukan pengembangan. Polisi lantas menangkap tersangka AWS, yang diduga merupakan pelaku curanmor. "Satu tersangka lain masih DPO (masuk daftar pencarian orang), yang melakukan pencurian," kata dia.

Berdasarkan pengakuan tersangka, menurut Doni, sejak tahun lalu ada sekitar 47 unit motor yang dicuri. "Kita terus kembangkan komplotan ini karena masih ada beberapa kendaraan bermotor mereka curi," kata Doni. ■ ed: irfan fitrat

Tahun Ini, Rumah Deret Diharapkan Bisa Dihuni

BANDUNG — Pembangunan rumah deret tahap satu di kawasan Tamansari, Kecamatan Bandung Wetan, Kota Bandung, tengah berjalan. Seluruh pembangunan rumah deret itu diharapkan bisa tuntas pada tahun ini.

Menurut Kepala Bidang Perumahan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Pertanahan dan Pertamanan (DPKP3) Kota Bandung Nunun Yanuati, tahap satu meliputi pembangunan struktur blok A dan C. Di blok C disebut sudah dibangun enam lantai. Sementara di blok A masih tahap pembersihan lokasi, pembangunan fondasi, serta lantai satu dan dua. "Progresnya sampai saat ini sudah mencapai sekitar 56,6 persen tahap satu. Rencananya tahapan ini akan diselesaikan akhir Maret atau awal April," kata dia di Balai Kota Bandung, Kamis (4/3).

Nunun mengatakan, pada tahap satu ini dibangun sekitar 198 unit rumah deret. Adapun keseluruhannya mencapai 498 unit. Setelah tahap satu rampung, kata dia, akan dilanjutkan pembangunan tahap dua. "Dilanjut pembangunan tahap dua tahun 2021. Rencananya mudah-mudahan selesai 2021 dan sudah bisa dihuni," kata dia.

Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung sudah mewacanakan pembangunan rumah deret ini sejak 2017. Namun, upaya merealisasikannya terkendala. Ada sejumlah warga juga yang menyatakan penolakan. Nunun mengatakan, ada juga hambatan dari sisi perizinan yang terbilang lama, serta perubahan desain dan alokasi anggaran. "Ada perubahan desain, sehingga harus beradaptasi kembali, dan RAB (Rencana Anggaran Biaya) berubah, harus diperbaiki lagi," ujar dia.

Nunun mengatakan, pada 2020 dilakukan *refocusing* dan realokasi anggaran akibat terjadinya pandemi Covid-19, yang berimbas terhadap alokasi anggaran untuk pembangunan rumah deret. Menurut dia, pemerintah juga masih berupaya melakukan pendekatan terhadap satu kepala keluarga yang masih bertahan di lokasi pembangunan, juga menawarkan rumah sewa.

Menurut Camat Bandung Wetan, Soni Bakhtiyar, ada satu kepala keluarga yang masih belum setuju dengan pembangunan rumah deret. Pihaknya pun berupaya melakukan pendekatan, termasuk memberikan penjelasan terkait dampak yang dirasakan jika rumah deret sudah ada.

"Apamat kewilayahan melakukan pendekatan dan memberikan penjelasan dampak yang dirasakan sosial ekonomi, apa yang harus dibantu, sehingga warga yang masih merasa hilang atau dirugikan ini mudah-mudahan mereka merasa (rumah deret) bukan program merugikan, tapi manfaat untuk masyarakat," katanya. ■ m fauzi ridwan ed: irfan fitrat

JABAR JUARA

Melalui ADPMET, Emil Siap Perjuangkan Daerah Penghasil Migas

Kematangan infrastruktur jalan, pendidikan, dan lainnya di daerah penghasil migas dan energi harus ditingkatkan.

FOTO-FOTO DOKUMEN HUMAS PEMPROV JABAR

Hadirnya Asosiasi Daerah Penghasil Migas dan Energi Terbarukan (ADPMET) menjadi angin segar bagi masyarakat yang tinggal di daerah penghasil minyak dan gas (migas), serta energi. Melalui ADPMET, kesejahteraan masyarakat di daerah penghasil migas dan energi akan diperjuangkan untuk ditingkatkan.

Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil, yang merupakan ketua umum ADPMET periode 2020-2025, mengemban amanah untuk mengubah nasib warga yang tinggal di daerah penghasil migas di Tanah Air. Emil, panggilan akrab Ridwan Kamil, mengatakan, kesejahteraan masyarakat di daerah penghasil migas perlu ditingkatkan.

Menurut Emil, hingga saat ini kesejahteraan masih menjadi persoalan krusial. Selain itu, angka pengangguran yang tinggi dan infrastruktur yang kurang memadai juga masih menjadi persoalan di daerah penghasil migas.

RIDWAN KAMIL
Gubernur Jabar

> **Kami adalah subjek. Kalau ada perusahaan besar dan global datang ke daerah, maka SDM-nya (harus) dari daerah itu juga.**

Untuk itu, ADPMET di bawah kepemimpinan Emil berkomitmen untuk membawa aspirasi dari daerah penghasil migas dan energi terbarukan agar mendapatkan hak adil. Kekayaan alam Indonesia, harus bermuara pada kesejahteraan masyarakat, khususnya bagi warga yang tinggal di dearah penghasil migas. "Saya ingin rakyat di daerah penghasil energi ini (berpikir), ternyata bumi kita kaya dengan sumber daya energi," ujar Emil di Gedung Sate, Kota Bandung, belum lama ini.

Kekayaan alam itu, sambung Emil, harus berkorelasi dengan kematangan infrastruktur, fasilitas pendidikan, dan lainnya. Emil pun menekankan pentingnya penguatan sumber daya manusia (SDM) di daerah penghasil migas dan energi terbarukan. Ia mengatakan, SDM di daerah penghasil migas tidak boleh hadir hanya sebagai penonton, melainkan harus tampil sebagai subjek yang berdaya secara optimal melalui peningkatan kapasitas, pendidikan, seminar, dan transfer teknologi. "Kami adalah subjek. Kalau ada perusahaan besar dan global datang ke daerah, maka SDM-nya (harus) dari daerah itu juga," kata dia.

Selain mendorong dari sisi pembangunan infrastruktur dan SDM, Emil juga akan merumuskan regulasi yang mendukung kemajuan daerah penghasil migas. Selain itu, kata dia, pihaknya juga tengah menyiapkan pemetaan persiapan daerah untuk memenuhi target 23 persen bauran energi nasional yang dihasilkan oleh energi terbarukan. Sumber daya energi, kata dia, merupakan salah satu sumber kekayaan bangsa ini.

Hal senada dikatakan Bupati Wajo, Amran Mahmud, yang merupakan wakil ketua Bidang Transisi Energi ADPMET. Amran mencontohkan, masih banyak masyarakat yang belum menikmati kelistrikan di daerah penghasil migas, di antaranya Kabupaten Wajo. "Betul sekali, kita miris melihatnya. Bayangkan, Kabupaten Wajo yang sudah menghasilkan energi *power plant* 315 megawatt untuk menyuplai dua provinsi, Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, masih banyak daerah-daerah kami yang infrastruktur kelistrikannya tidak tersentuh," kata Amran. Melalui peran ADPMET, tegas Amran, kondisi tersebut harus segera diubah. ● ril

KANTOR PERWAKILAN
JATENG & DIY
Jl. Perahu No 4 Kotabaru Yogyakarta
Redaksi: (0274) 566 028
Iklan & Sirkulasi: (0274) 544 972
Layanan Pelanggan: 0821 3342 6333
Faksimile: (0274) 541 582

REPUBLIKA

Jawa Tengah & DIY

JUMAT, 5 MARET 2021 | 21 RAJAB 1442 H

www.republika.co.id

@republikajogja @republikajogja RepublikaJogja

WIHDAN HIDAYAT / REPUBLIKA

PENGAMBILAN SOAL TPM SD

Orang tua wali siswa kelas 6 mengambil soal tes pendalaman materi (TPM) asesmen standar penilaian daerah (ASPD) untuk SD/MI di SD Masjid Syuhada, Yogyakarta, Kamis (4/3). TPM tingkat Kota Yogyakarta ini dilakukan jelang ujian nasional. Mengingat kondisi masih pandemi Covid-19, pengambilan soal dilakukan dengan layanan tanpa turun.

Vaksinasi Sasar Pedagang Pasar Legi

Selain pedagang, Dinas Perdagangan juga mendata pelaku-pelaku usaha lainnya.

■ BINTI SHOLIKAH

SOLO — Sasaran vaksinasi Covid-19 bagi pedagang pasar tradisional di Kota Solo, Jawa Tengah, semakin meluas. Dari sebelumnya hanya pedagang di empat pasar, kini bertambah satu lagi yakni Pasar Legi.

Empat pasar tersebut yakni, Pasar Gede, Pasar Klewer, Pasar Depok, dan Pasar Harjodaksino. Sedangkan vaksinasi bagi pedagang di Pasar Legi baru mulai dilaksanakan pada Kamis (4/3).

Kepala Dinas Perdagangan (Disdag) Kota Solo, Heru Sunardi, mengatakan progres vaksinasi di Pasar Gede, Pasar Depok, dan Pasar Harjodaksino cukup bagus. Sasaran vaksinasi pedagang di Pasar Depok sebanyak 200 orang sudah tercapai.

Kemudian, Pasar Harjodaksino dari 360 orang sasaran, baru tervaksin 328 pedagang, sisanya 32 pedagang batal divaksin. Selanjutnya, Pasar Gede dari 618 sasaran sudah tervaksin 582 pedagang, sisanya 36 pedagang ditunda lantaran tidak memenuhi syarat saat screening awal.

"Untuk Pasar Klewer dari target 3.000 pedagang sampai kemarin itu sudah menyentuh angka 1.636 pedagang yang sudah divaksin. Sisanya untuk hari ini (Kamis) sama besok Jumat (5/3)," jelas Heru kepada wartawan, Kamis (4/3).

Ia menyatakan, pelaksanaan vaksinasi pedagang Pasar Klewer pada tiga hari pertama masih sedikit yang berpartisipasi. Alasannya, saat jadwal vaksin, dagangan pedagang sedang laris-larisnya sehingga tidak bisa ditinggalkan.

Setelah sepi pembeli, pedagang tersebut datang ke lokasi vaksinasi di Lantai 4 Pasar Klewer. Namun, ternyata antreannya berjubel sehingga memutuskan kembali ke kios.

"Hari kedua itu target juga masih rendah. Tapi begitu hari ketiga kami dorong terus akhirnya capaiannya melonjak terus. Hari ini lebih banyak," ujarnya.

Dari pendataan yang dilakukan Disdag di Pasar Klewer, totalnya ada 4.000 lebih yang didaftarkan. Namun, untuk gelombang pertama kuota dari Dinas Kesehatan Kota (DKK) baru 3.000 orang.

Selain pedagang, Disdag juga mendata pelaku-pelaku usaha lainnya, seperti pegawai kios, tukang gendong, dan pelaku usaha lainnya di sekitar Pasar Klewer.

"Setelah banyak pedagang divaksin ternyata juga tidak ada dampak, yang lain berlomba-lomba untuk divaksin. Bahkan keluarganya di rumah maunya didaftarkan juga," jelasnya

Di samping lima pasar tersebut, Disdag juga telah menyiapkan data pedagang di puluhan pasar lainnya di Solo. Totalnya ada 44 pasar tradisional di Kota Bengawan. Namun, jadwal vaksinasi ditentukan oleh DKK.

"Data base kami siap, misalnya baru Rabu (3/3) sore kami dikabari kalau vaksinasi pedagang Pasar Legi hari ini kami sudah siap. Pasar Legi kemarin data kami yang masuk 600 sekian pedagang. Kalau pedagangnya di sana ada ribuan. Tapi *kan* bertahap, dan pendaftaran harus memenuhi nama, nomor induk kependudukan (NIK), dan nomor ponsel," ujar Heru.

Kepala DKK Solo, Siti Wahyuningsih, mengatakan setelah vaksinasi pedagang di empat pasar, maka DKK menambah jadwal vaksinasi untuk pedagang Pasar Legi pada Kamis sampai Jumat (5/3).

"Intinya nanti semua pasar. Tapi tunggu jadwal, tunggu vaksin. Makanya saya minta kalau yang sudah dijadwal benar-benar dipatuhi. Seperti Pasar Gede kemarin mereka mematuhi banget. Kalau Pasar Klewer Sabtu (27/2), Ahad (28/2), Senin (1/3) itu sedikit sekali sampai kami keliling-keliling," terang Siti.

■ ed : yusuf assidiq

Purbalingga Segera Bangun Mal Layanan Publik

■ EKO WIDIYATNO

PURBALINGGA — Meski tidak memiliki program kerja selama 100 hari masa pemerintahannya, Bupati Purbalingga, Jawa Tengah, Dyah Hayuning Pratiwi, berkomitmen melaksanakan Sapta Cipta yang menjadi visi-misi selama pemerintahannya. Ia pun akan menggenjot sedikitnya tujuh program unggulan.

Bupati menegaskan hal itu dalam pidato perdana di hadapan Rapat Paripurna DPRD Purbalingga, Kamis (4/3). Didampingi Wakil Bupati Sudono, ia membeberkan ketujuh program unggulan yang bakal diwujudkan selama masa kepemimpinannya.

"Pembangunan mal pelayanan publik dan smart government menjadi salah satu program bidang pelayanan publik yang akan segera kami wujudkan," jelasnya. Ia menyatakan, pembangunan mal layanan publik dan *smart government* tersebut sesuai dengan amanat pemerintah pusat dan program unggulan yang dicanangkan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.

Program unggulan lainnya, lanjut Bupati Tiwi, adalah program penurunan kemiskinan dan pengangguran. Program ini akan diwujudkan melalui peluncuran Kartu Pra Kerja Purbalingga dan pemberian santunan kematian bagi masyarakat yang kurang mampu.

"Kartu Pra Kerja Purbalingga akan diberikan kepada masyarakat yang kehilangan pekerjaan pasca Covid-19, namun belum mendapat bantuan dari pemerintah pusat," ujarnya.

Sedangkan di bidang ekonomi, bupati menyatakan telah menyiapkan stimulan bagi kelompok tani, kelompok UMKM dan pegiat wisata berupa dana hibah Rp 10 juta hingga Rp 30 juta. "Dana stimulan ini diberikan agar kegiatan pertanian, UMKM, dan pariwisata bisa terus bergerak memulihkan ekonomi masyarakat," kata dia.

Di bidang pendidikan, bupati akan memberikan tambahan honor bagi guru honorer. "Tambahan honor ini diberikan sejak Januari 2021. Dengan tambahan ini, maka honor guru honorer di Purbalingga mengalami kenaikan menjadi Rp 1,3 juta per bulan," jelasnya.

Selain menaikkan honor bagi guru honorer, ia juga akan memberikan insentif bagi guru-guru di pondok pesantren serta penyediaan ambulance desa. "Kami juga akan memberikan insentif tambahan bagi para ketua RT karena ke depan akan banyak dilibatkan dalam semua proses pendataan oleh pemerintah," kata bupati.

Dalam upaya meningkatkan Indek Pembangunan Manusia (IPM), Pemkab Purbalingga saat ini telah menjalin kerja sama dengan perguruan tinggi dan sejumlah lembaga pendidikan. Antara lain, dengan Universitas Islam Negeri (UIN) Purwokerto yang akan membangun universitas di Purbalingga.

Saat ini, pemkab juga sedang menjajaki kerja sama dengan Persyarikatan Muhammadiyah untuk membangun Institut Teknologi dan Bisnis Muhammadiyah Purbalingga (ITB MP). "Proses MoU ini tidak lama lagi akan segera selesai," jelasnya.

Diharapkan, dengan semakin banyaknya institusi pendidikan tinggi hadir, maka IPM Purbalingga juga semakin meningkat. Untuk bidang infrastruktur, Bupati akan memprogramkan pengembangan ruang terbuka hijau (RTH) atau taman kota di setiap wilayah kecamatan. ■ ed : yusuf assidiq

MDMC Dirikan 17 Dapur Umum Berbasis Masjid-Mushala

■ WAHYU SURYANA, EKO WIDIYATNO

PEKALONGAN — Sudah tiga pekan lebih dampak banjir dirasakan masyarakat di Kabupaten dan Kota Pekalongan, Jawa Tengah. Karenanya, Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC) tetap mendirikan dapur umum berbasis jamaah masjid dan mushala di beberapa desa terdampak.

Ada 17 dapur umum berbasis masjid mushala dari total 35 unit yang dibangun, dengan 10 unit masih aktif sampai saat ini. Ketua MDMC Pekalongan, Rofiansa Sulthon mengatakan, pemberdayaan jamaah masjid dan mushala jadi silaturahim dan membuat masyarakat tangguh.

"Ini selaras program Muhammadiyah membentuk jamaah tangguh bencana, juga membuat korban bencana tidak hanya pasrah tapi ada yang bisa dilakukan dalam aktivitas bersama untuk mengatasi permasalahan, terutama pemenuhan kebutuhan dasar makan," katanya.

Jamaah masjid dan mushala yang ditempati dapur umum mengetahui kebutuhan dari penyintas yang dikelola, sehingga koordinasi lebih mudah. Ketua Pos Koordinasi MDMC Pekalongan, Fauzan Amin menuturkan, mereka turut memberi layanan psikososial dan kesehatan.

"Kami menggelar layanan kesehatan di sembilan titik pengungsian 26-28 Februari 2021, tenaga kesehatan dari RSIA 'Aisyiyah Pekajangan, Klinik Pratama 'Aisyiyah Wiradesa, dan RSI PKU Muhammadiyah Pekajangan, sedangkan penerima manfaat berjumlah 1.078 jiwa," kata Fauzan.

Pendampingan psikososial diiringi pembelajaran baca Alquran bagi anak-anak. Setelah ini, akan dilakukan evaluasi terhadap respons tanggap darurat yang sudah dilaksanakan, pembersihan rumah ibadah dan rumah penyintas, kemudian pemberian paket peduli banjir.

Bagi Muhammadiyah, banjir Pekalongan merendam 25 Amal Usaha Muhammadiyah (AUM). Terdiri dari 18 mushala/masjid, enam sekolah/TPQ dan satu gedung Pimpinan Cabang Muhammadiyah (PCM). Sudah Rp 235 juta lebih bantuan didonasikan selama tanggap darurat.

Terpisah, di Kabupaten Purbalingga, Bupati Dyah Hayuning Pratiwi meresmikan Hunian Sementara (Huntara) untuk para keluarga yang terdampak bencana tanah bergerak di Desa Tumanggal, Kecamatan Pengadegan. Huntara ini dibangun oleh MDMC setempat.

■ ed : yusuf assidiq

INSPIRA

■ OLEH **ERIK HADI SAPUTRA**
KAPRODI ILMU KOMUNIKASI DAN DIREKTUR KEHUMASAN DAN URUSAN INTERNASIONAL, UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA

Penolakan dan Impian

Pembaca yang kreatif, seberapa sering anda mendapatkan penolakan dalam aktivitas Anda? Beberapa mahasiswa program studi ekonomi dalam kuliah *success skill* memberikan jawaban beragam. Ada yang menjawab penolakan yang dialaminya disebabkan keluarga yang tidak merestuinya untuk melanjutkan ke pendidikan tinggi.

Padahal keinginannya untuk melanjutkan kuliah begitu tinggi. Awalnya penolakan kuat datang dari kakaknya sendiri namun setelah kegigihannya untuk terus kuliah akhirnya kakaknya tidak hanya sekedar mendukung namun juga menyiapkan kebutuhan pembelajaran untuknya. Ada mahasiswa yang mendapatkan penolakan karena ingin memiliki laptop.

Di sisi lain orangtua merasa itu belum perlu. Sehingga diminta untuk memanfaatkan apa yang ada saja. Tentu semangat mahasiswa itu tidak boleh berhenti sampai di situ. Bisa memanfaatkan komputer warnet bahkan kecerdasan yang dimilikinya bisa saja memanfaatkan komputer/laptop teman kuliahnya dalam mengerjakan tugas-tugas bersama karena memang analisanya dibutuhkan.

Ada lagi mahasiswa yang tidak diizinkan pulang kampung dan tetap di minta berada di Yogyakarta saja. Padahal rasa rindunya kepada keluarga besarnya dalam sekali. Dia bersabar selama Covid-19 di Yogyakarta, sementara teman-temannya kembali ke rumah masing-masing. Rasa rindu yang kuat tadi bisa dijadikan sebagai pemicu untuk bersemangat dan mengasah diri selama menempuh perkuliahan agar target lulus tepat waktu bisa didapatkannya.

Di sisi lain ada mahasiswa yang ditolak beberapa kali dalam melamar pekerjaan. Alasan belum memiliki kompetensi yang kuat membuat dia harus lebih sabar dengan itu semua. Memompa terus kemampuan dirinya akan membuat dia lebih siap dengan hal baru yang lebih baik.

Pembaca yang kreatif, ketika anak busur ditarik ke belakang, itu bukanlah sekadar tarikan mundur. Namun itu adalah mundur dengan energi besar untuk maju melesat ke depan. Terakhir, ada mahasiswa yang malu menyampaikan kenyataan bahwa ungkapan rasa cintanya kepada seseorang bertepuk sebelah tangan.

Saran yang pas untuk mahasiswa ini adalah kalau Anda tidak bisa bersaing secara fisik maka menanglah dengan karya. Yakinlah penolakan itu akan membuat seseorang semakin kuat. Mengapa begitu? Karena untuk memperoleh sesuatu, terkadang kita perlu lebih tangguh dan bersabar. Bisakah anda membayangkan, jika Anda belum pernah mendapatkan penolakan sama sekali dalam hidup ini? Keadaan itu bisa membuat Anda menyerah, bahkan merasa tidak berarti.

Kisah Walter Elias Disney ketika memiliki gagasan mendirikan Disneyland muncul. Saat itu ia berjalan-jalan di taman dengan kedua putrinya, Sharon dan Diana. Ia membayangkan sebuah taman wisata yang sangat luas yang bisa menjadi tempat anak-anak dapat bertemu dengan tokoh kartun yang mereka sayangi.

Ketika Walt Disney akhirnya memutuskan untuk proyek tersebut, tidak ada seorang pun atau apa pun dapat mengubah keputusannya. Walt Disney menarik pelajaran berharga yang dia terapkan sepanjang hidupnya. Pertama, kebahagiaan akan muncul dalam diri kita, apabila kita melakukan sesuatu yang benar-benar kita sukai.

Kedua, kehidupan adalah suatu pilihan, kita mau kaya atau miskin tergantung keputusan dan tindakan kita sepenuhnya saat ini. Ketiga, tidak peduli seberapa sulit keadaan kita saat ini. Keadaan pasti akan berubah baik, apabila kita masih memiliki harapan.

Keempat, kesuksesan dimulai ketika kita mulai menciptakan impian jauh ke depan dan saat kita berkomitmen untuk mencapai impian itu, maka selanjutnya impian itu yang akan menjadi magnet dan menarik kita ke sana. Sehat dan sukses selalu. ■

UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA

REPUBLIK Baris
TERJANGKAU HARGANYA | LUAS PEREDARANNYA | CEPAT LAKUNYA

AHLI SUMUR & P.AIR

Pakar anti petir, Reparasi Pompa air sumbersible pump. Sedia: Pompa Baru/Bekas,Bor dlm tembus batu& geolistik,Loging(Berga ransi 1thn). Hub:WA/tlf. 085868542 999, 08122735153

SKRIPSI

Siap Bantu Skripsi,Tesis&Desertasi semua jur.Era Jl.Janti Gedongkuning Blk STTL T.551461/08182 77603

BERLANGGANAN DIY, JATENG, & JATIM
0274 - 544972

KANTOR PERWAKILAN
JAWA TIMUR
Jl. Kalibokor No. 79 Surabaya
LAYANAN PELANGGAN:
(031) 994 429 89
087803338055

REPUBLIKA

Jawa Timur

JUMAT, 5 MARET 2021 | 21 RAJAB 1442 H

www.republika.co.id

@republikaonline @republikaonline RepublikaOnline

Gerakan Seribu Rupiah Bantu PKL Kayutangan

Kawasan Kayutangan akan menjadi destinasi wisata di Kota Malang.

■ WILDA FIZRIYANI

MALANG — Upaya membantu para Pedagang Kaki Lima (PKL) di kawasan Kayutangan, Kota Malang, dilakukan melalui Gerakan Seribu Rupiah (Gerbu) yang diiniasi pemerintah kota setempat. Gerakan ini ditujukan untuk gotong-royong dan membantu sesama.

Wali Kota Malang, Sutiaji mengatakan, Gerbu merupakan apresiasi kepada masyarakat yang mendukung terhadap pembangunan di Kota Malang. Terutama terhadap warga yang terdampak atas pembangunan Kayutangan, beberapa bulan lalu. "Mereka yang ada kesabaran, kita berikan *reward*," kata Sutiaji, Kamis (4/3).

Pada kesempatan itu, Sutiaji juga menyampaikan bahwa penataan PKL di Kayutangan memiliki tujuan baik. Kawasan tersebut akan menjadi destinasi wisata di Kota Malang. Oleh sebab itu, para PKL diminta untuk tidak khawatir karena wisatawan akan masuk ke kampung nantinya.

Untuk diketahui, Pemkot Malang menargetkan pembangunan di Kayutangan akan menyerupai kawasan Malioboro di Yogyakarta dan Jalan Braga di Bandung. Pembangunan sebelumnya mengharuskan penutupan di beberapa titik jalan sehingga mengurangi pemasukan para PKL di lokasi sejak 9 November hingga 20 Desember 2020.

Kebijakan ini diambil karena terdapat pemasangan batuan andesit di area Kayutangan atau Jalan Jenderal Basuki Rahmat. Koridor Kayutangan akan terkoneksi dengan area perkampungan yang ada di sekitaran kawasan pengembangan wisata tersebut.

Diharapkan kawasan Kayutangan akan menjadi salah satu destinasi wisatawan saat berkunjung ke Kota Malang. Meskipun saat ini akses di kawasan Kayutangan tersebut telah dibuka, Pemerintah Kota Malang juga akan mengubah arus lalu lintas pada kawasan tersebut.

Namun, penerapan arus lalu lintas baru itu masih menunggu rekomendasi dari forum lalu lintas. "Kami masih menunggu rekomendasi dari forum lalu lintas untuk arahnya sehingga kami belum bisa memutuskan nanti ke arah mana," ujar Sutiaji.

Koridor Kayutangan, atau yang saat ini lebih dikenal sebagai Jalan Basuki Rachmad dipilih karena memiliki nilai sejarah tinggi. Pendanaan pembangunan kawasan tersebut, sebagian besar berasal dari pemerintah pusat melalui Dana Alokasi Khusus (DAK), dengan total Rp 23 miliar.

Rencana Pemerintah Kota Malang dalam konsep Malang City Heritage untuk wilayah Kayutangan adalah mewujudkan suatu kawasan heritage atau warisan budaya, yang sekaligus menjadi destinasi wisata.

Setelah penataan jalan di Jalan Basuki Rahmat, Sutiaji mengatakan, Pemkot Malang akan kembali melanjutkan pembangunan dengan memanfaatkan dana APBD. Ia berharap, pembangunan dan pengembangan ini dapat selesai pada Agustus 2021. "Kita harapkan ini akan menjadi salah satu destinasi wisatawan saat berkunjung ke Kota Malang," katanya.

Adapun Gerbu yang diinisiasi sejak awal pemerintahan Wali Kota Sutiaji ini menggandeng Baznas Kota Malang. Basnaz memberikan kotak khusus untuk Gerbu bagi para ASN di seluruh perangkat daerah Kota Malang dan selalu rutin mengumpulkan dana tersebut tiap pekannya.

Total dana Gerbu sampai akhir Februari 2021 tercatat mencapai Rp 156 juta. Ketua Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Malang, Sulaiman mengatakan, pihaknya sudah menerima pengajuan dari paguyuban PKL Kayutangan mengenai Gerbu.

Setelah itu, Baznas melakukan verifikasi di lapangan hingga mendapatkan 54 PKL yang berhak mendapatkan bantuan Gerbu. Nantinya, para PKL setidaknya mendapatkan masing-masing Rp 500 ribu. ■ antara **ed** : yusuf assidiq

PRASETIA FAUZANI/ANTARA

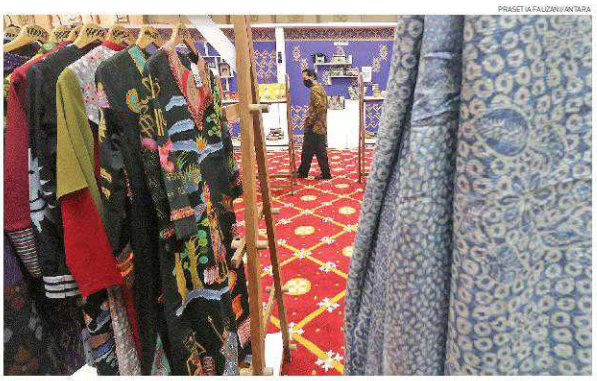

PAMERAN UMKM Pengunjung mengamati produk kerajinan saat pameran Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kota Kediri, Kamis (4/3). Pameran UMKM binaan BI yang diselenggarakan oleh 46 kantor perwakilan BI daerah tersebut diselenggarakan secara virtual dan offline.

Jatim Komitmen Mendukung Pengembangan UMKM

■ DADANG KURNIA

SURABAYA — Kontribusi usaha mikro kecil dan menengah dalam mendorong roda perekonomian daerah, termasuk di Provinsi Jawa Timur, dinilai sangat signifikan. Oleh karenanya, Wakil Gubernur Jatim, Emil Elestianto Dardak mengatakan, Pemprov Jatim terus berkomitmen mendukung gerakan UMKM di wilayah setempat.

Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan terus menyediakan panggung bagi pelaku UMKM agar produknya dikenal lebih luas, bahkan hingga tingkat dunia. "UMKM di Jatim ini sangat kaya. Kaya secara kreativitasnya, kualitasnya, prestasinya. Menurut kami, semuanya akan punya potensi untuk mengembangkan pasar. Apapun UMKMnya, pemprov akan memberikan dukungan penuh dengan bimbingan Dekranasda Jatim," kata Emil, di Surabaya, Kamis (4/3).

Emil berpendapat, prestasi serta kualitas UMKM yang ada di Jatim bisa melambung tinggi jika semua stakeholder terkait berkolaborasi. Pemprov Jatim diakuinya menyadari, wilayah setempat tidak akan mendapatkan prestasi di bidang UMKM jika hanya berjalan sendiri.

"Pemprov harus bermitra dengan berbagai pihak, salah satunya adalah Bank Indonesia yang memiliki kepedulian luar biasa dan juga punya kualitas sangat tinggi tentang kurasi terhadap UMKM yang potensial," ujarnya.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Wilayah IV Jatim, Difi Ahmad Johansyah mengatakan, pihaknya juga terus mendukung kemajuan UMKM, dalam rangka mendukung Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia yang dicanangkan Presiden Jokowi. Salah satunya dengan menyelenggarakan kegiatan Showcase Produk UMKM Unggulan Jatim melalui kegiatan Karya Kreatif Indonesia (KKI).

Ia menegaskan, acara yang digelar merupakan upaya Bank Indonesia untuk mempromosikan produk UMKM Jatim dan mengajak masyarakat untuk memilih produk dalam negeri. Difi juga mengingatkan masyarakat tidak perlu meragukan UMKM Indonesia, utamanya di Jatim. ■ **ed** : yusuf assidiq

Pemimpin Baru Telah Lahir

Eri Cahyadi-Armuji Siap Lanjutkan Kebaikan

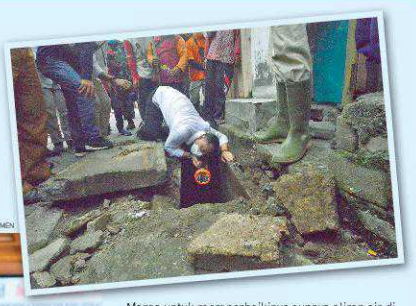

FOTO-FOTO: DOKUMEN

Wali Kota Eri Cahyadi dan Wawali Armuji secara resmi menerima tongkat kepemimpinan Surabaya.

Setiap pemimpin ada masanya. Setiap masa, ada pemimpinnya. Kini, pemimpin baru itu telah lahir. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi dan Wakil Wali Kota Surabaya Armuji siap melanjutkan kebaikan yang ada di Surabaya. Ia siap membawa Surabaya terbang tinggi!

Nyaris tak ada istirahat baginya. Usai dilantik di Gedung Negara Grahadi pada Jumat (26/2/2021) lalu, ia langsung tancap gas melayani warga Surabaya. Bahkan, di hari pertama kerja, Wali Kota Eri Cahyadi langsung memantau pelaksanaan vaksinasi massal bagi lansia di Lobby Gedung The Samator Jalan Kedung Baruk, Surabaya.

Setelah itu, ia juga memantau dan menyapa warga yang donor darah dan donor plasma konvalesen di Grand City Surabaya. Dia bersyukur karena Surabaya menjadi penggerak donor plasma konvalesen.

Tentunya ini menunjukkan bahwa Surabaya membangun dengan cara gotong-royong. "Insyallah kalau kita bersama-sama dan bergotong-royong di masa pandemi ini, insyallah kita akan bisa melewatinya," katanya.

Bahkan, ketika malam itu Surabaya diguyur hujan lebat, ia langsung terjun mengecek pompa air di Kenjeran dan bahu membahu mencari penyebab terjadinya genangan di kawasan tersebut. Hingga ditemukan ada jembatan yang bermasalah dan tak lagi difungsikan, sehingga dia pun meminta jajarannya untuk membongkar jembatan tersebut.

Kemudian pada Senin (1/3/2021), Wali Kota Eri Cahyadi dan Wawali Armuji secara resmi menerima tongkat kepemimpinan Surabaya. Pasalnya, kala itu DPRD Surabaya menggelar rapat paripurna serah terima jabatan Wali Kota Surabaya dan Wakil Wali Kota Surabaya. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa turut menyaksikan serah terima jabatan itu.

Seusai serah terima jabatan, ia nampaknya enggan beristirahat. Dia membuka jas kehormatannya dan langsung blusukan meninjau sejumlah saluran dan bahkan melakukan rapat teknis di lapangan. Ia seakan mewarisi pendahulunya, mantan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini, yang selalu sigap mengambil keputusan ketika ditemukan masalah di lapangan.

Ia juga berjalan kaki menelusuri beberapa saluran hingga masuk ke gang-gang kecil. Tepat di pintu masuk Gang Lebar Jalan Raya Tandes, dia meminta beton penutup saluran itu dibuka. Alat berat pun didatangkan untuk membuka penutup beton itu. Beberapa penutup beton juga dibuka oleh Satgas PU Bina Marga dan Satgas DKRTH.

Bahkan, saat itu Wali Kota Eri Cahyadi langsung melihat sendiri kondisi di bawah saluran. Dengan berbekal senter besar, ia beberapa kali jongkok hingga dlosor demi melihat kondisi di bawah saluran.

Alhasil, ia menemukan saluran yang agak tertutup, sehingga dia memerintah Dinas PU Bina Marga untuk memperbaikinya supaya aliran air di kawasan itu lebih lancar. "Ternyata itu yang menyebabkan tidak lancar, tolong nanti diperbaiki ya," ujarnya.

Selanjutnya, ia bersama jajarannya juga meninjau saluran di kawasan Gadel, Kelurahan Karangpoh, Kecamatan Tandes, Surabaya. Lagi-lagi, ia turun dari mobil dinasnya dan jalan kaki demi memantau saluran di gang-gang kecil tersebut. Setiap kali bertemu warga, ia juga meminta dukungan warga setempat untuk membangun daerahnya. "Insyallah kalau kita bersama-sama membangun, semuanya akan dilancarkan," kata dia.

Di lain kesempatan, Wali Kota Eri Cahyadi menyatakan bahwa program-program pembangunan pro wong cilik yang telah dirintis oleh pendahulunya akan terus dilanjutkan, bahkan ditingkatkan.

Pelaksanaannya tentunya akan diselaraskan dengan visi Presiden Joko Widodo dan sejalan dengan visi Gubernur Jawa Timur.

"Pembangunan akan kami lakukan untuk sebesar-besarnya demi kemakmuran rakyat, dilaksanakan dengan gotong royong yang menjadi modal besar dalam membangun Kota Surabaya yang kita cintai ini," tegasnya.

Sebagai sosok leadership yang telah lama berkecimpung dalam urusan pembangunan di Kota Surabaya, Eri Cahyadi menilai bahwa pembangunan sebuah kota harus dilakukan secara sinergis dan berkelanjutan.

"Tugas yang diamanahkan ini tentunya tidak mudah, namun kami percaya dapat melaksanakan tugas tersebut melalui kolaborasi, partisipasi dan dukungan dari seluruh elemen masyarakat Surabaya serta para pemangku kepentingan (stakeholders)," pungkasnya. ● adv